

345
WUR
v c1

TESIS



KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

JOKO WURYANTO, SH.
NIM : B4A 000 277

Dosen Pembimbing :
Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2 0 0 4**

TESIS

KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama : JOKO WURYANTO, SH.
NIM : B4A.000.277
Program Kajian : Sistem Peradilan Pidana

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 19 April 2004,
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

*KEPADA AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA,
YANG KASIH SAYANGNYA KEPADAKU TAK LEKANG OLEH ZAMAN,
YANG SENANTIASA MEMAAFKAN APAPUN KESALAHAN YANG AKU LAKUKAN,
YANG PENGORBANANNYA KEPADAKU TAKKAN DAPAT TERGANTIKAN OLEH APAPUN,
YANG TELAH MEMBERIKAN CONTOH KEPADAKU TENTANG ARTI KESABARAN DAN TAWAKAL,
YANG DOA DAN RIDHONYA SELALU KUHARAPKAN UNTUK MENGARUNGI KEHIDUPAN FANA INI,*

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN

TAK ADA SUATU KEADILAN YANG HAKIKI, KECUALI KEADILAN ILLAHIYAH.
AKAN TETAPI SENISBI APAPUN KEADILAN YANG DICIPTAKAN MANUSIA,
JIKA KEPUTUSAN MENCIPTAKAN KEADILAN ITU BERSANDAR PADA
PERENUNGAN ILLAHIYAH, MAKA KENISBIAN ITU AKAN
MENJADI PROSES AKBAR MENUJU
KEADILAN ILLAHIYAH KELAK.

(YOGYAKARTA, 18 MARET 2004)

ABSTRACT

The policy mention minimum punishment of imprisonment in statutory rules outside KUHP is deviation of system in KUHP because KUHP embraces maximal system to formulate punishment threat. Therefore, the sentencing system in KUHP orient at maximum system and not there are sentencing system to applying special minimum system.

The minimum punishment of imprisonment start to see in statutory rules in Indonesia along with appearance statutory rules outside KUHP which in it mention special minimum punishment of imprisonment.

This research represent research of normative yuridis, considering the problem of this research is focussed at formulation policy especially which concerning the minimum punishment of imprisonment.

The policy of the minimum punishment of imprisonment in statutory rules in Indonesia during the time generally is not mention the order to applying it. This matter result some problems because KUHP embraces maximal system and not there are order or sentencing system to applying special minimum system.

Efforting to conduct the formulation policy of the minimum punishment of imprisonment in order to renewal of criminal law, hence require to be paid attention 3 matter that is: the offences with the minimum punishment of imprisonment is offences maximumly lowest prison crime 7 year or offences which is increased by as a result; The pattern of the duration minimum punishment of imprisonment ought to be compiled in an uniform pattern by paying attention counter balance between maximum and its minimum of imprisonment; the order applying of minimum punishment of imprisonment, which for example in the reduced or increased of punishment and also exception go into effect minimum punishment of imprisonment to a minor is properly arranged in a coherent and clear rule so that can water down applying and interpretation go into effect it.

Keyword : *Minimum punishment of imprisonment, formulation policy.*

ABSTRAK

Kebijakan mencantumkan ancaman pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP merupakan penyimpangan dari sistem dalam KUHP sebab KUHP menganut sistem maksimal dalam merumuskan ancaman pidana. Oleh karena itu aturan/sistem pidana dalam KUHP berorientasi pada sistem maksimum dan tidak terdapat aturan atau sistem pidana yang menerapkan sistem minimum khusus.

Pidana penjara minimum khusus mulai tampak dalam perundang-undangan di Indonesia seiring dengan munculnya beberapa peraturan perundangan di luar KUHP yang di dalamnya mencantumkan pidana minimum khusus ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, mengingat permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan formulasi khususnya yang menyangkut pidana penjara minimum khusus.

Kebijakan pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan pidana di Indonesia (di luar KUHP) selama ini pada umumnya tidak disertai dengan pengaturan mengenai pola lamanya pidana penjara minimum khusus yang seragam serta tidak disertai dengan aturan penerapan berlakunya pidana minimum khusus. Hal ini menimbulkan masalah karena dalam merumuskan ancaman pidana, KUHP menganut sistem maksimum, dan tidak terdapat aturan atau sistem pidana yang menerapkan sistem minimum khusus.

Dalam upaya melakukan formulasi terhadap kebijakan pidana penjara minimum khusus dalam rangka pembaharuan hukum pidana, maka perlu diperhatikan 3 hal yaitu: Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus adalah tindak pidana yang diancam dengan maksimum pidana penjara paling rendah 7 tahun dan dapat diperberat oleh akibatnya; Pola lamanya pidana minimum khusus seharusnya disusun dalam suatu pola yang seragam dengan memperhatikan perimbangan antara maksimum dan minimum pidananya; Aturan penerapan pidana minimum khusus, yang antara lain berupa peringanan dan pemberatan pidana serta pengecualian berlakunya pidana minimum khusus terhadap pelaku delik di bawah umur seyogyanya diatur dalam suatu ketentuan yang jelas dan tegas sehingga dapat mempermudah penafsiran dan penerapan berlakunya pidana minimum khusus.

Kata Kunci : *Pidana penjara minimum khusus, kebijakan formulasi.*

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

Alhamdulillaahirobbil 'Alaamin,

Laa haula wa laa quwwata illa billaahil 'aliyil adhiim.

Segala sembah, segala puja dan segala syukur, hanyalah penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, yang atas segala rahman dan rahimNya, serta taufiq, hidayah dan iradhatNya, akhirnya tesis dengan judul ***Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*** dalam rangka studi Srata-2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dapat terselesaikan..

Sebagai karya ilmiah, tugas akhir ini terlaksana atas bimbingan, arahan serta curahan perhatian yang sangat intens dan obyektif dari Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H. yang disela-sela kesibukannya yang teramat padat tetap menunjukkan tanggung jawab akademisnya selaku pembimbing. Atas segala pengorbanan Beliau, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga ALLAH SWT menempatkan beliau pada golongan mulia dari orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya untuk tujuan kebaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
2. Bapak Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH atas nasehat dan arahan ketika dilakukan review terhadap proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Paulus Hadi Soeprapto, SH., MH., yang juga memberikan nasehat dan arahan ketika dilakukan review terhadap proposal tesis ini.
4. Bapak Eko Soponyono, SH., M.Hum., atas arahan dan nasehat ketika Seminar Hasil Penelitian tesis ini dilakukan.
5. Seluruh staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, khususnya staf pengajar pada Program Kajian Sistem Peradilan Pidana atas segala bantuan dan kerja sama selama penulis belajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bangsa Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menempuh Program Studi Magister.
7. Seluruh rekan-rekan S2 Kejaksaan pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang selalu antusias membagi ilmu dan pengalaman serta selalu hangat dalam pergaulan positif.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak dan Ibu Widi Pangarso, Ayahanda dan Ibunda tercinta, *pepundhen* penulis di muka bumi ini, yang telah banyak berkorban memberikan semangat dan dorongan spiritual maupun materiil selama penulis menyelesaikan studi.
2. Istri dan anakku tersayang, Afifah Herlinawati dan Ilviana Urfa Fadlillah, amanah ALLAH SWT kepada penulis untuk mengarungi kehidupan fana ini, atas segala cinta, pengertian, pengorbanan, dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Abdul Fatah sekeluarga, yang sungguh memberi dorongan, baik moril maupun materiil dalam penyusunan tesis ini.
4. Saudara-saudaraku tersayang ; Mbak Anik beserta keluarga, Mbak Susi beserta keluarga, Mbak Sri beserta keluarga, dan Adikku Rakhmad Jati Putranto yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materiil.
5. Keponakan-keponakanku terkasih, khususnya Laila Nur Fitriana dan Kholif Sholikhah Indra Kurniasih, yang telah memberikan motivasi besar dalam penyelesaian tesis ini.
6. Almarhumah Eyang Putri Windu Pangarso, yang telah menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada Penulis di akhir hayat beliau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi kemajuan hukum yang bertujuan keadilan dan demi pengembangan kemampuan penulis sendiri. Penulis berharap tesis ini akan memberikan manfaat pada diri penulis pribadi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Akhirnya, hanya kepada ALLAH SWT jualah, penulis memohon ampun serta mengharap Rahman dan RahimNya.

Semarang, Maret 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	19
1. Obyek/Fokus Yang Diteliti	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan	23
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 25
A. Pidana dan Pemidanaan	25
1. Pengertian Pidana	25
2. Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	35

3. Teori-Teori Pemidanaan	43
B. Latar Belakang Pemikiran Dianutnya Pidana Penjara	
Minimum Khusus	52
C. Kebijakan Hukum Pidana / Penal Policy	60
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana / Penal Policy ...	60
2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana	64
D. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	67
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	80
A. Pidana Minimum Khusus dalam Perundang-undangan di Indonesia	80
1. Pola Lamanya Pidana Minimum Khusus dalam Perundang-undangan di Luar KUHP	83
a. Undang Undang Narkoba	85
b. Undang Undang Perbankan	89
c. Undang Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN	92
d. Undang Undang Pengadilan HAM	93
e. Undang Undang Hak Cipta	96
f. Undang Undang Anti Teroris	98
g. Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ...	101
h. Pola Umum Minimum Khusus dalam Seluruh UU yang Menjadi Obyek Penelitian	103
2. Aturan Penerapan Berlakunya Pidana Minimum Khusus dalam Perundang-undangan di Luar KUHP	105
B. Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Perundang-undangan di Indonesia	111
1. Perbandingan Tindak Pidana-Tindak Pidana Tertentu Yang Diancam Pidana Minimum Khusus Dalam Konsep dan KUHP Negara Asing	113
a. Konsep KUHP Indonesia 2000	113
b. KUHP Jepang	121

c. KUHP Korea	127
d. KUHP Argentina	134
2. Perbandingan Pola Lamanya Minimum Khusus untuk Pidana Penjara Dalam Konsep dan KUHP Negara Asing	139
a. Konsep KUHP Indonesia 2000	140
b. KUHP Jepang	145
c. KUHP Korea	149
d. KUHP Argentina	152
3. Perbandingan Aturan Penerapan Pidana Minimum Khusus	156
a. Aturan Peringatan Terhadap Pidana Minimum	157
1) Konsep KUHP Indonesia 2000	157
2) KUHP Jepang	159
3) KUHP Korea	162
4) KUHP Argentina	165
b. Aturan Pemberatan Terhadap Pidana Minimum Khusus	167
1) Konsep KUHP Indonesia 2000	167
2) KUHP Jepang	170
3) KUHP Korea	172
4) KUHP Argentina	174
c. Pengecualian Berlakunya Pidana Minimum Khusus Terhadap Pelaku Delik Di Bawah Umur	175
1) Konsep KUHP Indonesia 2000	175
2) KUHP Jepang	176
3) KUHP Korea	177
4) KUHP Argentina	177

4. Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam KUHP Nasional Di Masa Depan	178
a. Tindak Pidana – Tindak Pidana yang Diatur dengan Pidana Penjara Minimum Khusus	181
b. Formulasi Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus	204
c. Formulasi Aturan Penerapan Pidana Minimum Khusus	215
1) Aturan Peringan Pidana Minimum Khusus ...	215
2) Aturan Pemberatan Pidana Minimum Khusus ...	217
3) Pengecualian Berlakunya Pidana Minimum Khusus Thd Pelaku Delik Di Bawah Umur	220
BAB IV. PENUTUP	224
A. Kesimpulan	224
B. Saran	227

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

			Halaman
1.	TABEL 1	Perincian Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus UU Narkotika	86
2.	TABEL 2	Kejanggalan Pola Pidana Minimum Khusus dalam Pasal-Pasal Tertentu di UU Narkotika	88
3.	TABEL 3	Perincian Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus dalam UU Perbankan	90
4.	TABEL 4	Kejanggalan Pola Pidana Minimum Khusus dalam Pasal-Pasal Tertentu di UU Perbankan	91
5.	TABEL 5	Perincian Ancaman Pidana Penjara dalam UU tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN	93
6.	TABEL 6	Perincian Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus dalam UU Pengadilan HAM	95
7.	TABEL 7	Perincian Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus dalam UU Anti Teroris	99
8.	TABEL 8	Kejanggalan Pola Pidana Minimum Khusus dalam Pasal-Pasal Tertentu di UU Anti Teroris	100
9.	TABEL 9	Perincian Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus dalam UU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	102
10.	TABEL 10	Pola Minimum Khusus dari Seluruh Undang Undang Yang Dijadikan Obyek Penelitian	103
11.	TABEL 11	Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Konsep KUHP Indonesia 2000	118
12.	TABEL 12	Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Jepang	125

13.	TABEL 13	Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Argentina	132
14.	TABEL 14	Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Argentina	137
15.	TABEL 15	Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Konsep KUHP Indonesia 2000	142
16.	TABEL 16	Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Konsep KUHP Indonesia 2000	143
17.	TABEL 17	Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Jepang	146
18.	TABEL 18	Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Jepang	147
19.	TABEL 19	Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Korea	150
20.	TABEL 20	Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Korea	151
21.	TABEL 21	Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Argentina	153
22.	TABEL 22	Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Argentina	154
23.	TABEL 23	Perbandingan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Minimum Khusus Pada KUHP Jepang, Korea, Argentina	183
24.	TABEL 24	Keberadaan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Minimum Khusus Sebagai Hasil dari Perbandingan KUHP Jepang, Korea, Dan Argentina Dalam Konsep KUHP Indonesia Tahun 2000	191
25.	TABEL 25	Lamanya Maksimum Pidana Penjara dari 19 Tindak Pidana dalam Konsep KUHP 2000 yang Perlu Diatur dengan Pidana Penjara Minimum Khusus	199

26.	TABEL 26	Perbandingan Pola Pidana Penjara Minimum Khusus pada Konsep KUHP Indonesia dan KUHP Jepang, Korea dan Argentina	204
27.	TABEL 27	Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Konsep KUHP Indonesia	207
28.	TABEL 28	Formulasi Pola Lamanya Minimum Khusus Terhadap Pidana Penjara	213

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap negara mempunyai tekad berusaha meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya, sehingga dapat tercapai kehidupan yang aman dan sejahtera. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka baik negara-negara maju maupun negara berkembang melakukan pembangunan di segala bidang demi tercapainya kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Sejalan dengan usaha yang demikian, bagi negara-negara yang baru merdeka dilakukan usaha pembaharuan di bidang hukum. Masalah pembaharuan hukum (*Law Reform*) ini merupakan salah satu diantara banyak permasalahan hukum, yang terutama dihadapi oleh negara-negara berkembang.¹

Menurut Sudarto², dasar dari pembaharuan di bidang hukum tersebut dilandaskan pada tiga alasan, yaitu :

1. Alasan Politis, yaitu alasan yang dilandasi oleh pemikiran, bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional.

¹ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 36.

² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal 66-68.

3. Alasan Praktis, yaitu alasan yang antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara-negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa asli yang banyak dipakai dan tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut.

Negara Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang, juga sedang membangun dan berusaha untuk memperbaharui hukumnya secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Tuntutan pembaharuan ini menjadi semakin kuat pada era reformasi, dimana rakyat seperti mendapatkan “angin kebebasan” untuk dapat menyalurkan aspirasinya serta menuntut diwujudkannya hukum dan aturan perundang-undangan yang dapat menampung rasa keadilan masyarakat.

Dalam melaksanakan program pembangunan hukum tersebut, terdapat beberapa sendi utama yang dijadikan dalam pembangunan sistem hukum nasional, antara lain³ :

1. Sendi negara berdasarkan konstitusi dan negara berdasarkan atas hukum
2. Sendi kerakyatan dan demokrasi
3. Sendi kesejahteraan sosial

Dalam setiap Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di bidang hukum selalu diamanatkan bahwa dalam rangka pembangunan hukum, perlu ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu, antara lain dengan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang hukum tertentu, serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung perubahan di berbagai bidang sesuai dengan perubahan,

serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Semua upaya pembangunan hukum tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberi patokan, arahan dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.⁵

Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal demikian penting, karena hukum pidana merupakan cermin suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga berubah.⁶

³ H.A.S. Natabaya, *Upaya Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi*, Makalah Disampaikan Pada Forum Dialog Terbuka, Jakarta, 5 Mei 1999.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman RI, 1995/1996, hal. 115.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 29.

⁶ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, tanpa tahun, hal iii.

Herbert L. Packer dalam bukunya *"The Limit of The Criminal Sanction"* juga menyatakan :

"The three basics problems of substance (as opposed to procedure) in criminal law :

1. *What conduct should be designated as criminal,*
2. *What determination must be made before a person can be found to have committed a criminal offense,*
3. *What should be done with person who are found to have committed criminal offenses."*⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut dogmatis normatif, permasalahan pokok dari hukum pidana adalah :

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau biasa disingkat dengan masalah "tindak pidana".
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan /mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah "kesalahan".
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah "pidana".⁸

Selanjutnya dipandang dari sudut operasionalisasi/fungsionalisasi, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya, hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga fase/tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan Legislatif/Formulatif.

⁷ Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 17.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 111.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang berwenang dalam tahap ini adalah Kekuasaan Aplikatif/Yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada Kekuasaan Eksekutif/Administratif.⁹

Dari ketiga tahap tersebut di atas, maka tahap formulasi atau tahap penetapan hukum pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis, karena dalam tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan legislasi yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.¹⁰

Dengan demikian dari segi pengalokasian kewenangan/kebijakan, maka kebijakan formulasilah yang memiliki posisi paling strategis dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

⁹ *Ibid*, hal 99.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1993, hal 3.

Dengan tanpa mengabaikan masalah tindak pidana dan masalah kesalahan, maka masalah penjatuhan pidana (sanksi) dewasa ini juga dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasan dari masyarakat maupun pelaku kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki dan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*).

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya ditentukan mengenai :

1. Maksimum dan minimum, misalnya untuk pidana penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : "Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut". Sedangkan untuk pidana kurungan minimum satu hari dan maksimum satu tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 18 KUHP ayat (1) yang berbunyi : "Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun".
2. Aturan pemberian pidana (*straftoemetingaregels*) seperti yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 52, dan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.
3. Maksimum khusus pada setiap tindak pidana, misalnya dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Selain ketentuan di atas, dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2002, pada Buku I Pasal 64 ayat (2), dinyatakan sebagai berikut :

“Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.”

Dari pasal di atas, maka dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2002 dimungkinkan adanya “minimum khusus” untuk tindak pidana tertentu dan hal ini merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan.

Dalam Lokakarya “Sanksi Pidana dalam Buku II KUHP Baru” yang dilaksanakan oleh BPHN pada bulan Pebruari 1986 dinyatakan bahwa minimum umum satu hari perlu diimbangi dengan minimum khusus, terutama untuk delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat pada umumnya dan delik-delik yang pada umumnya dikualifikasikan oleh akibat yang ditimbulkannya.

Masalah sistem minimum khusus ini disamping erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat, juga berkaitan erat dengan tujuan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri pada hakekatnya ditujukan kepada pidana yang mempunyai jiwa dan kasih sayang sesama manusia, sehingga pidana tersebut sekali-kali tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama manusia.

Dengan melihat ketentuan yang ada dalam KUHP yang hanya mengatur tentang minimum umum pidana penjara selama 1 (satu) hari, maka hal tersebut perlu diimbangi dengan minimum khusus terutama untuk delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat pada umumnya dan delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief mengemukakan :

Apabila dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana minimum dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub sistem dari sistem pemidanaan. Oleh karena itu, pidana minimum khusus ini tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan, harus ada sub sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan/pedoman pemidanaannya.¹¹

Oleh karena dalam KUHP sebagai buku induk dari semua perundang-undangan pidana di Indonesia tidak diatur mengenai pidana minimum khusus ini, maka hal ini merupakan suatu penyimpangan, sehingga apabila dalam perundang-perundangan di luar KUHP dicantumkan mengenai pidana minimum khusus, seharusnya pula disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaannya.

Dalam hal inilah kebijakan formulasi yang mengatur tentang pidana penjara minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan (KUHP) di Indonesia akan dibahas dalam penelitian ini.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 134.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peraturan perundangan diluar KUHP selama ini mengatur tentang pidana penjara minimum khusus ?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peraturan perundangan diluar KUHP selama ini mengatur tentang pidana penjara minimum khusus
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam upaya pembaharuan hukum di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoretis akan menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal kebijakan formulasi, khususnya kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus, dalam rangka mengintegrasikan ide perlindungan masyarakat (prevensi general) dan ide perlindungan atau ide pembinaan individu (prevensi spesial) yang akan dijadikan pedoman pemidanaan oleh legislatif.

2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran upaya pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam penyusunan KUHP baru, sebagai pengganti dari KUHP sekarang yang berasal dari WvS, mengenai kebijakan pidana penjara minimum khusus.
3. Bahan dokumentasi dalam studi Sistem Peradilan Pidana, agar dapat lebih bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Teoritis

Kejahatan merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku atau pelanggaran atas aturan-aturan hukum dan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sering menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada Kongres PBB di Caracas VI tahun 1986 tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar" dinyatakan :

"Bahwa fenomena kejahatan melalui pengaruhnya terhadap masyarakat mengganggu seluruh pembangunan bangsa-bangsa, merusak kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun materiil, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas hidup."¹²

¹² Document, Fifth United Nation Congress on *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Report on Agende Item 9, Jenewa-Austria, 1-12 September 1975, hal. 41.

Walaupun tidak mungkin menghilangkan semua kejahatan yang ada, namun dengan melihat demikian besarnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, maka diperlukan suatu upaya untuk menanggulangnya. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksi pidananya.

Dalam bidang kebijakan penegakan hukum, penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi kejahatan (masalah sosial) merupakan hal yang tercakup di dalamnya.

Selain itu, disebabkan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk di dalam kebijakan sosial. Dengan demikian, masalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).¹³ Maka, hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal.¹⁴

Dari hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari politik hukum pidana atau kebijakan kriminal. Sudarto pernah mengemukakan 3 arti kebijakan kriminal, yaitu :

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit, hal. 18.

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 73.

1. *Dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. *Dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *Dalam arti paling luas*, yaitu keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁵

Dengan melihat kebijakan kriminal dalam arti luas sebagaimana dipaparkan Sudarto di atas, maka berbicara mengenai masalah pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tidak terlepas dari kebijakan kriminal di Indonesia, yaitu kebijakan pemerintah di bidang hukum pidana yang sejalan dengan Pancasila dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memandang manusia sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang mempunyai jiwa dan badan, sehingga hukum pidana tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai kemanusiaan dan hasil kasih sayang sesama.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan :

“ Hal tersebut di atas juga berlaku dalam proses penyusunan hukum pidana, yang tidak dapat dilepaskan dari landasan dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea IV, yang secara singkat dapat diutarakan sebagai “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijaksanaan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan dari politik hukum di Indonesia, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia.”¹⁶

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 161.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* Op.Cit, hal. 1.

Dalam bukunya yang lain, Sudarto mengemukakan bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten.¹⁷

Dalam fokus terhadap masalah pemberian pidana dan pemidanaan, maka pemberian pidana dan pemidanaan ini bertujuan sebagai pencegahan umum (*prevensi general*) di satu pihak, dan pencegahan khusus (*prevensi spesial*) di lain pihak. Pencegahan umum dimaksudkan pemidanaan akan berpengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain si pembuat, yaitu pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum. Sedangkan pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh terpidana secara lahir batin dan terpidana tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau lebih baik dari sebelumnya. Artinya, dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana.

Pengertian sistem pemidanaan mencakup pengertian yang luas. L.H.C. Hullsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)¹⁸.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op.Cit, hal. 63.

¹⁸ L.H.C. Hullsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative*, di dalam D.C. Fokkema (Ed.) *Introduction To Dutch Law For Foreign Lawyers* (Kluwer Deventer, The Netherlands 1978), hal. 320.

Barda Nawawi Arief mengemukakan :

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹⁹

Hal di atas berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*"the statutory rules"*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.²⁰

Apabila pemidanaan ditinjau dari segi orientasinya, dikenal adanya 2 macam teori pemidanaan, yaitu :

1. Teori Absolut (pembalasan), yaitu teori yang berorientasi ke belakang berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan.
2. Teori Relatif (tujuan), yaitu teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial.²¹

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal 117.

²⁰ *Ibid*, hal.118.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 60.

Di dalam masyarakat modern, tampaknya ada kecenderungan untuk mengarah pada teori gabungan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang perwujudannya tampak pada Ketentuan Pasal 50 Konsep KUHP Baru tahun 2000, yang menyebutkan :

“Pemidanaan bertujuan :

- a mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Teori pemidanaan relatif yang bertujuan untuk mengadakan penyembuhan, baik luka individual maupun luka sosial, dalam pelaksanaannya terkait dengan unsur-unsur pendukung Sistem Peradilan Pidana yaitu lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.²² Di samping itu, masyarakat sebagai wadah Sistem Peradilan Pidana juga mempunyai peranan penting dalam rangka pencapaian tujuan teori pemidanaan relatif tersebut. Hal ini disebabkan masyarakatlah yang pada akhirnya menerima dan menilai produk yang dihasilkan oleh Sistem Peradilan Pidana tersebut, atau dengan kata lain masyarakatlah yang menentukan keberhasilan resosialisasi.

²²Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Tetap dalm Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 1.

Bertolak dari tujuan pemidanaan yang pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka dalam pembaharuan hukum pidana diperlukan adanya sanksi pidana yang bersifat minimal khusus, terutama untuk delik-delik yang membahayakan dan merugikan masyarakat. Hal ini tercermin dalam Loka Karya "Sanksi Pidana dalam Buku II KUHP Baru" yang dilaksanakan oleh BPHN pada bulan Pebruari 1986, yang menyatakan bahwa minimum satu hari perlu diimbangi dengan minimum khusus, terutama untuk delik-delik yang dipandang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat pada umumnya dan delik-delik yang pada umumnya dikualifikasikan oleh akibat yang ditimbulkannya.

Oleh karena sistem sanksi pidana minimum khusus ini belum dikenal dalam KUHP, maka Konsep KUHP Nasional yang baru telah mencoba memuat ketentuan tersebut dalam Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan : "Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus."

Dianutnya sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Konsep KUHP Nasional yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP, didasarkan pada pokok pemikiran sebagai berikut :

- Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;

- Dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.²³

Dalam hal dihindarinya disparitas pidana, maka akan mencegah demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan tertentu yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada kalangan yang lain dalam kasus yang sebanding.²⁴

Pada dasarnya, pokok pemikiran pidana minimum khusus dalam Konsep Rancangan KUHP adalah sebagai berikut :

- Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya. Sebagai ukuran kuantitatif, dapat dipergunakan batasan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun saja yang diberi ancaman minimum khusus karena delik-delik itulah yang digolongkan "sangat serius". Batasan ini dalam hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong "berat" (yaitu delik-delik yang diancam dengan 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tahun) penjara).
- Lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat dan hakikat dari delik yang bersangkutan.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit., hal 125.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 54.

- Seperti halnya dengan maksimum khusus, pada prinsipnya ancaman minimum khusus ini juga dalam hal-hal tertentu harus dapat dikurangi dan diperingan.

Lamanya minimum khusus terhadap pidana penjara dalam Konsep KUHP, pada mulanya dikembangkan pola yang berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan. Hal ini didasarkan pada perbandingan pola yang ada di berbagai negara, antara lain :

- Norwegia : berkisar antara 2 (dua) bulan sampai dengan 8 (delapan) tahun.
- Yugoslavia : berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- Polandia : berkisar antara 6 (enam) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- Korea : berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- Jepang : berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) tahun.²⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, pada Rapat Tim Pengkajian Konsep KUHP Bulan April 1989, disepakati pola minimum untuk pidana penjara yang berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun.²⁶

Pada perkembangan terakhir, yaitu dalam Konsep KUHP tahun 2000, pola minimum khusus untuk pidana penjara ini berubah menjadi berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 128.

²⁶ *Ibid.*, hal. 129.

F. Metode Penelitian²⁷

1. Obyek atau Fokus yang diteliti

Obyek dari penelitian ini terbatas pada kebijakan formulasi mengenai pidana penjara minimal khusus dalam peraturan perundangan pidana di luar KUHP yang mencantumkan pola lamanya pidana penjara minimum khusus dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang akan datang (Konsep KUHP) di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan istilah “kebijakan” dalam penelitian ini adalah sebagai pengganti dari istilah “*policy*” yang oleh Sutan Arby dan Wayan Ardhana diterjemahkan dengan istilah “kebijakan” sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Menurut Robert R. Meyer dan Ernest Greenwood, istilah “kebijakan” atau “*policy*” dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif untuk mencapai sesuatu yang ditetapkan secara kolektif.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan tinjauan terhadap kebijakan formulasi mengenai pidana penjara minimal khusus dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

²⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin. Yogyakarta, Edisi III, Cetakan VII, 1996, hal. 3. Menurut Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian membahas konsep teoretik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang dilakukan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

²⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit., hal. 59.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis/empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁹

Mengingat permasalahan dalam penelitian difokuskan pada kebijakan formulasi, khususnya yang menyangkut pidana penjara minimum khusus, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Pendekatan terhadap hukum dengan menggunakan metode normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara tertentu yang berdaulat. Penelitian terhadap hukum dengan pendekatan demikian merupakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum yang doktrinal.³⁰

Pendekatan yuridis historis dilakukan untuk melihat hukum pada masa-masa lalu, terutama pada perundang-undangan di luar KUHP yang mencantumkan pidana penjara minimum khusus.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Masalah-Masalah Hukum, UNDIP Nomor 9, Semarang, 1991, hal. 4.

Pendekatan yuridis komparatif diperlukan dalam melihat norma-norma yang menyangkut pidana penjara minimum khusus di beberapa negara. Hal ini berkaitan pula dengan usaha-usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya KUHP. Dalam hal ini, perbandingan hukum penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana uraian di atas, bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder³², maka jenis data penelitian ini meliputi data sekunder. Penggunaan data sekunder terutama kan disajikan pada data sekunder yang bersifat publik, baik yang berupa arsip maupun data resmi pada instansi-instansi pemerintah.³³

Sumber data dari data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain :³⁴
 - Norma dasar Pancasila
 - Peraturan dasar; Batang tubuh Undang Undang Dasar 1945.
 - Ketetapan-Ketetapan MPR

³¹ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 5.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 12.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. Cit., hal. 11.

- Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan beberapa undang-undang yang di dalamnya mencantumkan pidana penjara minimum khusus.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain :³⁵
 - Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Hasil-hasil karya ilmiah (makalah, tulisan di majalah hukum)
 - Hasil-hasil penelitian.
 - Pendapat-pendapat dari para ahli hukum pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian penyusunan persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk menilai, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah. .³⁶

³⁵ *Ibid*, hal..12.

³⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 65.

Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data lebih diutamakan diajukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori dokumen yang lebih dapat dipercaya daripada dokumen-dokumen lain.³⁷

6. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh disajikan secara kuantitatif, kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Artinya problem yang ada dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan yang ada, serta dilengkapi analisis historis dan komparatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

Sebelum membahas permasalahan, maka setelah Bab I ini akan diuraikan Tinjauan Pustaka pada **Bab II** yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini, yaitu mengenai :

³⁷ Sartono Kartodirjo, *Metode Penyusunan Bahan Dokumen*, dalam : *Metode Penelitian Masyarakat*, Koentjoroningrat, LIPI, Jakarta, 1973, hal, 65.

- Pidana dan pemidanaan. Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pidana, sistem pemidanaan, dan teori-teori pemidanaan.
- Latar belakang pokok pemikiran dianutnya pidana minimum khusus
- Kebijakan Hukum Pidana, yang di dalamnya akan diuraikan mengenai pengertian kebijakan hukum pidana dan kebijakan formulasi
- Topik terakhir dari Bab II akan membahas mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Selanjutnya, dalam **Bab III** akan diuraikan tentang Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai :

- Seberapajauhkah peraturan perundangan diluar KUHP mengatur tentang pidana minimum khusus.
- Kebijakan formulasi pidana minimum khusus dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Pada **Bab IV** yang merupakan Penutup, akan ditarik kesimpulan mengenai kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus yang ada selama ini, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian “Pidana”

Secara umum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”. Akan tetapi sebenarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, perbedaan antara kedua istilah tersebut perlu diperhatikan karena sering timbul kerancuan dalam penggunaannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX, pengertian ‘pidana’ adalah hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan / kriminal).³⁸

R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut “pidana” dan merumuskan bahwa hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.³⁹

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta 1997, hal 360.

³⁹ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 35.

Berbeda dengan pendapat di atas, Moelyatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*wordt gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”. Menurut Moelyatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴⁰

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto⁴¹, bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Selanjutnya juga dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau

⁴⁰ Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 40.

⁴¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op. Cit, hal. 72.

“penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.

Akhirnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.⁴²

Dalam kesempatan yang lain, Sudarto berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana.⁴³

Dalam sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.

⁴² Wirdjono Prodjodikoro, *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1976, hal. 1.

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987/1988, hal 9.

Walaupun demikian, kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya.

Dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seseorang juga mungkin dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana.

Misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, dapat dikenai hukuman berupa pemecatan dari status pegawai negeri. PNS yang bersangkutan tersebut dianggap melanggar hukum administrasi dan akhirnya dikenai sanksi administrasi yang mungkin jauh lebih berat daripada pidana yang dijatuhkan karena melanggar hukum pidana, apabila pidana tersebut berupa pidana denda atau pidana bersyarat yang berarti terpidana tidak akan merasakan kehidupan dalam tembok penjara pada umumnya.

Dengan demikian, pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri merupakan suatu bagian dari tata hukum. Disebabkan sifatnya yang mengandung sanksi istimewa sebagaimana disebutkan di atas, maka sering pula hukum pidana disebut sebagai hukum sanksi istimewa.⁴⁴

⁴⁴ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 20.

Berkaitan dengan siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak untuk memidana atau memegang *jus puniendi* itu. Tetapi yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah yang berhak untuk memidana.

Menurut Beysens, negara atau pemerintah berhak memidana karena :

- a. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.
- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴⁵

Dalam hal hakekat serta apa yang menjadi tujuan pembedaan itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai fungsi atau sifat yang *subsidiar*.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hal. 23.

⁴⁶ Sudarto *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hal. 30.

Menurut Leo Polak, apakah hakekat, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, merupakan problema yang tidak terpecahkan. Terhadap pendapat Leo Polak itu, Sudarto menegaskan bahwa sejarah dari hukum pidana pada hakekatnya merupakan sejarah pidana dan ppidanaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak untuk dikenai. Oleh karena itu, orang tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan pbenaran dari pidana itu sendiri.⁴⁷

Mengenai hakekat pidana, pada umumnya para penulis menyebutnya sebagai suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Pendapat ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pidana adalah "reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".⁴⁸

Hal senada juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana

⁴⁷ *Ibid*, hal. 31.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 5.

dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.⁴⁹

Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa "pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran."⁵⁰

Demikian pula Herbert L. Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan "*punishment*" dan "*treatment*".⁵¹

Perbedaan antara "*punishment*" (pidana) dan "*treatment*" (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari "*treatment*" adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan.⁵²

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 27.

⁵⁰ *Ibid*, hal.7.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 5.

⁵² *Ibid*.

Sedangkan “punishment” menurut H.L. Packer, pembedannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).⁵³

Dengan demikian, pada masalah pidana, titik beratnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk terjadinya “punishment”.⁵⁴

Selanjutnya ditegaskan oleh H.L. Packer, bahwa :

“Dalam hal “punishment”, kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya.

Sedangkan “treatment” tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar.”⁵⁵

Dengan demikian H.L. Packer juga menegaskan bahwa sepanjang perhatian kita ditujukan pada :

- a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu (*a person's future activity to something he has done in the past*);

⁵³ *Ibid*, hal. 6.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*.

- b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku (*the protection of other rather than the betterment of the person being dealt with*),

Maka perlakuan yang demikian disebut "*punishment*".⁵⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dengan melihat dasar orientasi dari dua tujuan di atas, maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam definisinya sebagai "*punishment*".

Dalam hal perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut :

"Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat."⁵⁷

Jadi secara dogmatis, menurut Sudarto, pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.⁵⁸

Akan tetapi tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakekat pidana adalah "menyerukan untuk tertib" (*tot de orde roepen*).⁵⁹

⁵⁶ *Ibid*, hal. 7.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 8.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op.Cit., hal. 81.

Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh G.P. Hoefnagels. Dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief⁶⁰ dikatakan bahwa Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

2. Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).⁶¹

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁶²

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

⁶¹ L.H.C. Hullsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative, di dalam D.C. Fokkema* (Ed.) Introduction To Dutch Law For Foreign Lawyers (Kluwer Deventer, The Netherlands 1978), hal. 32.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal 129.

Apabila dihubungkan dengan politik kriminal yang mempunyai arti sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan,⁶³ maka sistem pidana yang dimaksud merupakan bagian dari politik kriminal.

Sistem pidana secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

1) Pidana pokok berupa :

- Pidana mati ;
- Pidana penjara ;
- Pidana kurungan ;
- Pidana denda ;
- Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan berupa :

- Pencabutan beberapa hak tertentu ;
- Perampasan barang-barang tertentu ;
- Pengumuman putusan hakim.

⁶³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Loc.Cit.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.⁶⁴

Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan

⁶⁴ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983, hal. 20.

pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari.

Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi seperiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga". Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi "Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga".

Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, *recidive* serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.⁶⁵

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

⁶⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op.Cit. hal. 14.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi adanya disparitas pidana ini adalah dengan menggunakan sistem minimum khusus sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, di mana tujuan diadakannya sistem minimum khusus ini disamping untuk menghindari adanya disparitas pidana, juga untuk lebih memperkuat prevensi general.⁶⁶

Hukum pidana mengatur masyarakat pada umumnya dan juga penguasa atau penegak hukum. Untuk mewujudkan keseluruhan sistem pemidanaan secara nyata harus melalui aparat penegak hukum. Sebagai penyelenggara hukum pidana, aparat penegak hukum harus didukung oleh sarana dan prasarana, terutama dalam hal ini adalah peraturan yang berdaya guna dan berhasil guna terutama hukum pidana materiil.

Oleh karena itu, dalam Konsep telah dicantumkan mengenai tujuan pemberian pidana, pedoman pemberian pidana dan aturan pemberian pidana yang di dalam KUHP belum diatur.

Perumusan Pasal 50 yang mengatur tentang tujuan pemidanaan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 125.

- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pasal 50 tersebut di atas, memuat tujuan-tujuan pidana, yaitu tujuan pertama berupa perlindungan masyarakat, dan tujuan kedua yang mengarah pada resosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat, disamping untuk merehabilitasi.

Tujuan yang ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Adapun tujuan yang keempat bersifat spiritual yang dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 50 ayat (2) di atas memberikan makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia, karena meskipun pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu nestapa, namun pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana.

Adapun pedoman pidana dicantumkan dalam Pasal 51 Konsep. Perumusan dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :
- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana;
 - c. Cara melakukan tindak pidana;
 - d. Sikap batin si pembuat tindak pidana;
 - e. Riwayat hidup dan keadaan si pembuat tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan atau;
 - j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, karena memudahkan hakim dalam menetapkan ukuran pemidanaan. Jadi apa yang tercantum dalam pasal tersebut sebenarnya merupakan daftar yang harus diteliti lebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana.

Daftar tersebut memuat hal-hal yang menyangkut pembuat dan juga hal-hal yang diluar diri si pembuat. Apabila butir-butir di atas diperhatikan, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih proporsional dan dapat difahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana sendiri. Sedangkan penjumlahan butir-butir di atas tidak bersifat limitatif. Hakim dapat saja menambahkan pertimbangan pada hal-hal lain selain apa yang tercantum dalam pasal ini, namun apa yang dicantumkan dalam pasal di atas harus dipertimbangkan.

3. Teori-Teori Pemidanaan

Sehubungan dengan teori-teori pemidanaan, maka masalah pidana dan pemidanaan merupakan salah satu hal yang sangat dominan dalam hukum pidana dan hukum pidana tidak dapat lagi dianggap sebagai anak tiri dari ilmu hukum pidana, seperti apa yang dikatakan oleh Maurach, bahwa pada masa-masa lalu bahkan sampai saat ini selalu terdapat keragu-raguan tentang keberadaan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat.⁶⁷

Secara tradisional, teori-teori tentang pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari keduanya, yang dikenal dengan sebutan teori gabungan. Di bawah ini penjelasan dari masing-masing teori tersebut.

a. Teori Absolut

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.⁶⁸

⁶⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op.Cit., hal. 78.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 26.

Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.⁶⁹

Tuntutan keadilan yang absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*”. Kant menyatakan sebagai berikut :

“ pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”⁷⁰

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11.

⁷⁰ *Ibid.*

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*", yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Dengan demikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.⁷¹

Tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel⁷². Hegel mengeluarkan teori yang dikenal dengan *quashi-mathematic*, yaitu :

- *Wrong being (crime) is the negation of right; and*
- *Punishment is the negation of that negation.*

Dalam teori tersebut, Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum atau ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Nigel Walker menyatakan bahwa para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yakni :

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
2. Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula dibagi dalam :
 - a. Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b. Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori distributive, yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah,

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*, hal. 12.

tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.⁷³

Nigel Walker selanjutnya menjelaskan bahwa hanya golongan *the pure retributivist* saja yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut golongan *Punisher* (penganut teori pemidanaan). Sedangkan golongan *the limiting retributivist* dan golongan *retribution in distribution* tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Menurut Walker, kedua golongan terakhir ini lebih dekat dengan paham yang *non-retributive*. Selanjutnya menurut Nigel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan *the limiting retributivist*, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum yang telah ditentukan.⁷⁴

Adapun H.B. Vos membagi teori absolut atau teori pembalasan ini menjadi pembalasan subyektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan dan pembalasan obyektif yaitu pembalasan terhadap akibat yang diciptakan oleh pelaku terhadap dunia luar.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hal 13.

⁷⁵ H.B. Vos, *Leverboek van Nederlands Strafrecht, Haarlem*; H.D. Tjeenk, Willink, 1950, hal 27.

Selanjutnya John Kaplan, membedakan teori retribution ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Kedua teori tersebut adalah yaitu :

- a) Teori pembalasan (*the revenge theory*);
- b) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).⁷⁶

Dengan munculnya teori-teori pembalasan tersebut, timbul pula keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan yang mensyaratkan secara mutlak adanya pidana terhadap suatu kejahatan.

Andi Hamzah menyatakan adanya dua keberatan terhadap adanya teori pembalasan tersebut, yaitu :

- 1. Teori ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan negara harus menjatuhkan pidana.
- 2. Penjatuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan yang praktis.⁷⁷

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan tersebut, kemudian muncul teori lain yang bertentangan dengan teori pembalasan. Teori yang bertentangan dengan teori pembalasan tersebut dikenal dengan teori relatif.

⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

⁷⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 29.

b. Teori Relatif

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).⁷⁸

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*).⁷⁹

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 17.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 16.

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

Van Hammel menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah memmpertahankan tata cara tertib hukum.⁸⁰

Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johanes Andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau *general prevention*, yaitu :

1. Pengaruh pencegahan;
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
3. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁸¹

⁸⁰ G.A. Van Hammel, *Inleiding tot de Studie van Het Ned Strafrecht*, Harlem : De Erven F. Bohri, 1929, hal. 29,.

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 18.

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, Selain prevensi spesial dan prevensi general, ada satu hal lagi yang juga termasuk dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai "daya untuk mengamankan". Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.⁸²

c. Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan.

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.⁸³

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan :

"Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat."⁸⁴

⁸² *Ibid*, hal. 19.

⁸³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 31.

⁸⁴ *Ibid*. hal 32.

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.⁸⁵

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.⁸⁶

Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

B. Latar Belakang Pemikiran Dianutnya Pidana Penjara Minimum Khusus

Dari sekian banyak isu sosial yang mendesak dalam negara yang sedang membangun adalah masalah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial tersebut merupakan salah satu akibat yang harus diterima oleh masyarakat yang sedang membangun, masyarakat yang sedang mengalami transformasi ke arah masyarakat modern. Penyimpangan tersebut ada bilamana ada norma aturan yang menguasai perbuatan yang dianggap menyimpang tersebut.⁸⁷ Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana yang disebut sebagai kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang seringkali menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu tertentu, tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara. Apalagi dengan melihat bahwa kejahatan merupakan salah satu masalah sosial, karena pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya di dalam masyarakat menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan dari kejahatan tradisional meningkat menjadi kejahatan *inkonvensional* yang dapat menyentuh kepentingan umum, perekonomian umum, perekonomian negara, hak asasi manusia dan lain sebagainya.⁸⁸

⁸⁷ Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Univesitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 41.

⁸⁸ Petrus Soerjowito, *Kebijakan Legislatif Sebagai Kebijakan Strategi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Pranata, Universitas Soegijopranoto, Semarang, Edisi Agustus/November 1993, hal 29.

Beberapa kejahatan-kejahatan tersebut, karena sifatnya yang sangat tercela, maka ancaman hukumannya diperberat oleh pembentuk undang-undang, yaitu perilaku yang mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam masyarakat seperti penganiayaan, kejahatan terhadap jiwa, integritas jiwa dan raga maupun kebebasan manusia.⁸⁹

Menurut Muladi, dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait dalam penegakan hukum pidana, maka nampak adanya kecenderungan-kecenderungan internasional yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) minimum khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu.⁹⁰

Pengembangan pidana minimum khusus tersebut adalah dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.⁹¹

⁸⁹ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002, hal. 18.

⁹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal 154.

⁹¹ *Ibid*, hal. 155

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya yang dimilikinya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁹²

Berkaitan dengan disparitas dan pidana minimum khusus tersebut, Andi Hamzah⁹³ mengemukakan :

Berhubung karena bermacam-macamnya pidana dan tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP sering pula merupakan alternatif dalam satu pasal, di samping tidak adanya minimum khusus dalam tiap-tiap pidana yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Akibat dari ketentuan semacam ini kadang-kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misalnya 5 tahun penjara sedangkan yang lain 10 tahun penjara. Di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap pasal undang undang pidana.

⁹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 52. Selanjutnya dijelaskan oleh Muladi bahwa disparitas pidana ini akan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Disparitas pidana akan berakibat fatal apabila dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang telah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan pidana yang dikenakan kepada orang lain, akan merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan.

Pada perkembangannya narapidana tersebut akan menjadi orang yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pembedaan. Dari sini akan tampak persoalan yang berat, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

⁹³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 5-6.

Pada saat ini KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan suatu produk peninggalan Pemerintahan Belanda, yang meskipun telah banyak dilakukan perubahan di dalamnya, masih terasa kurang dapat memenuhi kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam negara Republik Indonesia yang sedang melakukan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Dalam merumuskan ancaman pidana, KUHP menganut sistem maksimal, oleh karena itu aturan/sistem pidana dalam KUHP berorientasi pada sistem maksimum dan tidak terdapat aturan atau sistem pidana yang menerapkan sistem minimum khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Panitia Rancangan KUHP Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia telah membuat rancangan (Konsep) KUHP baru, yang diantaranya membahas masalah sistem minimum khusus.

Sejalan dengan uraian di atas, maka dianutnya sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP didasarkan pada pokok pemikiran :

1. Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
2. Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
3. Dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.⁹⁴

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit., hal 125.

Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pemidanaan yaitu mencegah atau pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran kedua dianutnya pidana minimum khusus (*prevensi general*) dalam Konsep sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muladi bahwa pencegahan umum terhadap pelaku tindak pidana mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah melakukan kejahatan.⁹⁵

Pada Konsep KUHP Nasional 2000, ketentuan tentang minimum khusus untuk pidana penjara dapat dilihat dalam Buku I Pasal 64 ayat (2), yang perumusannya adalah sebagai berikut :

“Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari kecuali ditentukan minimum khusus.”

Barda Nawawi Arief⁹⁶ menyatakan bahwa :

“Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) : sebagai ukuran kuantitatif, dapat digunakan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun sajalah yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat berat”. Patokan ini dalam hal-hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (penjara 4 sampai 7 tahun). Sedangkan mengenai lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat hakekat dan kualitas atau bobot delik yang bersangkutan.”

⁹⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal 81-83.

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hal 128

Oleh karena itu, batas maksimum pidana penjara terendah yang dapat dikenai pidana minimum khusus adalah selama 4 (empat) tahun.

Pada perkembangan selanjutnya (Rapat Tim Pengkajian bulan April 1989), terjadi perubahan pola minimum khusus yang berkisar antara 1 (satu) – 7 (tujuh) tahun, dengan penyebaran sebagai berikut⁹⁷ :

No.	GOLONGAN	ANCAMAN MAKSIMUM	ANCAMAN MINIMUM
1.	"Berat"	4 th - 7 th 7 th - 10 th	1 – 2 th 2 – 3 th
2.	"Sangat Berat"	12 th - 15 th Mati / SH / 20 th	4 – 5 th 6 – 7 th

Dengan demikian, delik-delik yang diancam dengan minimum khusus adalah delik-delik yang tergolong "berat" dan "sangat berat" dengan maksimum pidana penjara paling rendah selama 4 (empat) tahun.

Pola minimum khusus ini berubah pada perkembangan terakhir, yaitu berkisar antara 1 (satu) - (lima) tahun dengan kategori sebagai berikut⁹⁸:

No.	Kategori Delik	ANCAMAN MAKSIMUM	ANCAMAN MINIMUM
1.	"Berat"	4 th - 7 th	1 tahun
2.	"Sangat Serius"	7 th - 10 th 12 th - 15 th Mati / Seumur Hidup	2 tahun 3 tahun 5 tahun

⁹⁷ *Ibid*, hal. 129

⁹⁸ *Ibid*, hal. 160.

Dengan demikian, terjadi perubahan dari ancaman minimum tertinggi, yang sebelumnya adalah 7 tahun, menjadi 5 tahun. Di samping itu pola ancaman minimum pidana tidak terbagi atas rentang pidana penjara, melainkan dibuat dalam dalam lamanya pidana yang mutlak, yaitu 1, 2, 3 atau 5 tahun.

Menurut Barda Nawawi Arief⁹⁹ penentuan minimum khusus pada perkembangan terakhir tersebut didasarkan atau dibedakan menurut ancaman maksimum khusus untuk delik yang bersangkutan. Akan tetapi ini hanya sekedar patokan objektif atau patokan formal, karena tidak setiap delik yang termasuk dalam kategori seperti di atas, harus diberi minimum khusus. Dalam menetapkan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain : menimbulkan bahaya kerusakan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati) atau faktor pengulangan pidana (*recidive*). Pada umumnya delik-delik yang "sangat serius" sajalah yang diberi ancaman minimum khusus.

Pola pidana minimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 (satu) tahun tersebut didasarkan pada pokok-pokok pemikiran sebagai berikut¹⁰⁰ :

- a. Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang dipandang cukup berat dan riskan. Oleh karena itu ada kecenderungan internasional untuk menempuh kebijakan yang selektif dan limitative dalam

⁹⁹ *Ibid*, hal. 160-161

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 124-125

penggunaan pidana penjara. Pidana penjara hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai cukup berat dan untuk orang-orang tertentu yang dipandang memang perlu untuk mendapat pembinaan lewat pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

- b. Bertolak dari pemikiran di atas, maka untuk memberi kesan atau gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang cukup berat dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembinaan/pemasyarakatan, maka digunakan ukuran waktu satu tahun. Oleh karena itu terhadap delik yang bobotnya dinilai kurang dari 1 (satu) tahun dipandang sebagai delik yang "sangat ringan" dan dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara.
- c. Apabila terhadap delik yang dipandang sangat ringan itu juga diancam dengan pidana yang ringan (dalam beberapa bulan atau minggu saja), maka hal ini akan memberi peluang dijatuhkannya pidana penjara pendek. Kecenderungan internasional (antara lain terlihat dari hasil-hasil rekomendasi Kongres-kongres PBB mengenai The Prevention and The Treatment of Offenders) menghendaki dibatasinya kemungkinan penjatuhan pidana penjara pendek, kaena di samping akan membawa akan membawa efek-efek negatif juga dipandang kurang menunjang sistem pembinaan pemasyarakatan serta dapat mengganggu sistem Standard Minimum Rules (SMR). Dengan diterapkannya batas minimum 1 (satu) tahun memang tidak berarti hapusnya sama sekali pidana penjara pendek, namun setidaknya diharapkan dapat mengurangi jatuhnya pidana penjara pendek, namun setidaknya diharapkan dapat mengurangi dijatuhkannya pidana yang terlalu pendek apabila ancaman maksimumnya terlalu ringan. Tetap diberikannya kemungkinan untuk menjatuhkan pidana pendek, karena dalam hal-hal tertentu pidana pendek itu memang masih diperlukan.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dilihat bahwa latar belakang pidana penjara minimum khusus adalah disamping untuk menghindari disparitas pidana, juga untuk meningkatkan prevensi general terhadap delik-delik tertentu yang dianggap sangat serius bagi kehidupan masyarakat dengan sedapat mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara jangka pendek yang dapat memberikan efek negatif terhadap pelaku tindak pidana.

C. Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai hubungan antara kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.¹⁰¹

Selanjutnya, dalam hal hukum pidana sebagai upaya mengatasi masalah sosial (kejahatan), Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat :

“Penggunaan hukum pidana sebagai satu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakkan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).”¹⁰²

Dengan demikian, perkembangan kejahatan yang ada dalam suatu masyarakat mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dengan kebijakan hukum pidana.

Berkaitan dengan pengertian kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Jusctice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 39.

¹⁰² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.*, hal. 29.

kepastakaan asing, istilah "politik hukum pidana" ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah "penal policy", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".¹⁰³

Adapun menurut Sudarto, yang disebut dengan "politik hukum" adalah

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁰⁴
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.¹⁰⁵

Bertolak dari kedua pengertian mengenai politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.¹⁰⁶ Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana yang disebut sebagai kejahatan.

Beberapa tokoh lain hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda mengenai politik hukum pidana, seperti Mark Ancel, Mulder dan Hoefnagels.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 24.

¹⁰⁴ Sudarto *Hukum dan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 159.

¹⁰⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op. Cit, hal 20.

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 25.

Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* sebagai :

"Suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sehingga dengan demikian istilah *penal policy* adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".¹⁰⁷

Adapun Mulder berpendapat bahwa *Strafrechtspolitik* adalah :

Garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁰⁸

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.¹⁰⁹

Marc Ancel merumuskan politik kriminal sebagai :

"*Rational organization of the control of crime by society atau the rational organization of the social of crime.*"¹¹⁰

Sedangkan G.P. Hoefnagels menyatakan politik criminal sebagai :

"*The science of responses, the science of crimes prevention, a policy, of designating human behavior as crime dan a rational total of the respons to crime.*"¹¹¹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ A. Mulder, *Strafrechtspolitik, Delikt en Delikwet*, Mei 1980, hal 303.

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit., hal 26.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 1.

¹¹¹ *Ibid.*

Oleh karena itu, menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penganggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹¹²

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan :

"Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum pidana) pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Maka, apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari integral dari kebijakan atau politik social (*social policy*), secara logis dapat dikatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana merupakan segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, didalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup pula pengertian "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".¹¹³

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri.

¹¹² *Ibid*, hal. 27.

¹¹³ *Ibid*.

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Penal Policy atau *penal law enforcement policy* yang merupakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan administratif).¹¹⁴

Berkaitan dengan operasionalisasi dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu, maka dibutuhkan kewenangan untuk menjalankan masing-masing tahap kebijakan tersebut, yaitu kewenangan membuat undang-undang, kewenangan menerapkan undang-undang dan melaksanakan undang-undang.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief :

Dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.¹¹⁵

Kebijakan penegakan hukum pidana memerlukan sinergi dari ketiga tahap kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan apabila salah satu dari ketiga tahap tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka penegakan hukum pidana tentu akan menjadi tidak optimal.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, UNDIP, Semarang, 2000, hal. 74.

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 30.

Dari ketiga tahap kebijakan tersebut, Tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, disebabkan apabila terjadi kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif, maka upaya penanggulangan kejahatan pada tahap selanjutnya (aplikasi dan eksekusi) akan menjadi terhambat. Hal ini disebabkan semua langkah pada tahap selanjutnya bersumber pada tahap formulasi sebagai tahap awal dari penegakan hukum pidana.

Dalam tahap formulasi, upaya penegakan hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penerap hukum, akan tetapi justru lebih berat kepada aparat pembuat hukum. Hal ini dapat dimengerti karena dalam tahap formulasi ini dilakukan perumusan dan penetapan hukum.

Hal tersebut senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang mengemukakan dalam tahap kebijakan legislatif (formulatif) inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem kebijakan sistem pidana dan ppidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.¹¹⁶

Selanjutnya, Oka Mahendra¹¹⁷ berpendapat :

Memberdayakan program legislasi nasional sebagai pengintegrasikan penyusunan peraturan perundang-undangan memang bukan sekedar menyangkut adanya program yang tersusun secara sistematis, terinci dan bersifat operasional, tetapi lebih dari itu menyangkut kemauan politik bersama untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Op. Cit., hal. 3.

¹¹⁷ Oka Mahendra, *Memberdayakan Program Legislasi Nasional Sebagai Dokumen Pengintegrasian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Majalah Hukum Nasional No. 1, 1999, BPHN, Departemen Kehakiman, hal. 140.

kepentingan sektoral dan keamanan politik bersama membangun sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya Marc Ancel menyatakan bahwa *Penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹⁸

Dalam bukunya, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Marc Ancel menyatakan bahwa :

“ Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang menganmati dan menyelidiki fenomena legislative dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistic, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat. “¹¹⁹

Berdasarkan pemikiran di atas, dihubungkan dengan tujuan dan makna dari penelitian ini, maka diwujudkannya sanksi minimum khusus dalam formulasi kebijakan hukum pidana adalah untuk menghasilkan kebijakan pemidanaan yang sifatnya realistis, humanis dan berpikiran maju, serta sehat.

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit., hal. 21.

¹¹⁹ *Ibid.*

Selain berdasarkan pendapat Marc Ancel di atas, pemikiran ini juga tidak dapat dilepaskan dari ide bahwa peraturan positif yang akan datang (*ius constitutum*) terutama peraturan mengenai pemidanaan yang ada dapat dirumuskan secara lebih baik sesuai dengan tujuan utama dari pemidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan.

D. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Barda Nawawi Arief¹²⁰ mengemukakan bahwa dalam pembaharuan hukum, hukum pidana merupakan bidang yang menarik dibandingkan dengan hukum lain. Hal ini disebabkan hukum pidana mengandung sifat yang *kontradiktif* atau *paradoks*, yaitu di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan atau benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum / HAM seseorang dengan mengenakan sanksi kepada si pelanggar norma.

Pembaharuan hukum pidana tersebut meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam melaksanakan pembaharuan hukum pidana, ketiga bidang hukum pidana itu harus secara bersama-sama diperbaharui, karena apabila hanya salah satu bidang saja yang diperbaharui, akan menimbulkan kepincangan atau kesulitan dalam pelaksanaannya.

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Tindak Kekerasan Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bahan Diskusi Panel RUU Kepolisian, 15 Juli 1997, Fakultas Hukum Undip, hal. 1.

Di samping itu, tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana, yaitu penanggulangan kejahatan, tidak akan dapat tercapai sepenuhnya. Dalam hal ini, penulis hanya akan membahas pembaharuan di bidang hukum materiil (substentif) saja.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.¹²¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam suatu sejarah perjalanan bangsa, maka setiap diadakannya pembaharuan hukum pidana, tentu dilatarbelakangi oleh beberapa aspek yang urgen dengan diadakannya pembaharuan hukum pidana dari bangsa itu sendiri.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan menggantinya dengan yang lebih baik.¹²²

Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief¹²³ bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai.

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 29.

¹²² Gustav Radbruch dalam Sudarto *"Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia"*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro, Semarang 21 Desember, 1974, hal. 5.

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 28.

Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka :

- Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial.
- Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
- Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui sistem hukum.

Dilihat dari sudut pendekatan nilai pembaharuan hukum pidana mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa :

Pembaharuan Hukum Pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial)). Didalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan nilai.¹²⁴

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1994.

Pemikiran Barda Nawawi Arief tersebut dilatarbelakangi oleh pendapat Roeslan Saleh yang mengemukakan :

Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja, juga syarat rasional adalah suatu syarat moral (Wilkins, Moris dan Howard). Oleh sebab itu rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah dapat diambil keputusan-keputusan yang rasional itu.¹²⁵

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia seyogyanya memperhatikan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai ini. Hal ini penting demi tercapainya suatu hukum pidana yang dapat mengatasi masalah sosial, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bukan merupakan hukum yang tidak pernah beranjak dari jaman penjajahan.

Menurut AZ Abidin, bahwa hukum pidana itu merupakan cermin suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bilamana nilai-nilai itu berubah, hukum pidana juga berubah. Hukum pidana secara tepat sebagai *one of the most faithfull mirror of a given civilization, reflecting the fundamental values on which latter rest*.¹²⁶

Dalam hal ini, usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Guna menghindari kekosongan hukum, Undang Undang Dasar 1945 memuat Aturan Peralihan, yang dalam Pasal II dinyatakan bahwa :

¹²⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 44.

¹²⁶ A.Z., Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 12-13.

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini".

Pada bidang hukum pidana materiil, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* masih tetap berlaku dan diterapkan selama masa pendudukan itu. Hal ini berarti pada kurun waktu itu tidak pernah ada suatu produk legislatif yang menyatakan WvS atau beberapa pasal dari WvS tersebut menjadi tidak berlaku. Hanya pada tahun 1944, Pemerintah Bala Tentara Jepang mengeluarkan apa yang disebut *Gunsei Keizirei* yang merupakan suatu peraturan serupa dengan KUHP, yang harus diterapkan oleh pengadilan-pengadilan pada waktu itu. Dengan sendirinya, apabila suatu perbuatan termasuk dalam rumusan atau kualifikasi delik WvS dan juga dalam *Gunsei Keizirei*. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkan undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tanggal 26 Pebruari 1946. Sejak saat inilah dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana Indonesia dimulai.¹²⁷

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Loebby Loqman, bahwa upaya untuk melakukan pembaharuan pidana yang sesungguhnya dapat dikatakan baru dimulai dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946, karena di dalamnya memberi kekuatan untuk menyesuaikan materi KUHP.¹²⁸

¹²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op.Cit., hal. 60-61.

¹²⁸ Loebby Loqman, *Delik Poltik di Indonesia*, In-Hill-Co, Jakarta, 1993, hal. 28.

Menurut Soeharjo SS, usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari "*Jus Constitutum*" yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*Jus Constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang.¹²⁹

Apabila kita meninjau pada alasan mengapa diperlukan pembaharuan hukum pidana, Sudarto mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana dilandaskan pada 3 (tiga) alasan, yaitu :

1. Alasan Politik : Indonesia yang telah lima puluh tahun merdeka adalah wajar mempunyai hukum pidana sendiri, yang diciptakannya sendiri, oleh karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan.
2. Alasan Sosiologi : Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa, dimana hukum itu berkembang. Artinya bahwa segala nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana.
3. Alasan Praktis : Dengan pembaharuan hukum pidana yang baru, akan dapat memenuhi kebutuhan praktik, sebab hukum peninggalan penjajah jelas masih menggunakan bahasa belanda. Padahal kita sebagai negara yang merdeka sudah memiliki bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu aturan hukum berdasarkan pada teks yang tidak asli.¹³⁰

¹²⁹ Soehardjo SS, *Politik Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 66.

¹³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op.Cit., hal. 66 – 68.

Sehubungan dengan kenyataan, bahwa teks resmi dari KUHP masih berbahasa Belanda, maka sebenarnya orang harus mengerti bahasa Belanda apabila hendak menerapkannya secara tepat. Hal ini tentunya tidak mungkin diharapkan dari bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasional sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dipandang dari sudut demikian, KUHP yang sekarang seharusnya diganti dengan KUHP nasional.

Jimly Asshidiqie¹³¹ menyatakan bahwa perumusan ketentuan dalam KUHP baru seyogyannya merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri atau paling tidak merupakan perumusan yang dekat dengan kesadaran masyarakat hukum Indonesia. Artinya perumusan ketentuan hukum baru itu jangan sampai semata-mata merupakan produk kesadaran hukum barat sebagaimana tampil dalam kenyataan KUHP yang merupakan warisan penjajahan Belanda di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Teuku Mohammad Radie mengemukakan bahwa hukum nasional yang hendak kita ciptakan sebagai kerangka landasan kehidupan bangsa kita dengan sendirinya disamping harus didasarkan atas pandangan hidup bangsa, Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945, harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan jaman.¹³²

¹³¹ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1997, hal 3.

¹³² Teuku Muhammad Radie, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Dalam Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal. 203.

Senada dengan pendapat di atas, Baharudin Lopa mengemukakan bahwa pembangunan hukum nasional ialah membangun tata hukum Indonesia yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Hukum nasional kita dengan sendirinya akan memiliki corak khas Indonesia sebagai salah satu aspek dari kebudayaan Indonesia.¹³³

Koento Wibisono berpendapat bahwa Pancasila sebagai salah satu unsur *staats fundamental norm* kita, dengan sendirinya juga merupakan komitmen filsafati yang menjajikan persatuan sikap dan pandangan kita, kesatuan upaya kita dalam menyongsong hari depan yang dicita-citakan bersama melalui pembangunan di segala bidang, juga di bidang hukum nasional.¹³⁴

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat yang senada dengan hal di atas, yaitu sehubungan dengan penerimaan Pancasila sebagai norma dasar bagi tata hukum Indonesia, maka tidak jarang orang akan mengatakan bahwa Pancasila itulah yang menentukan mana yang bisa diterima oleh tata hukum Indonesia.¹³⁵

¹³³ Baharudin Lopa, *Etika Pembangunan Hukum Nasional Dalam Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal. 17.

¹³⁴ Koento Wibisono, *Etika Pembangunan Hukum Nasional Dalam Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal. 6.

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 124.

Selanjutnya, Muladi berpendapat bahwa salah satu karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa datang adalah hukum pidana nasional tersebut dibentuk tidak hanya sekedar atas alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, melainkan secara sadar harus disusun dalam rangka kerangka Ideologi Nasional Pancasila.¹³⁶

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana di Indonesia sebagai salah satu upaya pembangunan hukum nasional harus memperhatikan Pancasila sebagai salah satu norma dasar dan kepribadian dari bangsa Indonesia.

Dalam pembaharuan KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana materiil, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Secara parsial, yaitu mengadakan beberapa perubahan pada bagian-bagian tertentu dari KUHP. Cara ini disebut juga cara "tambal sulam".
- b. Secara *total*, yaitu pembaharuan secara keseluruhan terhadap KUHP sehingga muncul KUHP baru.

Selama ini pembaharuan hukum pidana di Indonesia baru dilakukan dengan cara parsial. Sebagai perwujudan pembaharuan hukum pidana secara parsial, telah muncul beberapa kebijakan legislatif atau produk perundang-undangan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah selama ini, ialah :

¹³⁶ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, tanggal 24 Februari 1990, hal. 3.

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya semua peraturan hukum pidana pokok.
- b. Undang undang Nomor 20 tahun 1946, yang menambah jenis pidana pokok yang ada dalam Pasal 10 e KUHP dan Pasal 6 a KUHP tentang KUHP Militer dengan satu pidana pokok yang baru, yaitu pidana tutupan.
- c. Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 di seluruh Indonesia.
- d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP, yang menaikkan ancaman pidana maksimum 5 tahun atau 1 tahun kurungan terhadap 3 delik culpa (kealpaan), yang diatur dalam Pasal 188, Pasal 359 dan Pasal 360.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Perubahan dalam KUHP, yaitu tentang akibat kerugian dalam Pasal 364, Pasal 379 dan Pasal 407 yang semula 25 gulden diubah menjadi Rp. 250,-
- f. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Pidana Denda, dimana dalam UU pidana sebelum tanggal 17 Agustus 1945, semuanya ditingkatkan sebesar 15 kali lipat jumlah pidana yang lama.
- g. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan penodaan agama.
- h. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian.

- i. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan berkaitan dengan Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana atau Pra Sarana Penerbangan.
- j. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mencabut Pasal 45, 46, 47 KUHP.
- k. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penambahan Pasal 107 a-g KUHP tentang keamanan negara.

Adapun usaha pembaharuan KUHP secara total, yaitu dengan mewujudkan KUHP Nasional yang baru mulai terlihat dengan adanya rekomendasi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Atas seruan tersebut pada tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama. Konsep pertama tersebut diajukan oleh Departemen Kehakiman dengan judul Rancangan Undang Undang tentang "Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Pidana Indonesia".¹³⁷

¹³⁷ Moeljatno, *Atas Dasar atau Asas-Asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun?*, Prasaran pada Kongres Persahi II Surabaya, 15 –19 Juli 1964, hal. 2-3,

Upaya pembaharuan selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya Konsep Rancangan Buku I KUHP oleh LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) pada tahun 1968, yang kemudian diperbaiki oleh komisi yang bernama "Tim Peninjau Kembali Rancangan KUHP Buku I" berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 17 April 1972. Peninjauan kembali yang oleh tim ini berhasil diselesaikan dalam waktu satu tahun, sehingga Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I tersebut dapat diwujudkan pada tahun 1972 itu juga. Oleh karena itu, konsep tersebut dikenal dengan "Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1971/1972".¹³⁸

Konsep Rancangan 1971/1972 tersebut direvisi lagi menjadi Konsep Rancangan yang dikeluarkan secara stensilan oleh LPHN pada tahun 1975. Konsep ini selanjutnya direvisi lagi oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang sebelumnya bernama LPHN tersebut pada tahun 1982. Konsep ini dikenal dengan sebutan Konsep 1982/1983, yang kemudian mengalami beberapa perubahan lagi sehingga menjadi Konsep 1987/1988.

Perubahan berikutnya dilakukan lagi terhadap Konsep 1987/1988 sehingga terbit Konsep 1991/1992 yang belum final dan terus-menerus masih dilakukan pengkajian sehingga terbit Konsep terakhir, yaitu Konsep KUHP 1999/2000, yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

¹³⁸ Stensilan LPHN 1975, Dokumen Perpustakaan Babinkumnas, Jakarta, dalam Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1997, hal. 3.

Namun hingga sekarang belum ada pembahasan oleh DPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia mengenai Konsep tersebut sehingga pembaharuan hukum pidana belum dapat dilakukan secara total, dan bangsa Indonesia sampai saat ini belum dapat dikatakan mempunyai KUHP sebagai hasil karya bangsa sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Kebijakan mencantumkan ancaman pidana minimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP merupakan penyimpangan dari sistem dalam KUHP. Dalam merumuskan ancaman pidana, KUHP menganut sistem maksimal, oleh karena itu aturan/sistem pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem maksimum dan tidak terdapat aturan atau sistem pemidanaan yang menerapkan sistem minimum khusus. Dengan dianutnya sistem minimum khusus yang menyimpang dari KUHP, maka seharusnya undang-undang khusus di luar KUHP membuat aturan khusus/tersendiri untuk penerapannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 103 KUHP, karena KUHP sendiri belum mengenal masalah pidana minimum khusus ini.

Sistem ancaman pidana minimum khusus mulai tampak dalam perundangan di Indonesia seiring dengan munculnya beberapa peraturan perundangan di luar KUHP yang di dalamnya mencantumkan pidana minimum khusus ini. Undang-undang yang pertama kali mencantumkan pidana minimum khusus ini adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada tahun yang sama diterbitkan juga Undang

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang di dalamnya juga mencantumkan pidana minimum khusus.

Kemudian, pada setiap undang-undang yang diterbitkan setelah tahun 1997 sampai sekarang, sudah beberapa diantaranya mencantumkan pidana minimum khusus di dalam setiap undang-undang tersebut. Pada bagian selanjutnya dari bab ini, akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap beberapa undang-undang yang mencantumkan pidana minimum khusus di dalamnya. Penulis akan mengambil contoh 8 (delapan) peraturan perundang-undangan yang terbit sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003. Dengan demikian dapat dilihat tentang perkembangan dari sistem pidana minimum khusus, khususnya untuk pidana penjara, sejak mulai dicantumkannya pada tahun 1997 sampai tahun terakhir (tahun 2003).

Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencantumkan pidana penjara minimum khusus yang diambil sebagai contoh sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 tersebut adalah :

1. Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
6. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang Undang
8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III ini hanya difokuskan terhadap sistem minimum khusus terhadap penjara. Hal ini sebagaimana topik dari tesis ini, bahwa pidana minimum khusus dalam tesis ini adalah minimum khusus terhadap pidana penjara.

Kemudian pembahasan dalam sub bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan Undang Undang di luar KUHP yang mencantumkan pidana penjara minimum khusus mengenai :

1. Pola lamanya pidana penjara minimum khusus yang berkaitan dengan jumlah atau lamanya ancaman pidana penjara di dalam Undang Undang yang bersangkutan;
2. Aturan penerapan terhadap pidana penjara minimum khusus di dalam Undang Undang yang bersangkutan

Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan terhadap undang-undang di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus tersebut akan dipaparkan di bawah ini.

1. Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Perundang-undangan di Luar KUHP

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “pola” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pola pemidanaan adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi hukum pidana.¹³⁹

Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman penyusunan undang-undang atau “pedoman legislatif”.¹⁴⁰

Dengan demikian, seharusnya pola pemidanaan ini harus ada terlebih dahulu sebelum suatu perundang-undangan disusun, sehingga sebenarnya kurang tepat apabila dipergunakan istilah “pola lamanya pidana minimum khusus dalam perundang undangan di Indonesia”. Akan tetapi karena salah satu pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hal 153

¹⁴⁰ *Ibid.*

kebijakan formulasi mengenai pola lamanya pidana penjara minimum khusus pada perundang-undangan di masa yang akan datang, maka penulis menggunakan istilah pola lamanya pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di Indonesia (dan dalam KUHP asing) sebagai salah satu acuan untuk menentukan formulasi pola lamanya pidana minimum khusus dalam perundang-undangan Indonesia di masa yang akan datang.¹⁴¹

Oleh karena itu untuk dapat menyusun suatu kebijakan formulasi perundang-undangan yang berisi sanksi pidana terlebih dahulu harus dirumuskan mengenai pola pemidanaan ini. Hal ini tentunya juga berlaku untuk menentukan kebijakan formulasi perundang-undangan yang mencantumkan sanksi/pidana minimum khusus di dalamnya.

Berkaitan dengan pola pemidanaan tersebut, maka dalam tesis ini yang akan dibahas hanyalah pola lamanya minimum khusus untuk pidana penjara. Sebagai catatan, analisa penulis terhadap pola minimum khusus yang berkaitan dengan jumlah atau lamanya ancaman pidana di dalam Undang Undang yang bersangkutan, hanya berdasarkan atas jumlah atau lamanya ancaman minimum pidana penjara dibandingkan dengan maksimum ancamannya.

¹⁴¹ Uraian dalam alinea ini disusun dengan berdasarkan penjelasan dari Barda Nawawi Arief mengenai penggunaan istilah "pola pemidanaan dalam KUHP" dalam Buku "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", *Op. Cit*, hal. 154.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pola lamanya pidana penjara minimum khusus ini tidak berdasarkan atas bobot atau kualifikasi delik yang bersangkutan. Hal tersebut disebabkan untuk menentukan suatu bobot atau kualitas delik diperlukan suatu penelitian sosiologis yang mendalam. Hal tersebut tidak termasuk dalam pembahasan tesis ini.

a. Undang Undang Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (narkoba) yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Usaha penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan hukum pidana di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1927 dengan dikeluarkannya Ordonantie tentang Obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536). Ordonantie ini kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang berlaku sejak tanggal 26 Juli 1976. Selanjutnya, Undang Undang Narkotika ini diganti dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Seiring dengan itu, pada tahun yang sama terbit pula Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang bertujuan untuk menanggulangi bahaya dan penyalahgunaan obat-obatan berbahaya/psikotropika. Kedua undang-undang narkoba yang terbit pada tahun 1997 mencantumkan pidana minimum khusus di dalamnya. Hal tersebut berbeda dengan undang-undang narkoba

sebelumnya yang tidak mencantumkan pidana minimum khusus di dalamnya.

Pada UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya 1 pasal yang mengatur tentang pidana minimum khusus yaitu dalam Pasal 59 ayat (1). Pada pasal ini dicantumkan minimum pidana untuk penjara adalah 4 tahun dan maksimumnya adalah 15 tahun.

Sedangkan pada UU Narkotika terdapat 5 pasal yang mengatur tentang pidana minimum khusus, yang beratnya bervariasi antara 2 sampai 5 tahun untuk pidana penjara. Adapun perincian dari pidana penjara minimum khusus dalam pasal-pasal di dalam UU Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 1
Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus
dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

No.	Pasal	Maksimum Penjara (tahun)	Minimum Penjara (tahun)
1	78 ayat (2)	12	2
2	78 ayat (3)	15	3
3	80 ayat (2) huruf a	20	4
4	80 ayat (3) huruf a	20	5
5	81 ayat (2) huruf a	18	2
6	81 ayat (3) huruf a	20	4
7	82 ayat (2) huruf a	20	4
8	82 ayat (3) huruf a	20	5
9	87	20	5

Sumber Data : UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Menurut penulis terdapat kejanggalan pada pola lamanya pidana minimum khusus untuk pidana penjara dalam UU Narkotika ini. Hal ini terlihat apabila diadakan perbandingan antara 3 pasal, yaitu Pasal 78 ayat (2), Pasal 78 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (2) huruf a.

Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) huruf a mencantumkan pidana penjara minimum khusus selama 2 tahun, akan tetapi pada Pasal 78 ayat (2) ancaman maksimumnya adalah 12 tahun, sedangkan pada Pasal 81 ayat (2) huruf a ancaman maksimumnya adalah 18 tahun. Dengan demikian pidana penjara minimum khusus selama 2 tahun diancamkan pada delik yang mempunyai maksimum pidana antara 12 sampai dengan 15 tahun.

Akan tetapi dalam UU Narkotika ini terdapat pasal yang mencantumkan pidana penjara minimum 3 tahun (lebih tinggi daripada Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) huruf a, ancaman maksimumnya justru lebih tinggi daripada Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) huruf a yaitu 15 tahun. Ancaman maksimum pidana penjara selama 15 tahun ini terdapat pada Pasal 78 ayat (3).

Untuk lebih jelasnya, kejanggalan tersebut disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

TABEL 2
Kejanggalaan Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam UU Narkotika

No	Pasal	Maksimum Penjara (tahun)	Minimum Penjara (tahun)
1	78 ayat (2)	12	2
2	81 ayat (2) huruf a	18	2
3	78 ayat (3)	15	3

Data diolah dari Tabel 1 : Perincian Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Menurut penulis, ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a seharusnya tidak 2 tahun, akan tetapi 3 tahun, sehingga terdapat pola pidana minimum khusus yang seragam berdasarkan pidana maksimumnya, yaitu untuk delik yang diancam dengan pidana minimum khusus selama 2 tahun, maka ancaman maksimum pidananya adalah antara 12 sampai 15 tahun dan terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana 15-10 tahun, maka minimum pidananya adalah 3 tahun.

Dengan adanya kejanggalaan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika belum terdapat pola yang seragam tentang lamanya pidana penjara minimum khusus.

b. Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengalami Perubahan Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998

Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah terjadi beberapa perubahan yang mengatur tentang masalah perbankan di Indonesia. Hal yang menarik adalah adanya penambahan pidana minimum khusus dalam beberapa pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak dicantumkan sama sekali mengenai pidana minimum khusus, dan hanya diatur sistem maksimum khusus untuk tiap-tiap delik. Selanjutnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dirubah, sehingga dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan yang baru), dalam pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana tersebut ditambah maksimum pidananya dengan disertai ancaman pidana minimum.

Adapun pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengalami Perubahan Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mencantumkan pidana minimum khusus akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 3

**Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus
dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
yang mengalami Perubahan Berdasarkan
UU Nomor 10 Tahun 1998**

No.	Pasal	Maksimum Penjara (tahun)	Minimum Penjara (tahun)
1	46	15	5
2	47 ayat (1)	4	2
3	47 ayat (2)	4	2
4	47 A	7	2
5	48 ayat (1)	10	2
6	49 ayat (1) huruf c	15	5
7	49 ayat (2) huruf	8	3
8	50	8	3
9	50A	15	7

Sumber data : Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengalami Perubahan Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998

Penulis juga menemukan kejanggalan pada pola lamanya pidana penjara minimum khusus dalam UU ini. Kejanggalan tersebut terletak pada Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) huruf d dan Pasal 50. Pada Pasal 49 ayat (2) huruf d dan Pasal 50 mencantumkan ancaman pidana penjara yang sama, yaitu minimum 3 tahun dan maksimum 8 tahun. Padahal dalam Pasal 48 ayat (1) yang ancaman pidana penjara minimumnya lebih rendah yaitu 2 tahun, justru diberi ancaman pidana penjara yang lebih tinggi, yaitu 10 tahun.

TABEL 4
Kejanggalan Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam UU Perbankan

No	Pasal	Maksimum Penjara (tahun)	Minimum Penjara (tahun)
1	48 ayat (1)	10	2
2	49 ayat (2) huruf d	8	3
3	50	8	3

Data diolah dari Tabel 3 : Ancaman Pidana Penjara dengan Pidana Minimum Khusus dalam UU Perbankan

Menurut penulis, ancaman pidana penjara minimum untuk Pasal 48 ayat (1) tersebut seharusnya lebih dari 3 tahun atau lebih tinggi daripada ancaman pidana penjara minimum pada Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50. Apabila pidana penjara minimumnya tetap 2 tahun, maka pidana maksimumnya yang dikurangi menjadi lebih rendah dari 8 tahun. Dengan demikian akan terjadi keselarasan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus dalam UU Perbankan ini dan tercipta pola yang seragam untuk penerapan pidana minimum khusus.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum terdapat pola yang seragam mengenai lamanya pidana minimum khusus dalam UU Perbankan.

c. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang undang ini merupakan pengejawantahan dari amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam undang-undang ini dimuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Bab VIII yang mengatur tentang sanksi, di dalamnya tercantum 3 pasal (Pasal 20 sampai dengan Pasal 22). Dari ketiga pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap penyelenggara Negara yang diduga melakukan KKN tersebut, 2 pasal diantaranya mencantumkan sanksi pidana penjara minimum khusus. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 21 dan Pasal 22 yang keduanya mencantumkan sanksi minimum khusus pidana penjara selama 2 tahun.

TABEL 5
Ancaman Pidana Penjara
dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN

No.	Pasal	Maksimum Penjara (tahun)	Minimum Penjara (tahun)
1	21	12	2
2	22	12	2

Sumber data : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN

Apabila melihat tabel di atas, maka pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini sudah terdapat pola yang seragam mengenai pidana minimum khusus, yaitu dua delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus yang sama juga diancam dengan pidana penjara maksimum yang sama.

d. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang Undang tentang Pengadilan HAM ini terbit, menyusul diundangkannya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengadilan HAM yang dimaksud dalam Undang Undang ini merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Semua delik atau perbuatan pidana yang dicantumkan dalam Undang Undang ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Oleh karena itu, dapat dipahami apabila semua pasal yang tercantum dalam Bab VII (Pasal 36 sampai dengan Pasal 42) yang mengatur tentang Ketentuan Pidana dalam Undang Undang Pengadilan HAM ini mencantumkan pidana minimum khusus di dalamnya. Hal ini sesuai dengan diadakannya pidana minimum khusus, yaitu ditujukan untuk delik-delik tertentu yang dikategorikan berat dan membahayakan masyarakat.

Namun ada satu hal yang menurut penulis terlalu berlebihan dari UU Pengadilan HAM ini, yaitu adanya delik yang diancam dengan maksimum dan minimum pidana penjara sangat tinggi, yaitu maksimum 25 tahun dan minimum 10 tahun. Dalam hal ini A.Z. Abidin dan Andi Hamzah berpendapat¹⁴² :

Sekarang ini kelihatannya pembuat undang-undang di Indonesia cenderung untuk main menetapkan banyak delik dengan pidana pokok yang kumulatif ditambah lagi dengan menaikkan ancaman pidana penjara dan denda disertai dengan minimum khusus, yang kadang-kadang overdosis.

Adapun perincian pasal yang mengatur mengenai pidana minimum khusus dalam UU Pengadilan HAM disajikan dalam tabel berikut ini.

¹⁴² AZ Abidin, Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hal. 7.

TABEL 6
Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus
dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM

No.	Pasal	Maksimum Penjara (tahun)	Minimum Penjara (tahun)
1	36	25	10
2	37	25	10
3	38	15	5
4	39	15	5
5	40	20	10
6	41 ayat (2)	15 / 20 / 25	5 atau 10

Sumber data : UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang Undang Pengadilan HAM ini sudah menentukan pola yang seragam untuk lamanya pidana penjara minimum khusus. Pola lamanya pidana penjara minimum khusus dalam UU Pengadilan HAM ini adalah sebagai berikut :

- Delik yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, diancam dengan pidana penjara minimum khusus 5 tahun.
- Delik yang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 atau 25 tahun, diancam dengan pidana penjara minimum khusus 10 tahun.

e. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Indonesia sudah memiliki Undang Undang Hak Cipta sejak dua dasawarsa yang lalu, dengan adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang Undang tersebut kemudian diubah menjadi Undang Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Akan tetapi dengan meningkatnya perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi yang telah sedemikian pesatnya, maka diperlukan undang-undang baru untuk meningkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait. Dalam hal inilah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta baru) diterbitkan.

Dalam UU Hak Cipta baru ini termuat beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai meningkatnya sanksi pidana dan sanksi administratif bagi pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait. Meningkatnya sanksi pidana ini juga disertai dengan pencantuman pidana minimum khusus. Namun dari 9 ancaman pidana yang dicantumkan dalam UU Hak Cipta baru ini, hanya terdapat 1 ketentuan yang mencantumkan pidana penjara minimum khusus, yaitu tercantum dalam Pasal 72 ayat (1), yang ancaman pidana minimum khususnya adalah 1 bulan.

Dengan demikian, tidak ada pola lamanya pidana penjara minimum khusus dalam UU Hak Cipta, karena delik yang diancam dengan minimum khusus pidana penjara hanya berjumlah satu pasal.

Menurut penulis, pembentuk undang-undang hanya mencantumkan satu ancaman pidana minimum khusus dalam UU Hak Cipta yang baru, karena hanya delik yang diancam dengan pidana minimum khusus ini yang tergolong berat. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan ancaman maksimum khusus pada setiap ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta baru ini. Ancaman pidana maksimum khusus untuk Pasal 72 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan ancaman pidana maksimum khusus untuk ketentuan pidana yang lain, yaitu dalam Pasal 72 ayat (2) sampai dengan Pasal 72 ayat (9), semuanya berada di bawah ancaman pidana maksimum khusus dalam Pasal 72 ayat (1), yang besarnya bervariasi antara 2 - 5 tahun untuk pidana penjara.

Tercantumnya satu ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Hak Cipta baru ini, dapat dipahami karena pidana minimum khusus memang hanya diperuntukkan untuk delik-delik tertentu yang tergolong berat atau membahayakan keamanan masyarakat/negara. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menganggap bahwa delik yang diancam dengan Pasal 72 ayat (1) UU Hak Cipta yang baru tersebut merupakan delik yang tergolong berat, sehingga perlu untuk dicantumkan pidana minimum khusus.

f. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang Undang ini merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang dan merupakan peraturan perundangan pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana terorisme. Dalam UU ini tercantum juga pidana minimum khusus terhadap delik-delik tertentu yang dirumuskan dalam beberapa pasal serta terdapat pembagian jenis delik (tindak pidana), yaitu tindak pidana terorisme sendiri dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Terhadap ketentuan pidana untuk tindak pidana terorisme, dari 14 pasal yang mengatur tentang ancaman pidana, 9 pasal diantaranya mencantumkan ancaman pidana penjara minimum khusus.

Sedangkan dalam hal tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, dari 5 pasal yang mencantumkan ancaman pidana, tercantum 3 pasal yang mencantumkan pidana penjara minimum khusus yaitu Pasal 20, 21, 22.

TABEL 7

**Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus
dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

No	Pasal	Maksimum Penjara (tahun)	Minimum Penjara (tahun)
1	6	20	4
2	8	20	4
3	9	20	3
4	10	20	4
5	11	15	3
6	12	15	3
7	13	15	3
8	20	15	3
9	21	15	3
10	22	7	2

Sumber data : UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Secara umum, pola lamanya pidana penjara minimum khusus dalam undang-undang ini sudah cukup seragam dengan adanya perimbangan pidana minimum dengan pidana maksimumnya sebagai berikut :

- Terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 15-20 tahun, maka pidana penjara minimum khususnya adalah 3-4 tahun.
- Terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidanan penjara selama 7 tahun, maka pidana penjara minimum khususnya adalah 2 tahun.

Akan tetapi ada sedikit kejanggalan dalam Pasal 22 yang mencantumkan pidana penjara minimum selama 2 tahun dan pidana penjara maksimum selama 7 tahun. Apabila dibandingkan dengan pasal lain yang mencantumkan pidana minimum selama 3 tahun (Pasal 9, 11, 12, 13, 20, 21) yang mencantumkan pidana penjara selama 15 dan 20 tahun, maka menurut penulis, Pasal 22 tersebut terasa sangat ringan dalam mencantumkan maksimum pidananya (7 tahun) dan cukup jauh bedanya dengan pasal yang mencantumkan pidana minimum 3 tahun untuk maksimum pidana 15 atau 20 tahun.

TABEL 8
Kejanggalan Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam UU Anti Teroris

No.	Pasal	Maksimum Penjara (tahun)	Minimum Pidana (tahun)
1	9, 11, 12, 13, 20, 21	20	3
2	22	7	2

Data diolah dari TABEL 7 : Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Menurut hemat penulis, ancaman maksimum pidana penjara dalam Pasal 22 adalah antara 10-14 tahun, sehingga tidak terjadi "loncatan" ancaman maksimum pidana penjara dalam pasal lain yang mengatur pidana penjara minimum selama 3 tahun.

g. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang Mengalami Perubahan Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU baru) ini merupakan revisi terhadap Undang Undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebelumnya, yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 (UU lama). Revisi ini dilakukan karena dalam UU lama dianggap masih ada pasal-pasal yang harus diperbaiki sesuai dengan standar internasional yang berlaku serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang.

Disamping itu, revisi UU Pencucian uang ini dilakukan juga untuk menghindari sanksi keras yang akan diterapkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) berupa pengenaan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap setiap transaksi dengan perusahaan asing serta pemutusan hubungan korespondensi antara bank-bank Indonesia dan bank-bank di negara-negara anggota FATF.

Berkaitan dengan sanksi pidana, dalam UU baru ini tercantum beberapa pasal yang mencantumkan pidana minimum khusus di dalamnya. Pidana minimum khusus ini sudah tercantum dalam UU lama dan untuk lamanya minimum pidana penjara tidak terjadi perubahan dalam UU baru. Yang terjadi perubahan hanya terhadap besarnya minimum pidana denda.

Ketentuan dalam UU baru yang mencantumkan pidana penjara minimum khusus adalah :

TABEL 9
Ancaman Pidana Penjara dengan Minimum Khusus
dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang Yang Mengalami Perubahan Berdasarkan
UU Nomor 25 Tahun 2003

No.	Pasal	Maksimum Penjara (tahun)	Minimum Penjara (tahun)
1	3 ayat (1) huruf g	15	5
2	6	15	5
3	10A ayat (3)	3	1
4	10 A ayat (4)	15	5
5	17A	5	3

Sumber data : UU Nomor 25 Tahun 2003

Undang Undang tentang Money Laundering yang di dalamnya mencantumkan 5 pasal dengan pidana minimum khusus ini sudah menentukan pola yang seragam untuk pola pembedaannya. Adapun pola pidana minimum khusus dalam UU Money Laundering tersebut adalah sebagai berikut :

- Terhadap delik yang diancam pidana penjara maksimum selama 3 tahun, maka pidana penjara minimum khususnya adalah 1 tahun,;
- Terhadap delik yang diancam pidana penjara maksimum selama 5 tahun, maka pidana penjara minimum khususnya adalah 3 tahun;
- Terhadap delik yang diancam pidana penjara maksimum selama 15, maka pidana penjara minimum khususnya adalah 5 tahun.

h. Pola Umum Minimum Khusus dari Undang Undang Yang Dijadikan Sebagai Obyek Penelitian

Setelah dilakukan identifikasi mengenai pola minimum khusus terhadap tiap undang-undang yang menjadi obyek penelitian, maka di bawah ini akan diuraikan mengenai pola umum minimal khusus dari undang undang yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Untuk mengetahui pola umum minimum khusus tersebut, maka sebelumnya akan disajikan terlebih dahulu pola minimum khusus dalam setiap undang-undang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

TABEL 10
Pola Umum Minimum Khusus
dari Undang Undang Yang Dijadikan Sebagai Obyek Penelitian

No	Undang Undang	Pola Minimum Khusus
1	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	4 th
2	UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	2 th – 5 th
3	UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	2 th – 7 th
4	UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN	2 th
5	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	5 th – 10 th
6	UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	1 bl
7	UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	2 th – 4 th
8	UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	1 th – 5 th

Data diolah dari undang-undang yang menjadi obyek penelitian

Apabila memperhatikan tabel di atas, maka minimum khusus yang terendah adalah 1 bulan sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta, sedangkan minimum khusus yang tertinggi tercantum pada UU Pengadilan HAM, yaitu 10 tahun. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pola umum minimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP adalah berkisar antara 1 bulan sampai dengan 10 tahun.

Akan tetapi, dari tabel di atas tersebut, dapat diketahui bahwa belum terdapat pola lamanya pidana penjara yang seragam antara perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur tentang pidana minimum khusus. Oleh karena itu, dalam kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang mencantumkan pidana penjara minimum khusus pada masa yang akan datang, seyogyanya disusun dalam pola yang seragam, sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

2. Aturan Penerapan Berlakunya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Perundang-undangan di Luar KUHP

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, KUHP sebagai buku induk dari semua perundang-undangan pidana di Indonesia tidak diatur mengenai pidana minimum khusus ini, maka hal ini merupakan suatu penyimpangan, sehingga apabila dalam perundang-perundangan di luar KUHP dicantumkan mengenai pidana minimum khusus, seharusnya pula disertai dengan aturan pembedanya. Hal ini disebabkan :

- Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja dioperasionalkan/diterapkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik;
- Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pembedaan (*straftoemetsingsregel*)-nya terlebih dahulu;
- Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam "aturan umum" KUHP (sebagai sistem induk);
- Aturan (pembedaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal;
- Akan menjadi masalah apabila ada hal mengenai percobaan, pembantuan, *concursum*, *recidive*, dan lain-lain alasan peringan/pemberatan pidana, apabila tidak ada aturan pembedaan tersebut.¹⁴³

Sehubungan dengan permasalahan di lapangan atau pengaplikasian dari pidana minimum khusus ini, Barda Nawawi Arief¹⁴⁴ menyatakan bahwa di samping alasan di atas, perlunya aturan khusus untuk menerapkan pidana minimal ini disebabkan masukan/kebutuhan dari praktek. Para hakim menyatakan bahwa dalam menerapkan sistem

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 192.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal 193.

minimum yang ada dalam UU Narkotika/Psikotropika, ada kesulitan/masalah dalam hal ada faktor-faktor yang meringankan pada diri terdakwa atau ada kondisi-kondisi yang meringankan pada saat perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, dalam menegakkan rasa keadilan dan kemanusiaan, dalam prakteknya ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.

Dengan demikian, untuk mengatasi hal tersebut di atas, setiap peraturan perundang-undangan yang mencantumkan pidana minimum khusus, harus disertai dengan aturan pembedanya. Yang lebih penting, dalam KUHP sebagai buku induk peraturan perundang-undangan, seharusnya juga sudah mulai dicantumkan pola pidana minimum khusus ini yang disertai dengan aturan pembedanya. Aturan pembedaan ini dapat berupa pengecualian yang berisi tentang peringanan dan pemberatan terhadap pidana minimum khusus ini.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap 8 (delapan) perundang-undangan di luar KUHP menunjukkan hanya ada 2 perundang-undangan yang "sedikit" menyinggung tentang aturan terhadap diberlakukannya pidana minimum khusus ini, yaitu dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang Undang.

Sedangkan pada undang-undang yang lain tidak tercantum aturan pemidanaan yang bersifat khusus atau pengecualian terhadap berlakunya sistem pidana minimum khusus ini. Hal ini mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku yang melakukan delik selesai. Namun akan timbul masalah apabila menghadapi kasus yang di dalamnya terdapat masalah dalam penyertaan, percobaan, *concursum*, *recidive* dan beberapa hal yang menyangkut alasan peringan/pemberat pidana.

Pada Undang Undang Pengadilan HAM Pasal 41 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk masalah yang berkaitan dengan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan, maka pidananya sama dengan perbuatan selesai. Hal ini berarti terdapat penegasan bahwa lamanya pidana minimum khusus untuk percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan tetap sama dengan delik selesai atau terhadap pelaku utama.

Sedangkan pada Undang Undang Anti Teroris terdapat ketentuan lebih tegas yang mengatur tentang pengecualian terhadap pemberlakuan pidana minimum khusus yang tercantum dalam Pasal 19 untuk tindak pidana terorisme dan Pasal 24 untuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Pada Pasal 19 Undang Undang Anti Teroris dinyatakan :

"Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun."

Sedangkan pada Pasal 24 Undang Undang Anti Teroris dinyatakan :

"Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun."

Dengan demikian, dalam Undang Undang Anti Teroris ini dinyatakan secara tegas bahwa pidana minimum khusus tidak berlaku terhadap pelaku delik yang berusia di bawah 18 tahun.

Adanya pengecualian terhadap pemberlakuan minimum khusus dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menunjukkan telah terdapat kemajuan dalam mengatur masalah pidana minimum khusus daripada undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang minimum khusus. Hanya dalam masalah aturan pembedaan terhadap masalah *recidive*, *concursum* dan alasan-alasan pemberat/peringan pidana yang lain, masih belum tercantum dalam kedua undang-undang ini.

Meskipun aturan yang bersifat khusus ini belum ditemukan, pencantuman ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP ini telah menunjukkan adanya langkah maju dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan sistem pidana minimum khusus ini hanya diperuntukkan terhadap delik-delik tertentu yang dianggap dapat meresahkan ketertiban umum dan membahayakan masyarakat.

Dengan demikian, pada perundang-undangan di luar KUHP yang dicantumkan oleh pidana minimum khusus tersebut, oleh pembentuk undang-undang dianggap sebagai perundang-undangan yang mengatur kejahatan tertentu yang dianggap membahayakan keamanan negara dan keamanan masyarakat pada umumnya.

Apabila dalam perundang-undangan di luar KUHP hanya ada pasal-pasal tertentu yang mencantumkan pidana minimum khusus, berarti pasal-pasal tersebut adalah pasal yang mengatur kejahatan yang tergolong serius dan membahayakan masyarakat pada umumnya.

Dari hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa para pembentuk undang-undang mulai merasakan pentingnya pidana minimum khusus terhadap delik-delik tertentu yang dianggap serius dan membahayakan kelangsungan bernegara. Hal ini dapat ditemui dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diketahui, bahwa bank merupakan urat nadi sistem perekonomian modern yang sangat diperlukan dalam perkembangan perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan sebuah peraturan perundangan yang dapat melindungi perbankan dari praktek-praktek kejahatan. Pencantuman pidana minimum khusus dalam undang-undang perbankan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam bidang perbankan. Hal ini merupakan sebuah langkah maju dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Hal demikian juga diterapkan terhadap Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Diterapkannya sistem pidana minimum khusus menunjukkan pembentuk undang-undang telah menganggap bahwa pidana minimum khusus layak diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang harus diantisipasi secara serius.

Kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dengan pidana minimum khusus dalam UU Narkoba, Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang tentang *Money Laundering* juga menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut tergolong serius dan layak untuk diberi pidana minimum khusus.

Dari beberapa undang undang yang digambarkan di atas, maka dapatlah dilihat bahwa sistem pidana minimum khusus masih memerlukan aturan khusus dan perbaikan-perbaikan supaya dapat diterapkan dalam pembedaanannya. Hal ini disebabkan di dalam Undang Undang yang bersangkutan dan undang-undang lain yang didalamnya tercantum pidana minimum khusus, pada umumnya tidak disertai dengan aturan pembedaan.

Dengan demikian sampai saat ini, dicantumkannya sanksi minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP masih tetap belum memperhatikan pentingnya aturan pembedaan terhadap pidana minimum khusus ini.

B. Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana telah diterangkan dalam sub bab di muka, bahwa pidana minimum khusus telah diatur dalam beberapa perundangan di luar KUHP dan juga telah dicantumkan dalam Konsep KUHP. Dalam perundang-undangan di luar KUHP, pencantuman pidana minimum khusus ini pada umumnya tidak disertai dengan aturan dalam penerapannya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya ketika menghadapi masalah-masalah tertentu, seperti ketika menghadapi adanya alasan-alasan yang dapat memperingan atau memperberat penjatuhan pidana.

Pencantuman pidana minimum khusus sudah dilakukan dalam Konsep KUHP terhadap beberapa delik tertentu yang tergolong serius dan dianggap membahayakan ketertiban masyarakat. Dalam tesis ini, penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap jenis-jenis tindak pidana, lamanya ancaman pidana penjara dan aturan penerapan pidana minimum khusus terhadap pasal-pasal tertentu dalam Konsep KUHP yang diatur dengan pidana minimum khusus.

Di samping itu, untuk lebih dapat mewujudkan pidana minimum khusus ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam KUHP sebagai buku induk dari semua peraturan pidana, maka penulis juga melakukan perbandingan hukum pidana dengan negara-negara lain. Dengan adanya perbandingan hukum pidana dengan negara lain diharapkan akan dapat menambah wawasan untuk dapat lebih optimal dalam merumuskan sistem minimum khusus dalam KUHP di Indonesia.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dengan adanya perbandingan hukum pidana, maka akan dapat meningkatkan tingkat pemahaman/kualitas pengembangan pendidikan hukum dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.¹⁴⁵

Pendapat senada juga diutarakan oleh Sudarto yang mengemukakan bahwa salah satu manfaat umum dari perbandingan hukum adalah untuk membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.¹⁴⁶

Dalam hal perbandingan hukum pidana dengan negara lain untuk menentukan perumusan pidana minimum khusus tersebut, sebagaimana dilakukan terhadap Konsep KUHP, penulis juga akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang :

1. Tindak pidana – tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus dalam KUHP asing
2. Jumlah atau lamanya ancaman minimum khusus terhadap pidana penjara yang diterapkan dalam KUHP asing
3. Aturan penerapan sistem pidana minimum khusus dalam KUHP asing.

Adapun hukum pidana negara-negara asing yang dijadikan perbandingan adalah dengan menggunakan KUHP negara Jepang, Korea, dan Argentina. Salah satu alasan penulis memilih ketiga negara tersebut untuk dijadikan contoh perbandingan adalah ketiga KUHP negara tersebut terbagi atas 2 buku, yaitu Buku I berisi tentang Ketentuan Umum dan Buku II

¹⁴⁵ *Ibid*, hal v

¹⁴⁶ Sudarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1981.

berisi tentang tindak pidana/kejahatan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan Konsep KUHP Indonesia yang juga membagi KUHP Indonesia di masa depan menjadi 2 buku.

1. Perbandingan Tindak Pidana – Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Konsep dan KUHP Negara Asing

a. Konsep KUHP Indonesia tahun 2000

Dalam Konsep KUHP Baru ini, direncanakan bahwa KUHP hanya terdiri dari dua buku, yaitu Buku I memuat aturan umum dan Buku II memuat tentang perumusan tindak pidana. Hal ini berbeda dengan KUHP Lama (WvS) yang terdiri dari 3 buku, yaitu Buku I memuat tentang aturan umum, Buku II memuat tentang kejahatan dan Buku III memuat tentang Pelanggaran.

Diwujudkannya Konsep KUHP dalam 2 buku ini tentunya juga akan menyesuaikan KUHP Indonesia menjadi sebuah KUHP modern, sebagaimana KUHP di negara Jepang, Jerman, Argentina, Korea dan sebagainya.¹⁴⁷

Kemudian, menurut Barda Nawawi Arief, keseluruhan ketentuan dalam Buku I dan Buku II Konsep KUHP tersebut dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Andi Hamzah, *KUHP Republik Korea*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 39.

¹⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hal 117.

Keseluruhan pasal yang tercantum dalam Konsep KUHP Indonesia tahun 2000 adalah 647 pasal yang dibagi dalam 39 bab. Buku I yang berisi tentang Ketentuan Umum memuat 6 bab dan 192 pasal, sedangkan Buku II yang berisi tentang Tindak Pidana memuat 33 bab dan 455 pasal. Adapun perincian bab yang mengatur tentang tindak pidana dalam Buku II Konsep KUHP 2002 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan
- BAB II : Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
- BAB III : Tindak Pidana Negara Sahabat, Kepala Negara Sahabat, dan Perwakilan Negara Sahabat
- BAB IV : Tindak Pidana Terhadap Kewajiban dan Hak Kenegaraan
- BAB V : Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum
- BAB VI : Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan
- BAB VII : Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama
- BAB VIII : Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Barang dan Lingkungan Hidup

- BAB IX : Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara
- BAB X : Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
- BAB XI : Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
- BAB XII : Tindak Pidana Pemalsuan Segel, Cap Negara dan Merk
- BAB XIII : Tindak Pidana Pemalsuan Surat
- BAB XIV : Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan
- BAB XV : Tindak Pidana Kesusilaan
- BAB XVI : Tindak Pidana Menelantarkan Orang
- BAB XVII : Tindak Pidana Penghinaan
- BAB XVIII : Tindak Pidana Membocorkan Rahasia
- BAB XIX : Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang
- BAB XX : Tindak Pidana Terhadap Nyawa
- BAB XXI : Tindak Pidana Penganiayaan
- BAB XXII : Tindak Pidana Yang Menyebabkan Mati atau Luka-Luka Karena Kelalaian
- BAB XXIII : Tindak Pidana Pencurian
- BAB XXIV : Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
- BAB XXV : Tindak Pidana Penggelapan

- BAB XXVI : Tindak Pidana Perbuatan Curang
- BAB XXVII : Tindak Pidana Merugikan Kreditor atau Orang Yang Berhak
- BAB XXVIII : Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan Barang
- BAB XXIX : Tindak Pidana Jabatan
- BAB XXXI : Tindak Pidana Pelayaran
- BAB XXXII : Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap Sarana Serta Pra Sarana Penerbangan
- BAB XXXIII : Tindak Pidana Pemudahan
- BAB XXXIII : Ketentuan Penutup

Berkaitan dengan jenis pidana, Konsep KUHP mengatur bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 60 ayat (1) dinyatakan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Kemudian Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya dalam Pasal 61 Dinyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus (eksepsional) dan selalu diancam secara alternatif.

Konsep menganut sistem minimum khusus untuk pidana penjara.. Dianutnya ancaman minimum khusus ini yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP, didasarkan pada pokok pemikiran :

- a) Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- b) Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c) Dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.¹⁴⁹

Dari penjelasan di atas, maka Konsep KUHP Indonesia telah menyatakan secara tegas tentang dianutnya pidana minimum khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan disparitas pidana.

Perincian mengenai tindak pidana tertentu yang diancam dengan minimum khusus untuk pidana penjara disajikan sebagai hasil penelitian dalam tabel di bawah ini.

¹⁴⁹*Ibid*, hal. 125.

TABEL 11
Tindak Pidana-Tindak Pidana
Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam Konsep KUHP Indonesia 2000

No	Bab	Pasal	Tindak Pidana
1	I	199	Makar terhadap Presiden dan Wapres
2		106	Makar untuk memisahkan wilayah negara
3		107 (2)	Pemimpin/Pengatur makar
4		202 (1)a,b	Pemberontakan
5		202 (2)	Memimpin/mengatur pemberontakan
6		203 (1)	Permufakatan jahat/persiapan/penggerakan pemberontakan/pengkhianatan
7		204 (2)	Berhubungan dgn negara asing shg terjadi perang dgn RI
8		215	Juru runding negara yang merugikan negara
9		218 (2)	Menguntungkan musuh negara di waktu perang
10		218 (3)	Menguntungkan musuh negara di waktu perang dgn pemberatan
11		221	Berbuat curang menyerahkan keperluan tentara
12	II	231 (1)	Bermaksud membunuh kepala negara sahabat
13		231 (2)	Bermaksud membunuh kepala negara sahabat berakibat matinya kepala negara sahabat tersebut
14	VIII	302 (1)	Menimbulkan teror dengan kekerasan
15		302 (2)	Teror menimbulkan bahaya orang lain
16		302 (3)	Teror menimbulkan kematian orang lain
17		303	Melakukan kegiatan teroris
18		304 (1)	Pemusnahan etnis
19	XV	423 (1)	Perkosaan, terhadap anak di bawah umur, wanita tak berdaya, oral, anal dan memasukkan benda bukan bagian tubuh ke vagina/anus perempuan
20		424	Perbuatan cabul
21		425	Perbuatan cabul terhadap orang tak berdaya, anak di bawah umur, pembujukan
22		426 (1)	Perkosaan berakibat mati/luka berat
23		426 (2)	Perbuatan cabul berakibat luka berat
24		426 (3)	Perbuatan cabul berakibat mati
25		427	Cabul dengan sesama jenis di bawah umur
26		428	Membujuk dengan janji untuk berbuat cabul
27		430 (1)	Persetubuhan dalam keluarga
28		430 (2)	Persetubuhan dlm keluarga dengan korban di bawah umur
29	XVII	448 (1)	Penghinaan tanpa dapat membuktikan
30	XIX	464	Penculikan
31		465	Penyanderaan

32		470 (1)	Perampasan kemerdekaan
33		470 (2)	Perampasan kemerdekaan berakibat luka
34		470 (3)	Perampasan kemerdekaan berakibat kematian
35		470 (4)	Memberi tempat bagi perampas kemerdekaan
36	XX	475 (1)	Pembunuhan
37		475 (3)	Pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain
38		476 (1)	Pembunuhan terhadap anak yang baru lahir
39		480 (2)	Abotus tanpa persetujuan korban
40		480 (3)	Abotus tanpa persetujuan berakibat kematian ibu bayi
41	XXI	484 (1)	Penganiayaan
42		484 (2)	Penganiayaan berakibat luka berat
43		484 (3)	Penganiayaan berakibat kematian
44		486 (1)	Penganiayaan berat
45		486 (2)	Penganiayaan berat berakibat kematian
46	XXII	489 (3)	Kelalaian berakibat kematian
47	XXIII	493 (1)	Pencurian dengan pemberatan
48		493 (2)	Curat secara bersama-sama
49		493 (3)	Pencurian dengan pemberatan
50		495 (1)	Pencurian dengan kekerasan
51		495 (2)	Curas dengan pemberatan
52		495 (3)	Curas dengan bersekutu
53		495 (4)	Curas mengakibatkan kematian
54		495 (5)	Curas dengan pemberatan, bersekutu berakibat kematian
55	XXVI	552	Kejahatan pertanahan
56		524	Perbuatan curang oleh profesi bangunan
57		525	Perbuatan curang menyerahkan barang TNI
58		535	Perbuatan curang pengusaha pailit
59		537	Perbuatan curang mengurangi hak kreditur
60	XXIX	553	Pegawai Negeri yg menggelapkan barang/surat berharga
61		554	Pegawai Negeri yang memalsukan buku/register khusus
62		555	Pegawai Negeri yang menggelapkan, menghancurkan, merusak/ membiarkan orang lain/ membantu orang lain menggelapkan, merusak barang, akta, register dinas.
63		556	Pegawai Negeri yang menerima suap
64		557	Pegawai Negeri yang menerima suap untuk melakukan/tidak melakukan kewajiban
65		558 (1)	Hakim yang menerima suap
66		558 (2)	Hakim yang secara sadar menerima suap
67		561	Pegawai Negeri yg menyiksa dalam mencari keterangan
68		562	Pegawai Negeri yg memeras untuk kepentingan pribadi
69		564	Pegawai Negeri yang menerima/memotong pembayaran
70		575	Pegawai Negeri yang menyimpangkan kewajiban mengurus & mengawasi barang/hak sewa
71	XXXI	630 (1)	Pembajakan udara dengan pemberatan

72		630 (2)	Pembajakan udara dengan pemberatan berakibat kematian/hancurnya pesawat
73		631	Kekerasan terhadap orang dalam pesawat
74		632	Merusak pesawat udara dalam dinas
75		633	Menaruh barang berbahaya dalam pesawat
76		634 (1)	Apabila tindak pidana dalam Pasal 631,632,633 : - Dilakukan bersama-sama; - Kelanjutan permufakatan jahat; - Mengakibatkan luka berat.
77		634 (2)	Tindak pidana dalam Pasal 634 (1) mengakibatkan kematian atau hancurnya pesawat
78	XXXII	641	Kegiatan keuangan terhadap hasil kejahatan

Sumber data : Konsep KUHP Indonesia Tahun 2000

b. KUHP JEPANG¹⁵⁰

KUHP Jepang cukup sederhana penyusunannya dan juga terdiri dari dua Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Keseluruhan ketentuan dalam KUHP Jepang ini terbagi dalam 53 bab dan 264 pasal dengan perincian 13 bab dan 72 pasal tercantum dalam Buku I (ketentuan Umum) serta 40 bab dan 192 pasal tercantum dalam Buku II tentang kejahatan.

Adapun bab-bab yang mengatur tentang kejahatan dalam Buku II KUHP Jepang adalah :

- BAB I : (Dihapus)
- BAB II : Kejahatan mengenai Pemberontakan
- BAB III : Kejahatan Mengenai Agresi Asing
- BAB IV : Kejahatan yang Berkaitan dengan Hubungan Luar Negeri
- BAB V : Kejahatan Merintangi Pelaksanaan Kewajiban Pejabat
- BAB VI : Kejahatan Melarikan Diri
- BAB VII : Kejahatan Menyembunyikan Penjahat dan Menutupi Bukti
- BAB VIII : Kejahatan Kerusuhan
- BAB IX : Kejahatan Pembakaran (Rumah) dan Kebakaran

¹⁵⁰ Andi Hamzah, *KUHP Jepang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

yang Disebabkan oleh Kelalaian

- BAB X : Kejahatan yang Berkaitan dengan Banjir dan Pemanfaatan Air
- BAB XI : Kejahatan Merintangi Lalu Lintas
- BAB XII : Kejahatan Mengganggu Tempat Kediaman
- BAB XIII : Kejahatan Pelanggaran Kerahasiaan
- BAB XIV : Kejahatan yang Berkaitan dengan Mengisap Candu
- BAB XV : Kejahatan yang Berkaitan dengan Air Minum
- BAB XVI : Kejahatan Pemalsuan Uang
- BAB XVII : Kejahatan Pemalsuan Dokumen
- BAB XVIII : Kejahatan Pemalsuan Surat Jaminan
- BAB XIX : Kejahatan Pemalsun Cap
- BAB XX : Kejahatan Sumpah Palsu
- BAB XXI : Kejahatan Tuduhan Palsu
- BAB XXII : Kejahatan Melanggar Kesusilaan, Perkosaan dan Bigami
- BAB XXIII : Kejahatan mengenai Perjudian dan Undian
- BAB XXIV : Kejahatan Mengenai Tempat Pemujaan dan Makam
- BAB XXV : Kejahatan Korupsi Pejabat
- BAB XXVI : Kejahatan Pembunuhan
- BAB XXVII : Kejahatan Melukai Badan

- BAB XXVIII : Kejahatan Karena Kelalaian Menyebabkan Luka
- BAB XXIX : Kejahatan Abortus
- BAB XXX : Kejahatan Meninggalkan Orang Yang Perlu Pertolongan
- BAB XXXI : Kejahatan Menahan atau Mengurung Orang
- BAB XXXII : Kejahatan Intimidasi (Mengancam)
- BAB XXXIII : Kejahatan Menculik Dengan Kekerasan/Bujukan
- BAB XXXIV : Kejahatan Terhadap Nama Baik
- BAB XXXV : Kejahatan Terhadap Nama Baik dan Usaha
- BAB XXXVI : Kejahatan Pencurian dan Perampokan
- BAB XXXVII : Kejahatan Kecurangan dan Pemerasan
- BAB XXXVIII : Kejahatan Penggelapan
- BAB XXXIX : Kejahatan Mengenai Harta Benda yang Diperoleh Karena Kejahatan
- BAB XL : Kejahatan Perusakan

Berkaitan dengan masalah pidana, KUHP Jepang mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 KUHP Jepang yang berbunyi :

"Pidana pokok adalah pidana mati, penjara pada suatu tempat dengan kerja paksa, penjara tanpa kerja paksa, denda, pidana penahanan, dan denda ringan, dan perampasan sebagai pidana tambahan."

Dari Pasal 9 di atas, dapat diketahui bahwa KUHP Jepang mengenal dua pidana penjara, yaitu pidana penjara dengan kerja paksa dan pidana penjara tanpa kerja paksa. Dalam hal pidana

penjara dengan kerja paksa, diatur dalam Pasal 12 paragraf 2 yang perumusannya sebagai berikut :

“Penjara kerja paksa akan terdiri dari kurungan di dalam penjara dan kerja paksa.”

Sedangkan untuk pidana penjara tanpa kerja paksa diatur dalam Pasal 13 paragraf 2 yang perumusannya adalah sebagai berikut :

“Penjara tanpa kerja paksa akan terdiri dari kurungan di dalam penjara.”

Dengan demikian, pada hakekatnya pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa adalah sama, yaitu adanya pembatasan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan penelitian tesis ini, baik pidana penjara dengan kerja paksa atau tanpa kerja paksa dalam KUHP Jepang dijadikan dalam satu pengertian yaitu “pidana penjara”.

Berdasarkan penelitian penulis, KUHP Jepang ini sudah banyak mencantumkan pidana minimum khusus dalam kejahatan-kejahatan tertentu. Menurut Andi Hamzah, hanya delik/kejahatan yang tergolong serius saja yang diancam dengan pidana minimum khusus.¹⁵¹ Perincian mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus dalam KUHP Jepang dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.

¹⁵¹*Ibid*, hal. 53.

TABEL 12
Tindak Pidana-Tindak Pidana
Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam KUHP Jepang

No	Bab	Pasal	Tindak Pidana
1	II	77 (2)	Pemimpin/anggota pemberontakan
2		78	Persiapan/permufakatan jahat pemberontakan
3	III	82	Masuk sebagai tentara musuh waktu perang
4		88	Persiapan/permufakatan jahat masuk sebagai tentara musuh waktu perang
5	IV	93	Berkomplot untuk perang terhadap negara asing
6	VI	98	Melarikan diri dgn berkomplot dan merusak tmpt tahanan
7		99	Membebaskan tahanan dengan melawan hukum
8		100	Membantu melarikan diri dengan kekerasan
9	VII	101	Petugas penjara yang membiarkan tahanan melarikan diri
10		106 (1)	Pemimpin kerusuhan
11		106 (2)	Pemimpin menggerakkan orang lain untuk melakukan kerusuhan
12	IX	108	Pembakaran bangunan yang dihuni
13		109	Pembakaran bangunan yang tidak dihuni
14		110	Pembakaran terhadap selain bangunan
15		111	Pembakaran yang merembet pada bangunan lain
16		114	Merintangi usaha memadamkan kebakaran
17	X	119	Menyebabkan banjir pada gedung, kereta api, tambang
18		120	Menyebabkan banjir terhadap selain di atas
19		121	Merintangi usaha penanggulangan banjir
20	XI	126	Merusak kereta listrik/bangunan listrik
21		127	Membahayakan lalu lintas KA
22	XIV	136	Memasukkan/membuat/menjual candu
23		137	Mengimpor/menmbuat/menjual perlengkapan candu
24		138	Pejabat bea cukai yang mengizinkan masuknya candu dan perlengkapannya
25		139 (2)	Menyediakan tempat untuk mengisap candu
26	XV	142	Mencemari sistem penyediaan air minum
27		146	Mencemari sistem penyediaan air minum mengakibatkan kematian
28		147	Merusak sistem penyediaan air minum
29	XVI	148	Pemalsuan uang
30		149	Pemalsuan uang asing
31		153	Mempersiapkan pembuatan uang palsu
32	XVII	154	Pemalsuan dokumen kekaisaran
33		155	Pemalsuan dokumen resmi

34		159	Pemalsuan dokumen pribadi
35	XVII	162	Pemalsuan surat jaminan
36		163	Pengedaran surat jaminan
37	XIX	164	Pemalsuan/Pemakaian salah cap kekaisaran
38		165	Pemalsuan/pemakaian salah cap resmi
39	XX	169	Sumpah palsu/Kesaksian palsu
40	XXII	176 (1)	Perbuatan cabul dgn paksaan
41		176 (2)	Pencabulan terhadap anak di bawah umur
42		177	Perkosaan
43		178	Pencabulan/perkosaan terhadap orang yg tidak berdaya
44		181	Perkosaan berakibat kematian/luka berat
45		184	Bigami
46	XXIII	186 (2)	Membuka tempat perjudian
47	XXIIIV	191	Penggalian kuburan/penghancuran mayat
48	XXV	194	Penyalahgunaan wewenang aparat peradilan
49		197-3	Hakim yang menerima suap kemudian melanggar kewajiban
50	XXVI	199	Pembunuhan
51	XXVII	205	Penganiayaan berakibat kematian
52	XXIX	213	Abortus dengan persetujuan berakibat luka/kematian korban
53		214	Abortus oleh seorang petugas kesehatan dengan persetujuan ibu bayi
54		215 (1)	Abotus tanpa persetujuan
55		216	Abortus tanpa persetujuan berakibat luka/kematian korban
56	XXX	218 (1)	Meninggalkan orang lain yang merupakan tanggung jawabnya
57	XXXI	218 (2)	Meninggalkan orang tua/mertua
58		220 (1)	Menahan dan mengurung orang lain
59		220 (2)	Menahan dan mengurung orang tua/mertua
60	XXXIII	224	Penculikan terhadap anak di bawah umur
61		225	Penculikan untuk mendapat keuntungan
62		225-2	Penculikan untuk mendapat tebusan
63		226	Penculikan untuk membawa korban ke luar negeri
64		227 (1)	Bantuan thdp penculikan anak/ mendapat keuntungan
65		227 (2)	Bantuan terhadap penculikan untuk mendapat tebusan
66		227 (3)	Menerima, melarikan, menjual orang yang diculik
67		227 (4)	Menerima, melarikan, menjual orang yang diculik untuk mendapat tebusan
68	XXXVI	236	Perampokan
69		240-1	Perampokan berakibat luka berat
70	XXXVII	246	Penipuan
71	XL	258	Perusakan dokumen publik

Sumber data : KUHP Jepang

c. KUHP Korea¹⁵²

Secara umum, sistematika KUHP Korea ini sama dengan Konsep KUHP Indonesia dan KUHP Jepang, yaitu terdiri dari dua buku. Buku I berisi tentang Ketentuan Umum dan Buku II berisi tentang Ketentuan Khusus yang mengatur tentang delik atau kejahatan.

Pada KUHP Korea ini tercantum 46 bab dan 372 pasal. Buku I berisi 4 bab dan 86 pasal, sedangkan Buku II berisi 42 bab dan 286 pasal. Dalam Buku II tentang kejahatan tersebut, terdapat 3 kelompok besar dilihat dari kepentingan yang dilindungi¹⁵³, yaitu :

- 1) Kejahatan terhadap kepentingan-kepentingan Negara (*State interest*),
- 2) Kejahatan terhadap kepentingan-kepentingan Masyarakat (*Social interest*),
- 3) Kejahatan terhadap kepentingan-kepentingan individu (*Interest of individuals*).

Bab yang mengatur tentang kejahatan dalam Buku II KUHP Korea adalah :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : Kejahatan Pemberontakan |
| BAB II | : Kejahatan Agresi Asing |
| BAB III | : Kejahatan Mengenai Bendera Nasional |
| BAB IV | : Kejahatan Mengenai Hubungan Luar Negeri |
| BAB V | : Kejahatan Terhadap Kedamaian Umum |

¹⁵² Andi Hamzah, *KUHP Korea*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

¹⁵³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 109.

- BAB VI : Kejahatan Mengenai Bahan Peledak
- BAB VII : Kejahatan Mengenai Kewajiban Pejabat Publik
- BAB VIII : Kejahatan Merintangi Pelaksanaan Kewajiban
Pejabat
- BAB IX : Kejahatan Melarikan Diri dan Menyembunyikan
Penjahat
- BAB X : Kejahatan Sumpah Palsu dan Penekanan Bukti
- BAB XI : Kejahatan Penuntutan Palsu
- BAB XII : Kejahatan Mengenai Orang-orang yang Telah
Mati
- BAB XIII : Kejahatan Pembakaran
- BAB XIV : Kejahatan Mengenai Penggenangan dan
Pemanfaatan Air
- BAB XV : Kejahatan Merintangi Lalu Lintas
- BAB XVI : Kejahatan Mengenai Air Minum
- BAB XVII : Kejahatan Mengenai Candu
- BAB XVIII : Kejahatan Mengenai Alat Pembayaran
- BAB XIX : Kejahatan Mengenai Surat Berharga, Perangko
Pos, Materai
- BAB XX : Kejahatan Mengenai Dokumen-Dokumen
- BAB XXI : Kejahatan Menyangkut Hidup
- BAB XXII : Kejahatan Mengenai Kesusilaan
- BAB XXIII : Kejahatan Mengenai Perjudian dan Undian

- BAB XXIV : Kejahatan Pembunuhan
- BAB XXV : Kejahatan Melukai Badan dan Kekerasan
- BAB XXVI : Kejahatan Karena Kelalaian Berakibat Luka dan Kematian
- BAB XXVII : Kejahatan Abortus
- BAB XXVIII : Kejahatan Menelantarkan
- BAB XXIX : Kejahatan Penahanan Palsu dan Pemenjaraan Palsu
- BAB XXX : Kejahatan Intimidasi (Mengancam)
- BAB XXXI : Kejahatan Penculikan dan Melarikan
- BAB XXXII : Kejahatan Mengenai Kesucian
- BAB XXXIII : Kejahatan Terhadap Nama Baik
- BAB XXXIV : Kejahatan Terhadap Kepercayaan Bisnis dan Lelang
- BAB XXXV : Kejahatan Pelanggaran Kerahasiaan
- BAB XXXVI : Kejahatan Gangguan Terhadap Kediaman Manusia
- BAB XXXVII : Kejahatan Gangguan Pelaksanaan Hak Orang Lain
- BAB XXXVIII : Kejahatan Pencurian dan Perampokan
- BAB XXXIX : Kejahatan Penipuan dan Pemerasan
- BAB XL : Kejahatan Perusakan

BAB XLI : Kejahatan Yang Berkaitan dengan Barang-barang Curian

BAB XLII : Kejahatan Perusakan dan Penghancuran Jahat

Dalam hal pidana, jenis pidana dalam KUHP Korea tercantum pada Pasal 41 yaitu pidana mati, pidana perampasan kemerdekaan, pidana penjara, pencabutan kualifikasi, penundaan kualifikasi (*skorsing*), denda, pidana penahanan, denda ringan dan perampasan.

Semua jenis pidana di atas, dalam KUHP Korea disebut sebagai pidana pokok, kecuali perampasan yang dinyatakan sebagai pidana tambahan. Hal ini diatur dalam Pasal 49 KUHP Korea yang berbunyi sebagai berikut :

“Perampasan akan dikenakan sebagai tambahan pada pidana yang lain. Walaupun suatu putusan pemidanaan tidak diberikan kepada seorang pelaku, perampasan dapat diperintahkan jika persyaratan terpenuhi.”

Dari Pasal 41 KUHP Korea yang mengatur tentang klasifikasi pidana di atas, dapat dilihat adanya dua jenis pidana penjara yaitu pidana perampasan kemerdekaan (*penal servitut*) dan pidana penjara sendiri. Menurut Andi Hamzah, *Penal Servitut* (perampasan kemerdekaan) dapat diartikan sebagai pidana penjara dengan kerja paksa sebagaimana diatur dalam KUHP Jepang.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Andi Hamzah, *KUHP Korea, Op. Cit*, hal 42.

Dengan demikian, pada hakekatnya pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana penjara juga, karena kedua jenis pidana ini merupakan suatu sanksi terhadap pelaku pidana berupa pembatasan kemerdekaan. Oleh karena itu, sebagaimana halnya dengan perlakuan terhadap KUHP Jepang, baik pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara saja dalam KUHP Korea ini dijadikan dalam satu pengertian yaitu "pidana penjara".

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus dalam KUHP Korea akan disajikan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 13
Tindak Pidana-Tindak Pidana
Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam KUHP Korea

No	Bab	Pasal	Tindak Pidana
1	I	87 (2)	Pemimpin/anggota pemberontakan
2		90 (1)	Persiapan/permufakatan jahat pemberontakan
3	II	97	Menyerahkan amunisi perang kepada negara musuh
4		98	Bertindak sebagai mata-mata negara asing
5		99	Menguntungkan musuh negara secara umum
6		101	Persiapan/permufakatan jahat menguntungkan musuh negara secara umum
7		103	Tidak memenuhi kontrak pengangkutan perang pada waktu perang
8	IV	111	Seorang diri berperang melawan negara asing
9	V	115	Mempergunakan kekerasan, merusak dalam kekacauan
10	VI	119 (1)	Penggunaan bahan peledak yang mengganggu keamanan publik
11		120	Permufakatan jahat penggunaan bahan peledak yang mengganggu keamanan publik
12	VII	131 (1)	Hakim yang menerima suap kemudian melanggar kewajiban
13	VIII	140	Menghancurkan fasilitas jabatan umum
14		141	Merusak fasilitas publik
15		144	Merintangi kewajiban publik berakibat kematian
16	IX	148	Petugas penjara yang membiarkan tahanan melarikan diri
17	XIII	164	Pembakaran bangunan yang dihuni
18		165	Pembakaran terhadap bangunan publik
19		166	Pembakaran terhadap selain bangunan
20		168	Pembakaran yang merembet pada bangunan lain
21		173 (1)	Menghancurkan pembangkit gas, listrik, uap
22		173 (3)	Menghancurkan pembangkit gas, listrik, uap yang menyebabkan kematian/luka berat
23	XIV	177	Menyebabkan banjir shg terjadi penggenangan pd tempat kediaman
24		178	Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada gedung, kereta api, tambang
25		179 (1)	Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada obyek selain gedung, kereta api dan tambang
26	XV	187	Merusak kereta listrik/bangunan listrik
27		188	Perintangan lalu lintas berakibat kematian
28	XVI	192 (1)	Pencemaran air minum
29		193 (2)	Mencemari sistem penyediaan air minum

30		194	Pencemaran terhadap air minum dan sistem penyediaan air minum yang mengakibatkan kematian
31	XVII	200	Pejabat bea cukai yang mengizinkan masuknya candu dan perlengkapannya
32	XVIII	207 (1)	Pemalsuan uang
33		207 (2)	Pemalsuan uang asing
34	XX	225	Pemalsuan dokumen resmi
35		226	Pembuatan dokumen resmi dengan bertindak seolah-olah pejabat umum
36	XIV	250 (1)	Pembunuhan
37		252	Membunuh orang lain atas permintaan orang lain tersebut
38	XV	257 (2)	Penganiayaan terhadap orang tua/mertua vertikal ke atas
39		258 (1)	Penganiayaan berat
40		258 (2)	Penganiayaan berakibat korban cacat
41		258 (3)	Penganiayaan berat terhadap orang tua/mertua vertikal ke atas berakibat cacat
42		262	Kekerasan berakibat mati/luka berat
43	XIX	277 (2)	Penahanan palsu terhadap orang tua/mertua vertikal ke atas
44	XXXI	288 (1)	Penculikan untuk mendapat keuntungan
45		288 (3)	Penculikan untuk mendapat keuntungan sebagai kebiasaan
46		289 (1)	Penculikan untuk menjual korban ke luar negeri
47		289 (2)	Pengangkutan penculikan
48		289 (3)	Pengangkutan penculikan sebagai kebiasaan
49	XXXII	297	Perkosaan
50		299	Pencabulan/perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya
51		301	Perkosaan berakibat mati/luka
52	XXXVIII	331 (1)	Pencurian dengan pemberatan
53		331 (2)	Curat secara bersekutu dan menggunakan senjata
54		333	Perampokan
55		334	Perampokan dengan kualifikasi
56		336	Perampokan dengan menculik sebagai sandera
57		337	Perampokan berakibat luka berat
58		339	Perampokan diiringi perkosaan
59		340 (1)	Perompakan
60		340 (2)	Perompakan berakibat luka-luka
61		341	Perompakan sebagai kebiasaan
62	XLI	363	Penadahan sebagai kebiasaan
	XLII	368	Perusakan dan penghancuran harta benda, dokumen atau bangunan yang membahayakan jiwa

Sumber data : KUHP Korea

d. KUHP Argentina¹⁵⁵

Sebagaimana dalam Konsep KUHP Indonesia, KUHP Argentina terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Keseluruhan pasal dalam KUHP Argentina berjumlah 306 pasal ditambah dengan 13 buah pasal kanak-kanak.

Secara umum, sistematika dalam Buku I KUHP Argentina ini sama dengan KUHP. Perbedaan yang mencolok terletak pada sistematika dalam Buku II, yang membagi pasal-pasal tentang kejahatan dalam bentuk Titel dan Bab. Hal ini berbeda dengan KUHP Jepang atau Korea yang membagi Buku II KUHP mereka hanya dengan Bab saja. Dalam KUHP Argentina ini terdapat 12 Titel, yang masing-masing pada Titel tersebut masih dibagi dengan bab-bab tertentu mengenai kejahatan yang kemudian baru diuraikan dalam pasal-pasalnya.

Adapun Titel-titel yang terdapat dalam Buku II KUHP Argentina tersebut adalah sebagai berikut :

Titel	I	:	Kejahatan terhadap Orang
Titel	II	:	Kejahatan Terhadap Kehormatan
Titel	III	:	Kejahatan Terhadap Kesusilaan Umum
Titel	IV	:	Kejahatan Terhadap Kedudukan Perdata Seseorang

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *KUHP Argentina*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Titel	V	:	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Pribadi
Titel	VI	:	Kejahatan Terhadap Kekayaan
Titel	VII	:	Kejahatan Terhadap Keamanan Umum
Titel	VIII	:	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Titel	IX	:	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Titel	X	:	Kejahatan Terhadap Pemerintah dan Tertib Konstitusional
Titel	XI	:	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Titel	XII	:	Kejahatan Terhadap Kepercayaan Umum

Dari berbagai Titel-titel tentang penggolongan kejahatan dalam Buku II KUHP Argentina tersebut, terdapat perbedaan urutan mengenai penggolongan kejahatan dengan Konsep KUHP, KUHP Jepang, Korea. Pada KUHP Argentina kejahatan yang dilakukan terhadap perorangan, terhadap kehormatan kebebasan pribadi dan terhadap harta benda lebih didahulukan daripada kejahatan terhadap negara, terhadap ketertiban umum dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan Konsep KUHP, KUHP Jepang dan KUHP Korea yang lebih mendahulukan kejahatan terhadap negara atau terhadap ketertiban umum.

Kemudian dalam hal yang berkait dengan jenis pidana, KUHP Argentina lebih sederhana dalam mengatur jenis pidana. KUHP Argentina ini hanya mengenal pidana pokok saja dan tidak mengenal pidana tambahan. Dalam pidana pokok inipun, tidak dikenal pidana mati. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 KUHP Argentina yang menyatakan bahwa :

"Pidana yang ditentukan dalam Kitab Undang Undang ini adalah pidana penjara, tutupan, denda dan diskualifikasi."

Berkaitan dengan pidana penjara yang menjadi obyek penelitian tesis ini, dalam Pasal 6 KUHP Argentina disebutkan bahwa pidana penjara seumur hidup atau sementara akan dijalani dengan kerja paksa di dalam suatu lembaga pidana yang dimaksud untuk tujuan itu.

Sedangkan mengenai pidana tutupan akan dijalani terpisah dengan kerja paksa di dalam lembaga khusus terpisah dari yang diperuntukkan bagi pidana penjara (Pasal 9).

Pada KUHP Argentina ini sebagian besar delik diancam dengan pidana minimum khusus. Berdasarkan pencantuman diberikannya pidana minimum khusus pada Konsep KUHP bahwa pidana minimum khusus hanya diberikan kepada delik-delik yang tergolong serius, maka, dalam KUHP Argentina ini hanya akan diambil kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sebagai jenis pidana paling berat dalam KUHP Argentina.

Adapun kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 14
Tindak Pidana-Tindak Pidana
Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam KUHP Argentina

No	Titel	Bab	Pasal	Tindak Pidana
1	I	I	79	Pembunuhan
2			81 (1)	Pembunuhan dalam keadaan emosi / dengan melukai badan
3			85 (1)	Abortus tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan
4			85 (2)	Abortus dengan persetujuan wanita yang bersangkutan
5		II	90	Penganiayaan berakibat cacat tetap
6			91	Penganiayaan berakibat cacat mental/tidak mampu bekerja/tidak dapat mempunyai keturunan
7		III	95	Pengeroyokan berakibat kematian
8				Pengeroyokan berakibat luka
9		IV	98 (1)	Duel berakibat kematian
10			100 (2)	Menyebabkan duel utk mendapat keuntungan berakibat luka
11			100 (3)	Menyebabkan duel utk mdpt keuntungan berakibat kematian
12			101 (1)	Petarung yg tdk memenuhi aturan wasit berakibat lawan luka
13			101 (2)	Petarung yang tidak memenuhi aturan wasit berakibat kematian lawan
14			103	Wasit duel yang pasti berakibat mati dan kematian memang terjadi
15		VI	106	Meninggalkan anak di bawah umur/orang cacat berakibat luka berat
16				Meninggalkan anak di bawah umur/orang cacat berakibat kematian
17	III	II	119	Perkosaan terhadap korban di bawah 20 th/korban tidak berdaya/dgn paksaan
18			120	Perkosaan terhadap prempuan suci berumur 12-15 th
19			121	Perkosaan dengan penyesatan untuk mengambil keuntungan
20			122	Perkosaan berakibat luka serius/ dilakukan oleh orang tua, saudara, pendeta
21			123	Perkosaan terhadap prempuan suci berumur 12-15 th berakibat luka serius/ dilakukan orang tua, saudara, pendeta
22			124	Perkosaan terhadap korban di bawah 20 th/korban tidak berdaya/dgn paksaan atau Perkosaan terhadap prempuan suci berumur 12-15 th berakibat kematian
23		III	125	Mucikari yang menalaggunakan remaja berumur 12-20 th tanpa paksaan
24			126	Mucikari terhadap orang dewasa dengan paksaan
25	V	I	140	Menahan/menerima orang yg ditahan secara melawan hukum
26			143	Penyalahgunaan oleh pejabat umum/penjara dalam hal menahan seseorang

27		II	165	Perampokan berakibat kematian
28			166	Perampokan berakibat luka berat shg tidak mampu bekerja
29			167	Perampokan dengan pemberatan
30	VII	I	186 (1)	Pembakaran/menyebabkan ledakan/banjir berakibat bahaya bagi harta benda
31			186 (2)	Menimbulkan kebakaran/menyebabkan kehancuran tempat/produk pertanian
32			186 (3)	Pembakaran/menyebabkan ledakan/banjir yang membahayakan bangunan pemerintah
33			186 (4)	Pembakaran/menyebabkan ledakan/banjir berakibat bahaya bagi nyawa seseorang
34			186 (5)	Pembakaran/menyebabkan ledakan/banjir berakibat kematian
35		II	190	Kejahatan terhadap lalu lintas berakibat kematian orang
36			191 (3)	Mengganggu jalan kereta api shg melukai orang lain
37			191 (4)	Mengganggu jalan kereta api berakibat kematian orang lain
38			192	Mengganggu komunikasi kereta api sehingga melukai orang lain/berakibat kematian orang lain
39			194	Kejahatan terhadap transportasi laut yang mengakibatkan luka/kematian
40		III	198	Perompakan
41			199	Perompakan berakibat kematian orang yang berada di atas kapal yang diseang
42		IV	200	Kejahatan terhadap sarana penyediaan air minum/bila menyebabkan kematian
43			201	Mengedarkan barang berbahaya bagi kesehatan dengan menyembunyikan sifat merusak/bila berakibat kematian
44			202	Menularkan penyakit berbahaya
45	VII	II	210	Menjadi anggota kelompok kejahatan
46	IX	I	214	Pengkhianatan/pemberontakan
47			216	Permufakatan jahat pemberontakan
48		II	219	Mengganggu persahabatan dengan negara asing berakibat perang
49			225	Juru runding negara yang menyimpang dari instruksi
50			261	Pejabat umum yang menyelewengkan harta benda yang di bawah pengelolaannya
51	X		269	Hakim/arbitrator yang memberikan keputusan bertentangan dgn ketentuan mengenai penentuan bersalah perkara pidana
52	XII		275	Kesaksian palsu dalam kriminal yang merugikan terdakwa
53	XII	I	282	Pemalsuan uang
54			283	Pemotongan/pengubahan uang
55			287	Pejabat umum yang mengizinkan beredarnya uang palsu
56			288	Pemalsuan, materai, perangko, merk
57			292	Pemalsuan dokumen
58			293	Penyisipan keterangan palsu dalam dokumen

Sumber data : KUHP Argentina

2. Perbandingan Pola Lamanya Minimum Khusus Terhadap Pidana Penjara dalam Konsep dan KUHP Negara Asing

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “pola” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pola pemidanaan adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi hukum pidana.¹⁵⁶

Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman penyusunan undang-undang atau “pedoman legislatif”.¹⁵⁷

Oleh karena itu untuk dapat menyusun suatu kebijakan formulasi perundang-undangan yang berisi sanksi pidana terlebih dahulu harus dirumuskan mengenai pola pemidanaan ini. Hal ini tentunya juga berlaku untuk menentukan kebijakan formulasi perundang-undangan yang mencantumkan sanksi/pidana minimum khusus di dalamnya. Berkaitan dengan pola pemidanaan tersebut, maka dalam tesis ini yang akan dibahas hanyalah pola lamanya pidana penjara.

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hal 153.

¹⁵⁷ *Ibid.*

Untuk dapat menentukan formulasi pola lamanya pidana penjara yang diancam pidana minimum khusus sesuai dengan topik penelitian ini, maka akan dibahas pola lamanya pidana minimum khusus, baik dalam Konsep KUHP Indonesia tahun 2000 sebagai Rancangan KUHP Nasional di masa depan serta pola lamanya pidana penjara minimum khusus dalam beberapa KUHP negara asing, yang merupakan obyek penelitian ini, yaitu Jepang, Korea dan Argentina.

a. Konsep KUHP Indonesia Tahun 2000

Konsep KUHP menentukan bahwa pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Konsep.

Konsep juga menentukan mengenai maksimum dan minimum pidana penjara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 64 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64 ayat (2)

Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

Pasal 64 ayat (3)

Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.

Pasal 64 ayat (4)

Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Dari ketiga ketentuan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa lamanya maksimum pidana penjara adalah 15 tahun dan dapat menjadi 20 tahun apabila diperberat. Adapun lamanya minimum pidana penjara adalah 1 hari, kecuali ditentukan dengan minimum khusus.

Perincian mengenai lamanya tindak pidana yang diancam dengan minimum khusus untuk pidana penjara dalam Konsep KUHP disajikan sebagai hasil penelitian dalam tabel di bawah ini.

TABEL 15
Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam Konsep KUHP Indonesia 2000

No	Pasal-Pasal dalam Konsep	Pidana Penjara	
		Maksimum (tahun)	Minimum (tahun)
1	199, 218 (2), 218 (3), 302 (3), 634 (2)	Mati/ SH /20	5
2	106 107 (2), 630 (2)	SH / 20	5
3	302 (2), 202 (2), 204 (2) 215, 475 (3) 554, 555, 556, 557, 558 (1) , 558 (2) 561, 562, 564, 575, 630 (1), 495 (5) 634 (1), 641	20	5
4	426(1), 426(3), 470(3), 480(3)	15	5
5	430 (2), 631, 632, 633	15	4
6	231 (2), 553	20	3
7	202 (1)a,b , 231 (1), 475 (1), 302 (1), 304 (1)	15	3
8	423 (1), 426 (2), 430 (1), 464, 465, 470 (2), 480 (2), 484 (3), 486 (2), 495 (2), 495 (3), 495 (4)	12	3
9	493 (3)	10	2
10	424, 425, 428, 470 (1), 484 (2), 486 (1), 495 (1)	9	2
11	552, 524, 525, 535, 537	8	2
12	303, 493 (1), 493 (2)	7	2
13	427, 476 (1)	7	1
14	448 (1), 484 (1), 489 (3)	5	1

Sumber data : Konsep KUHP Indonesia 2000

Apabila melihat tabel di atas, maka dapat diidentifikasi mengenai pola lamanya pidana penjara minimum khusus dalam Konsep KUHP 2000 yang akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

TABEL 16
Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam Konsep KUHP Indonesia 2000

No.	Pidana Penjara	
	Maksimum	Minimum
1	15th-20th/ Seumur Hidup/ Mati	5 th
2	15 th	4 th
3	12 th - 15 th	3 th
4	7 th - 10 th	2 th
5	5 th - 7 th	1 th

Data diolah dari TABEL 15 : Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Konsep KUHP Indonesia

Apabila melihat tabel di atas, terdapat sedikit kejanggalan dalam pola minimum pidana penjara dalam Konsep. Kejanggalan yang terdapat dalam Konsep tersebut adalah :

- Adanya delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 15 tahun, dikenai pidana minimum 4 tahun, padahal dalam delik-delik lain yang diancam dengan maksimum pidana 15 tahun ini, dikenai pidana minimum 5 tahun dan 3 tahun. Di samping itu, terdapat delik lain yang diancam dengan minimum 5 tahun tetapi dikenai dengan maksimum 20 tahun/seumur

hidup/mati. Dengan demikian, terkesan tidak ada batas yang jelas terhadap batas maksimum 15 tahun untuk pidana minimumnya.

- Adanya delik yang diancam dengan pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 20 tahun, justru diancam dengan maksimum pidana penjara yang sama atau bahkan jauh lebih berat dari delik yang diancam dengan minimum pidana penjara 4 tahun dan maksimum 15 tahun. Dengan demikian, terdapat delik yang diancam dengan pidana minimum lebih rendah, justru diancam dengan maksimum pidana yang sama atau bahkan jauh lebih berat dari delik yang diancam dengan minimum pidana yang lebih ringan atau lebih rendah.

Dengan demikian, dalam Konsep KUHP Indonesia 2000 masih terdapat sedikit kejanggalan berkaitan dengan pola lamanya pidana minimum khusus.

b. KUHP Jepang

Lamanya pidana penjara dalam KUHP Jepang dapat dilihat dalam Pasal 12 paragraf 1 dan Pasal 13 paragraf 1 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 12 paragraf 1

Penjara kerja paksa akan berupa seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, dan suatu pidana jangka waktu tertentu tidak akan kurang dari 1 bulan dan tidak akan lebih dari 15 tahun.

Pasal 13 paragraf 1

Penjara tanpa kerja paksa akan berupa seumur hidup atau menurut jangka waktu tertentu, dan suatu pidana menurut jangka waktu tertentu tidak akan kurang dari 1 bulan dan tidak akan lebih dari 15 tahun.

Dari Pasal 13 KUHP Jepang tersebut dapat diketahui bahwa batas minimum umum pidana penjara¹⁵⁸ adalah 1 (satu) bulan, sedangkan batas maksimum umumnya adalah 15 (lima belas tahun) atau seumur hidup.

¹⁵⁸ Sebagaimana diungkapkan dalam sub bab di muka, bahwa dalam penelitian tesis ini, pengertian pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa dijadikan dalam satu pengertian yaitu "pidana penjara".

TABEL 17

Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Jepang

No	Pasal	Pidana Penjara	
		Maksimum	Minimum
1	246	15 th	10 th
2	240	SH / 15 th	7 th
3	108, 146	Mati/SH/15 th	5 th
4	236	15 th	5 th
5	148	Mati/SH/15 th	3 th
6	77 (2), 119, 127, 126, 154, 181, 199, 225-2	SH	3 th
7	82	Mati /SH/15 th	2 th
8	109, 149, 164, 177, 184, 205, 216, 226, 227 (4)	15 th	2 th
9	78, 88, 101, 106 (1), 110, 114, 120, 121, 138, 147, 155, 197-3, 225, 227 (2)	10 th	1 th
10	194	10 th	6 bl
11	106 (2), 136, 139 (2), 142, 176 (1), 176 (2), 178, 214, 215 (1), 218 (2), 220 (2), 227 (3)	7 th	6 bl
12	165	5 th	6 bl
13	111, 162, 163, 169	10 th	3 bl
14	258	7 th	3 bl
15	93, 98, 99, 100, 137, 153, 159, 186 (2), 191, 213, 218 (1), 220 (1), 224, 227 (1)	5 th	3 bl

Sumber data : KUHP Jepang

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui pola lamanya pidana minimum khusus dalam KUHP Jepang, yang akan disajikan dalam tabel berikut ini..

TABEL 18
Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam KUHP Jepang

No.	Pidana Penjara	
	Maksimum	Minimum
1	15 th	10 th
2	SH / 15 th	7 th
3	Mati / SH / 15 th	5 th
4	Mati / SH / 15 th	3 th
5	Mati / SH / 15 th	2 th
6	10 th	1 th
7	5, 7, 10 th	6 bl
8	5, 7, 10 th	3 bl

Data diolah dari TABEL 17 : Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam KUHP Jepang

Dari tabel mengenai Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Jepang tersebut, dapat dilihat adanya kejanggalan-kejanggalan yang mencolok, yaitu :

- Pidana mati dikenakan terhadap delik yang diancam dengan minimum pidana penjara yang rendah (2 tahun, 3 tahun dan 5 tahun), padahal pidana mati ini justru tidak terdapat pada delik

yang diancam dengan minimum pidana tinggi (7 tahun dan 10 tahun).

- Pidana seumur hidup dikenakan terhadap delik yang diancam dengan minimum pidana 2, 3, 5 dan 7 tahun, padahal pidana seumur hidup ini justru tidak dicantumkan terhadap delik yang diancam dengan minimum pidana tertinggi (10 tahun).
- Adanya delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana 10 tahun, dikenai pidana minimum khusus 1 tahun, padahal dalam delik-delik lain yang diancam dengan maksimum 10 tahun ini, dikenai pidana minimum khusus yang lebih rendah, yaitu 3 bulan dan 6 bulan.. Dengan demikian, terhadap delik dengan maksimum pidana yang sama, berlaku minimum pidana yang berbeda.

Dengan demikian, belum terdapat pola yang seragam mengenai minimum khusus pidana penjara pada KUHP Jepang.

c. KUHP Korea

Pengaturan lamanya pidana penjara¹⁵⁹ dalam KUHP Korea tercantum dalam Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut :

Perampasan kemerdekaan atau penjara dapat seumur hidup atau waktu terbatas, dan waktu terbatas dari satu bulan sampai lima belas tahun; tetapi jika diperberat, perampasan kemerdekaan waktu tertentu atau penjara waktu terbatas dapat diperpanjang menjadi dua puluh lima tahun.

Dengan demikian, dalam KUHP Korea batas lamanya minimum pidana penjara adalah 1 (satu) bulan, sedangkan batas maksimum umum pidananya adalah 25 (dua puluh lima) tahun.

Dalam perumusan ancaman terhadap delik tertentu dalam KUHP Korea ini, banyak yang hanya diancamkan minimum pidananya dan tidak mencantumkan maksimum pidananya. Terhadap hal demikian, berdasarkan Pasal 43 KUHP Korea, maka ancaman maksimumnya adalah 15 (lima belas) tahun, kecuali ditentukan diperberat dalam pasal yang mengatur delik yang bersangkutan.

Sedangkan apabila maksimumnya adalah pidana mati atau seumur hidup tanpa mencantumkan maksimum pidana penjara, maka secara logis penulis menganggap delik ini merupakan

¹⁵⁹ Sebagaimana diungkapkan dalam sub bab di muka, bahwa dalam penelitian tesis ini pengertian perampasan kemerdekaan dan pengertian penjara dalam KUHP Korea, dijadikan dalam satu pengertian yaitu pidana penjara.

kejahatan berat atau dianggap diperberat, sehingga maksimum pidana penjaranya adalah 25 (dua puluh lima) tahun.

Hasil penelitian penulis terhadap lamanya pidana penjara minimum khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dalam KUHP Korea akan disajikan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 19
Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Korea

No	Pasal	Pidana Penjara	
		Maksimum	Minimum
1	339, 340 (2), 341	SH / 25 th	10 th
2	119 (1)	Mati/SH/25 th	7 th
3	98, 164, 337, 340 (1)	SH / 25 th	7 th
4	250 (1)	Mati/SH/25 th	5 th
5	87 (2), 97, 301, 334	SH / 25 th	5 th
6	173 (3) , 289 (3)	15 th	5 th
7	99, 144, 165, 177, 187, 188	SH / 25 th	3 th
8	289 (1), 90 (1), 289 (2), 297, 333, 299, 336	15 th	3 th
9	101, 120, 166, 193 (2), 258 (3), 277 (2), 288 (3)	15 th	2 th
10	178, 207 (1)	SH / 25 th	2 th
11	207 (2)	SH / 25 th	1 th
12	111, 131 (1), 192 (1) 200, 288 (1)	15 th	1 th
13	115, 140, 141, 148, 168, 173 (1) 179 (1) 194, 225, 226, 252, 257 (2), 258 (1), 258 (2), 262, 331 (1), 331 (2) 363, 368	10 th	1 th

Sumber data : KUHP Korea

Dengan demikian, dari tabel di atas dapat diidentifikasi variasi lamanya minimum khusus untuk pidana penjara pada KUHP Korea yang akan dipaparkan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 20
Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam KUHP Korea

No	Pidana Penjara	
	Maksimum	Minimum
1	SH / 25 th	10 th
2	SH / Mati / 25 th	7 th
3	SH / Mati / 25 th / 15 th	5 th
4	SH / 25 th / 15 th	3 th
5	SH / 25 th / 15 th	2 th
6	SH / 25 th / 15 th / 10 th	1 th

Data diolah dari TABEL 19 : Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus terhadap Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Korea

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang pasti atau dapat dinyatakan tidak ada pola dalam hal pidana penjara minimum khusus pada KUHP Korea. Hal ini disebabkan maksimum pidana seumur hidup dapat dikenakan pada semua delik yang diancam dengan pidana penjara minimum dari yang paling rendah (1 tahun) sampai yang paling tinggi (10 tahun).

Kejanggalan yang lain adalah pidana mati dikenakan terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara minimum 5 tahun dan 7 tahun, akan tetapi justru pidana mati ini tidak dikenakan terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara minimum yang tertinggi, yaitu 10 tahun.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa KUHP Korea tidak menentukan pola pemidanaan yang pasti atau tidak ada pola mengenai lamanya pidana penjara minimum khusus.

d. KUHP Argentina

Dalam KUHP Argentina tidak disebutkan mengenai lamanya minimum umum dan maksimum umum pidana penjara. Dengan demikian tidak ada penegasan yang jelas mengenai pola lamanya minimum umum dan maksimum umum untuk pidana penjara pada KUHP Argentina. Penulis akan mencoba mencermati hal ini dalam sub bab tentang pembahasan pola lamanya pidana penjara dalam KUHP Argentina.

Adapun lamanya pidana penjara minimum khusus yang diterapkan terhadap pasal-pasal tertentu dalam KUHP Argentina diuraikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 21
Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam KUHP Argentina

No	Pasal	Pidana Penjara	
		Maksimum	Minimum
1	124	20 th	15 th
2	214	SH / 25 th	10 th
3	100 (3), 101 (2), 165, 191 (4), 192 (2)	25 th	10 th
4	194 (2), 200 (2), 201 (2)	20 th	10 th
5	199	15 th	10 th
6	79, 98 (1)	25 th	8 th
7	122, 186 (5)	20 th	8 th
8	119	17 th	6 th
9	123	10 th	6 th
10	166	15 th	5 th
11	126	10 th	4 th
12	125 (1)	15 th	4 th
13	81 (1)	6 th	3 th
14	85 (1), 91, 100 (2), 101 (1), 106 (2), 125 (2), 167, 186 (1) 186 (2), 191 (3), 192 (1)	10 th	3 th
15	120, 121	6 th	3 th
16	186 (3), 186 (4), 190, 140	15 th	3 th
17	194 (1), 198, 202, 219, 269, 282	15 th	3 th
18	200 (1), 201 (1), 225	10 th	3 th
19	261	10 th	2 th
20	125 (3), 95 (1), 106 (1)	6 th	2 th
21	275	10 th	1 th
22	216	8 th	1 th
23	90, 287, 288, 293	6 th	1 th
24	283	5 th	1 th
25	85 (2), 95 (2), 103	4 th	1 th
26	143	3 th	1 th
27	292	2 th	6 bl
28	210	5 th	1 bl

Sumber data : KUHP Argentina

Dari tabel di atas, maka pola minimum khusus untuk pidana penjara dalam KUHP Argentina dapat diidentifikasi sebagai berikut :

TABEL 22
Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
dalam KUHP Argentina

No	Pidana Penjara	
	Maksimum	Minimum
1	20 th	15 th
2	SH / 25 th / 20 th / 15 th	10 th
3	25 th / 20 th	8 th
4	17 th / 10 th	6 th
5	15 th	5 th
6	15 th / 10 th	4 th
7	15 th / 10 th / 6 th	3 th
8	10 th / 6 th	2 th
9	10 th / 8 th / 6 th / 5 th / 4 th / 3 th	1 th
10	2 th	6 bl
11	5 th	1 bl

Data diolah dari TABEL 21 : Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus pada KUHP Argentina

Menurut penulis, terdapat banyak kejanggalan dalam pola lamanya pidana minimum khusus dalam KUHP Argentina. Kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain :

- Terdapat delik yang diancam dengan minimum pidana penjara 1 bulan, akan tetapi maksimum pidana penjaranya lebih tinggi daripada delik yang diancam diancam pidana minimum 1 tahun. Sebagai contoh adalah Pasal 210 yang mengatur suatu

delik “menjadi anggota kelompok kejahatan” yang diancam dengan pidana minimum 1 bulan dan maksimum pidananya adalah 5 tahun, sedangkan terhadap delik yang ancaman minimum pidananya 1 tahun, justru maksimum pidananya hanya 3 tahun (Pasal 216).

- Terdapat delik yang diancam dengan minimum pidana penjara tertinggi (15 tahun), maksimum pidana penjaranya 20 tahun, sedangkan dalam delik yang diancam minimum pidana penjara lebih rendah (8 tahun dan 10 tahun), justru dapat dikenai maksimum pidana penjara lebih tinggi, yaitu 25 tahun.
- Terdapat delik yang diancam dengan minimum pidana penjara 5 tahun dan mempunyai maksimum pidana penjara 15 tahun, sedangkan dalam delik yang diancam minimum pidana penjara lebih tinggi, yaitu 6 tahun, justru dapat dikenai maksimum pidana penjara lebih rendah, yaitu 10 tahun.

Dengan demikian, pada KUHP Argentina belum terdapat pola yang seragam mengenai lamanya pidana penjara minimum khusus.

3. Perbandingan Aturan Penerapan Pidana Minimum Khusus dalam Konsep dan KUHP Negara Asing

Penerapan berlakunya pidana minimum khusus dalam suatu perundang-undangan tentu memerlukan suatu aturan yang khusus pula. Hal ini disebabkan pada umumnya dalam suatu perundang-undangan (termasuk dalam KUHP negara asing) ancaman minimum khusus ini tidak dicantumkan pada semua perumusan delik, akan tetapi hanya dicantumkan pada delik-delik tertentu yang dianggap serius oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, diterapkannya pidana minimum khusus ini memerlukan suatu aturan khusus dalam penerapannya.

Aturan tersebut dapat berupa pengecualian terhadap berlakunya sistem pidana minimum khusus tersebut misalnya mengenai peringanan dan pemberatan terhadap beberapa hal tertentu berkaitan dengan terjadinya suatu perbuatan pidana yang perumusan deliknya diatur dengan pidana minimum khusus.

Pada tesis ini, fokus pembahasan aturan berlakunya pidana minimum khusus terdiri dari 3 hal yaitu terhadap :

- a. Aturan peringanan pidana penjara minimum khusus
- b. Aturan pemberatan pidana penjara minimum khusus
- c. Pengecualian penerapan pidana penjara minimum khusus terhadap pelaku delik di bawah umur

Pada sub bab tesis ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan aturan terhadap berlakunya pidana penjara minimum khusus pada Konsep KUHP, KUHP Jepang, Korea dan Argentina. Di bawah ini adalah pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut.

a. Aturan Peringatan Terhadap Pidana Penjara Minimum Khusus

1) Konsep KUHP Indonesia Tahun 2000

Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab di awal bab ini, bahwa pencantuman pidana minimum khusus dalam perundangan-undangan di Indonesia, tidak disertai dengan aturan penerapannya. Hal ini tentu menjadi masalah karena KUHP sebagai buku induk tidak mencantumkan mengenai pidana minimum khusus.

Dalam Konsep KUHP Indonesia tahun 2000 sebagai induk perundang-undangan pidana di masa depan, telah diatur mengenai aturan umum pemidanaan dengan adanya faktor-faktor yang memperingan dan memperberat pidana.

Faktor-faktor yang memperingan pidana dalam Konsep terlihat dalam Pasal 124 KUHP yang perumusannya adalah sebagai berikut :

"Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :

- a. percobaan melakukan tindak pidana;
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara suka rela akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat; atau
- g. tindak pidana yang dilakukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 35.¹⁶⁰ "

Sedangkan mengenai lamanya peringanan pidana, Pasal

125 Konsep KUHP menyatakan :

- (1) peringanan pidana berarti bahwa maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga ;
- (2) dalam hal ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah pidana penjara lima belas tahun ;
- (3) peringanan atau pengurangan pidana sepertiga menurut ayat (1) berlaku juga terhadap minimum pidana yang dicantumkan untuk tindak pidana tertentu ;
- (4) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berarti peringanan jenis pidana.

Dari Pasal 125 (3) Konsep KUHP di atas, maka dapat dilihat bahwa pengurangan pidana juga berlaku terhadap minimum khusus. Dengan demikian Konsep telah mengatur aturan mengenai pengurangan pidana minimum khusus.

¹⁶⁰ Pasal 35 yang dimaksud dalam Pasal 124 huruf g tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.

2) KUHP Jepang

Pengaturan penerapan pidana minimum khusus dalam KUHP Jepang dapat dijumpai dalam pasal tertentu, meskipun tidak disebut secara tegas. Faktor-faktor yang memperingan pidana tidak diatur dalam satu ketentuan seperti dalam Kosep KUHP Indonesia, tetapi tersebar dalam beberapa pasal dalam Buku I mengenai Ketentuan Umum.

Adapun mengenai faktor-faktor yang memperingan pidana dalam KUHP Jepang adalah sebagai berikut :

- a) Pembelaan diri yang melampaui batas (Pasal 36 paragraf 2)
- b) Penangkalan terhadap bahaya yang akan datang yang menimbulkan kerugian yang berlebih (Pasal 37 paragraf 2)
- c) Kekhilafan tentang hukum (Pasal 38 paragraf 3)
- d) Lemah akal (Pasal 39 paragraf 2)
- e) Orang yang bisu tuli (Pasal 40)
- f) Orang yang menyerahkan diri setelah melakukan kejahatan sebelum ia diketahui menjadi penjahat (Pasal 42 paragraf 1)
- g) Orang yang menyerahkan diri setelah melakukan delik aduan terhadap pihak yang mempunyai hak mengajukan pengaduan (Pasal 42 paragraf 2)
- h) Percobaan (Pasal 43)
- i) Pembantuan (Pasal 63)
- j) Menurut petunjuk keadaan-keadaan yang meringankan.

Sedangkan mengenai lamanya peringanan pidana penjara dalam KUHP Jepang diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal penjara kerja paksa atau tanpa kerja paksa untuk jangka waktu tertentu dapat diperberat menjadi 20 tahun dan dalam hal pengurangan jangka waktu itu dapat dikurangi sampai kurang dari 1 bulan.”

Lamanya peringanan pidana penjara dalam KUHP Jepang ini terdapat dalam metode pengurangan pidana penjara. Hal ini tercantum dalam Pasal 68 yang perumusannya adalah sebagai berikut :

“Apabila pidana penjara sementara dengan atau tanpa kerja paksa harus dikurangi, lamanya jangka waktu penjara akan dikurangi menjadi setengahnya.”

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 14 dan Pasal 68 KUHP Jepang di atas, terutama dengan melihat pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa *“pengurangan jangka waktu itu dapat dikurangi sampai kurang dari 1 bulan”*, dan 1 bulan merupakan batas minimum khusus untuk pidana penjara dalam KUHP Jepang, maka dimungkinkan adanya pengurangan pidana minimum khusus dalam KUHP Jepang.

Akan tetapi terhadap masalah lamanya peringanan pidana terhadap percobaan dan pembantuan dalam KUHP Jepang tidak diatur secara tegas. Masalah percobaan diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44.

Pasal 43

“Pidana akan dikurangi terhadap seseorang yang memulai tetapi gagal menyelesaikan perbuatan kejahatan; ditentukan bahwa jika ia secara sukarela menghentikan perbuatan kejahatan itu, pidananya akan dikurangi sepertiga”.

Pasal 44

“Percobaan dapat dipidana hanya apabila ditentukan secara khusus demikian di dalam tiap-tiap pasal yang bersangkutan.”

Dari hal di atas, terlihat bahwa KUHP Jepang tidak secara tegas mengatur tentang peringanan pidana minimum khusus terhadap percobaan, tetapi dalam Pasal 43 dan Pasal 44 sepertinya terlihat ada peringanan terhadap percobaan. Hal ini disebabkan peringanan atau potongan tersebut dapat dimungkinkan untuk ancaman maksimal maupun minimal.

Dalam hal pembantuan, menurut KUHP Jepang, pidana terhadap pembantuan diatur dalam Pasal 63 KUHP Jepang yang berbunyi sebagai berikut :

“Pidana untuk seorang pembantu akan diberikan potongan menurut undang-undang dari pidana bagi pelaku utama.”

Namun peringanan terhadap ancaman minimum khususnya tidak jelas pengeturannya, karena tidak ada ketentuan dalam KUHP Jepang yang secara tegas menyatakan tentang berapa lama potongan pidana penjara terhadap pembantu tindak pidana. Yang ada hanyalah pidana untuk pembantu lebih ringan daripada pelaku tindak pidana.

3) KUHP Korea

Sebagaimana dalam KUHP Jepang, faktor-faktor peringanan pidana serta lamanya peringanan pidana dalam KUHP Korea juga tersebar dalam pasal-pasal tertentu pada Buku I tentang Ketentuan Umum.

Faktor-faktor peringanan pidana dalam KUHP Korea ini adalah :

- a) Menderita sakit mental (Pasal 10 ayat (2))
- b) Pelaku tuli dan bisu (Pasal 11)
- c) Pembelaan diri yang melampaui batas (Pasal 21 ayat (2))
- d) Percobaan (Pasal 25)
- e) Delik yang dihentikan secara sukarela (Pasal 26)
- f) Delik yang tidak mungkin terjadi selesai karena kekeliruan sasaran (Pasal 27)
- g) Pembantuan (Pasal 32)
- h) Terdapat keadaan-keadaan yang meringankan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 52)

Apabila kita melihat faktor-faktor yang menjadi peringan pidana dalam KUHP Korea, maka hanya percobaan yang langsung diutarakan secara tegas tentang lamanya peringanan pidana yaitu ditentukan secara khusus dalam setiap pasal yang berkenaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

“Pidana untuk delik percobaan akan ditentukan secara khusus dalam setiap pasal yang berkenaan.”

Dari Pasal 29 KUHP Korea tersebut dapat diartikan bahwa ancaman pidana terhadap percobaan tidak ditentukan secara pasti dan percobaan yang dapat dipidana tidak untuk semua jenis kejahatan. Apabila jenis kejahatan yang dimaksud diancam dengan pidana minimum khusus, berarti dimungkinkan juga pengurangan untuk minimum pidananya.

Akan tetapi, dalam pasal-pasal pada Buku II yang mengatur tentang Kejahatan dalam KUHP Korea, tidak ditemukan adanya peringanan pidana minimum khusus dalam hal pembantuan. Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan peringanan untuk pidana minimum khusus terhadap pembantuan dalam KUHP.

Kemudian untuk lamanya peringanan pidana dalam KUHP Korea untuk pidana penjara (sesuai dengan obyek penelitian tesis ini) selain percobaan, diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-3 yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila pidana perampasan kemerdekaan terbatas atau penjara terbatas yang akan diringankan, maka akan diringankan dengan setengah dari jangka waktu pidana.”

Dengan demikian lamanya peringanan pidana terhadap faktor peringan pidana yang lain, yaitu menderita sakit mental, pembelaan diri yang melampaui batas, delik yang dihentikan secara sukarela, delik yang tidak mungkin terjadi selesai karena kekeliruan sasaran, pembantuan, keadaan-keadaan yang meringankan pada saat kejahatan dilakukan lamanya peringanan pidana adalah sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-3 untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, yaitu sebesar setengah dari jangka waktu lamanya pidana penjara.

Apabila diperhatikan kata-kata "*setengah dari jangka waktu lamanya pidana penjara*", maka dapat timbul penafsiran adanya dua batas untuk pidana penjara, yaitu maksimum dan minimum. Dengan demikian, aturan peringanan pidana terkesan tidak jelas berlakunya terhadap minimum khusus dalam faktor-faktor yang memperingan selain percobaan pada KUHP Korea.

d) KUHP Argentina

Berdasarkan penelitian penulis, faktor-faktor peringan pidana dalam KUHP Argentina hanya ada 2 macam, yaitu :

- a) Percobaan (Pasal 44)
- b) Penyertaan (Pasal 46)

Ketentuan terhadap peringanan pidana untuk masalah percobaan dalam KUHP Argentina tercantum dalam Pasal 44, sedangkan peringanan pidana untuk masalah penyertaan diatur dalam Pasal 46.

Pasal 44

"Pidana yang ditentukan untuk pelaku (percobaan) dikurangi sepertiga sampai setengahnya.
Jika pidananya ialah penjara seumur hidup, pidana untuk percobaan ialah penjara dari lima belas sampai dua puluh tahun.
Jika pidananya ialah tutupan seumur hidup, pidana untuk percobaan ialah tutupan dari sepuluh sampai lima belas tahun.
Jika kejahatan itu tidak mungkin diselesaikan, pidananya dikurangi setengahnya dan dapat dikurangi sampai minimum menurut undang-undang atau dapat ditiadakan seluruhnya, sesuai dengan kadar bahaya pelaku."

Apabila melihat ketentuan tentang Pasal 44 paragraf 4 tentang percobaan di atas, pada kalimat *"Jika pidananya ialah penjara seumur hidup, pidana untuk percobaan ialah penjara dari lima belas sampai dua puluh tahun. Jika pidananya ialah tutupan seumur hidup, pidana untuk percobaan ialah tutupan dari sepuluh sampai lima belas tahun"*, maka terkesan bahwa yang dikurangi hanya maksimum pidananya saja.

Kemudian pada kalimat *"Jika kejahatan itu tidak mungkin diselesaikan, pidananya dikurangi setengahnya dan dapat dikurangi sampai minimum menurut undang-undang atau dapat ditiadakan seluruhnya, sesuai dengan kadar bahaya pelaku"*, maka dalam hal ini terkesan belum jelas mengenai pengurangan pidananya, apakah pengurangan tersebut berlaku hanya terhadap maksimum atau minimumnya, ataukah terhadap maksimum dan minimum pidananya.

Dengan demikian, dalam KUHP Argentina, peringanan pidana minimum khusus terhadap pidana penjara dalam hal percobaan terkesan tidak jelas pengaturannya.

Pasal 46

"Siapa pun yang bekerja sama dengan cara lain dalam melakukan perbuatan itu yang memberi bantuan sesudah perbuatan dilakukan, karena janji yang dibuat sebelum dilakukan kejahatan itu, akan dipidana sama dengan pidana yang ditentukan itu, *dikurangi sepertiga atau setengahnya*. Jika pidananya penjara seumur hidup, terdakwa akan dipidana penjara dari lima belas sampai dua puluh tahun dan jika tutupan seumur hidup, akan dipidana tutupan dari sepuluh sampai lima belas tahun."

Apabila melihat kalimat dalam Pasal 46 di atas, yang berbunyi "... *Jika pidananya penjara seumur hidup, terdakwa akan dipidana penjara dari lima belas sampai dua puluh tahun dan jika tutupan seumur hidup, akan dipidana tutupan dari sepuluh sampai lima belas tahun*" , maka terkesan bahwa yang dapat dikurangi hanya maksimum pidananya saja,

sedangkan peringanan terhadap minimum pidana terkesan tidak dicantumkan dalam Pasal ini.

Dengan demikian, tidak ditemukan pengaturan yang jelas terhadap peringanan pidana penjara minimum khusus dalam hal percobaan dan pembantuan pada KUHP Argentina.

b. Aturan Pemberatan Pidana Penjara Minimum Khusus

1) Konsep KUHP Indonesia Tahun 2000

Dalam hal faktor-faktor yang memperberat pidana, Konsep mengaturnya dalam Pasal 126, yang perumusannya adalah sebagai berikut :

Pasal 126

(1) Faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi :

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam;
- g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan berbahaya; atau

- (2) pemberatan pidana berlaku juga terhadap orang yang melakukan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :
- a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
 - b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
 - c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa.

Sedangkan lamanya pemberatan pidana menurut Konsep KUHP diatur dalam Pasal 127 yang perumusannya adalah sebagai berikut :

“Pemberatan pidana berupa penambahan 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana.”

Dari ketentuan Pasal 127 Konsep di atas, maka tidak terdapat ketentuan dalam Konsep untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberatan pidana penjara minimum khusus.

Akan tetapi dalam pemberatan yang lain, yaitu terhadap *concurso* (perbarengan), justru ditemukan adanya pemberatan terhadap pidana penjara minimum khusus. Penempatan *concurso* sebagai pemberat pidana ini tidak dijadikan satu dengan faktor-faktor pemberat pidana yang lain karena pemberatan pidana dalam *concurso* tidak selalu berupa “pemberatan sepertiga dari maksimum pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Konsep. Oleh karena itu, *concurso* diatur tersendiri dalam Buku I Bab III Bagian Keenam tentang Perbarengan pada Pasal 129 – Pasal 136.¹⁶¹

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit. hal. 135.

Adapun ketentuan pemberatan pidana penjara minimum khusus dalam *concursum* tercantum dalam Pasal 132 ayat (3)

Konsep, yang perumusannya adalah sebagai berikut :

“Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (sepertiga).”¹⁶²

Dengan demikian, dalam hal perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana minimum, maka terdapat pemberatan pada pidana minimum khususnya yaitu sebesar adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Konsep KUHP 2000 secara umum tidak mengatur pemberatan pidana terhadap minimum khusus dan hanya mengatur pemberatan pidana penjara minimum khusus dalam hal perbarengan tertentu.

¹⁶² Perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) tersebut adalah perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

2) KUHP Jepang

Faktor yang memperberat pidana dalam KUHP Jepang adalah *recidive* dan *concurus*. Masalah *recidive* ini diatur dalam Buku I Pasal 56-59 Bab X. Ketentuan yang mengatur tentang pidana bagi *recidive* diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 59.

Pasal 57

“Maksimum lamanya pidana untuk kejahatan kedua akan menjadi dua kali maksimum lamanya pidana penjara kerja paksa yang ditentukan untuk kejahatan tersebut.”

Pasal 59

“Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan kedua akan diterapkan serupa terhadap seseorang yang dipidana untuk ketiga atau selanjutnya.”

Dari uraian kedua pasal dari KUHP Jepang di atas, adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang menjadi *dua kali maksimal lamanya pidana penjara kerja paksa yang ditentukan untuk kejahatan tersebut*, maka tidak terdapat ketentuan dalam KUHP Jepang untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberatan pidana penjara minimum khusus.

Masalah *concurus* diatur dalam Buku I Bab IX KUHP Jepang dan tercantum dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 45 – Pasal 54. Hal yang berkaitan dengan pemberatan pidana diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi :

“Apabila gabungan kejahatan-kejahatan meliputi dua atau lebih kejahatan yang dapat dipidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa untuk waktu terbatas, maka maksimum lamanya pidana yang dikenakan bersama-sama untuk gabungan-gabungan kejahatan ialah maksimum yang ditentukan untuk kejahatan terberat ditambah seperdua, tetapi tidak boleh melebihi jumlah maksimum pidana yang ditentukan untuk kejahatan-kejahatan tersebut.”

Apabila melihat Pasal 47 di atas, terutama dalam kalimat *“...maka maksimum lamanya pidana yang dikenakan bersama-sama untuk gabungan-gabungan kejahatan ialah maksimum yang ditentukan untuk kejahatan terberat ditambah seperdua, tetapi tidak boleh melebihi jumlah maksimum pidana yang ditentukan untuk kejahatan-kejahatan tersebut”*, maka dapat dilihat bahwa pemberatan pidana hanya untuk maksimum pidananya saja, sedangkan terhadap minimum pidananya tidak diatur mengenai pemberatan.

Melihat penjelasan tentang tidak adanya pemberatan pidana minimum khusus terhadap *concursum* dan *recidve* yang merupakan faktor pemberat pidana dalam KUHP Jepang, maka dapat dinyatakan dalam KUHP Jepang tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemberatan pidana penjara minimum khusus.

3) KUHP Korea

Sebagaimana halnya dengan KUHP Jepang, faktor yang memperberat pidana pada KUHP Korea adalah kejahatan ulangan (*recidive*) dan *concurus*.

Ketentuan mengenai *recidive* dalam KUHP Korea dicantumkan dalam Buku I Bab 2 sub 4 Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 35

- (1) Jika dalam jangka tiga tahun sesudah selesainya atau remisi eksekusi pidana seseorang dipidana karena suatu delik yang dapat dipidana penjara atau yang lebih berat, ia kan dipidana sebagai pelanggar ulangan.
- (2) Pidana penjara untuk kejahatan ulangan ialah dua kali lamanya maksimum untuk kejahatan itu.

Pasal 36

“Jika setelah pengenaan pidana suatu kejahatan ditemukan sebagai kejahatan ulangan, pidananya dapat ditentukan sesuai dengan penambahan pidana yang ditentukan di sidang pengadilan kecuali jika eksekusi pidana itu telah diselesaikan atau pidana telah dihapus.”

Dengan demikian, dari kedua pasal dalam KUHP tersebut terlihat bahwa terdapat kesamaan dalam lamanya pemberatan pidana terhadap *recidive* dengan KUHP Jepang, yaitu dua kali lamanya maksimum pidana. Oleh karena itu dalam KUHP Korea juga tidak terdapat ketentuan yang jelas untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberatan pidana minimum khusus yaitu apakah pidana minimumnya juga ditambah menjadi dua kali

minimum pidana untuk delik-delik yang diancam dengan pidana minimum khusus.

Dalam masalah *concursum*, KUHP Korea mengatur dalam Buku I Bab II Pasal 38 – Pasal 40. Hal mengenai pemberatan pidana dicantumkan dalam Pasal 38 ayat (1) paragraf 2, yang perumusan pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 38 ayat (1)

“ Jika kejahatan berbarengan diadili pada waktu yang bersamaan, pidana yang akan dikenakan sesuai dengan penggolongan sebagai berikut :

2. Dalam hal pidana yang ditentukan untuk tiap kejahatan adalah sama jenisnya, lain daripada pidana mati atau perampasan kemerdekaan seumur hidup atau penjara seumur hidup, maka lamanya maksimum atau jumlah maksimum untuk kejahatan terberat akan diperberat setengahnya, tetapi tidak akan lebih dari jumlah maksimum keseluruhannya atau jumlah maksimum pidana yang ditentukan untuk tiap kejahatan, kecuali beberapa denda ringan atau beberapa perampasan dapat dikenakan bersama-sama.”

Apabila melihat kalimat *“lamanya maksimum atau jumlah maksimum untuk kejahatan terberat akan diperberat setengahnya, tetapi tidak akan lebih dari jumlah maksimum keseluruhannya atau jumlah maksimum pidana yang ditentukan untuk tiap kejahatan”*, maka terkesan bahwa yang diperberat hanya maksimum pidananya dan tidak terdapat pemberatan pada minimum pidananya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP Korea tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemberatan minimum khusus terhadap *recidive* dan *concurus* yang merupakan faktor pemberat pidana dalam KUHP Korea. Dengan demikian tidak terdapat pengaturan pemberatan pidana ancaman minimum khusus dalam KUHP Korea.

4) KUHP Argentina

Pada KUHP Argentina faktor pemberat pidana adalah kejahatan ulangan/*recidive* dan *concurus*. Adapun lamanya pemberatan pidana untuk *recidive* tidak dicantumkan secara jelas dalam KUHP Argentina, sehingga menurut penulis KUHP Argentina tidak mengatur secara jelas pemberatan pidana minimum khusus dalam hal *recidive*.

Faktor pemberat pidana yang lain dalam KUHP Argentina, yaitu *Concurus* diatur dalam Pasal 54 – 58. Pemberatan pidana tercantum dalam Pasal 55 yang perumusannya adalah sebagai berikut :

“Apabila beberapa perbuatan yang berdiri sendiri berbarengan yang tunduk pada pidana yang sejenis, pidana yang dikenakan kepada pelaku sebagai minimumnya ialah minimum pidana terberat, dan sebagai maksimum ialah jumlah yang dihasilkan oleh komulasi dari semua perbuatan, ditentukan bahwa jumlah ini tidak akan lebih dari maksimum menurut hakim untuk macam pidana ini.”

Dari pasal 55 tersebut diatas, maka terlihat adanya ketentuan pidana minimum yang digunakan, yaitu minimum pidana yang terberat apabila beberapa perbuatan berbarengan masing-masing yang berdiri sendiri dan semuanya tunduk pada pidana yang sejenis. Akan tetapi pemberatan hanya ditujukan kepada maksimum pidananya dan jumlah maksimum tersebut diserahkan kepada hakim menurut jenis pidana ini.

c. Pengecualian Pidana Penjara Minimum Khusus terhadap Pelaku Delik di Bawah Umur

1) Konsep KUHP Indonesia Tahun 2000

Menurut Konsep KUHP, batas usia minimal yang dapat dijadikan dalam pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Hal ini tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) yang perumusannya adalah :

“Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Kemudian terhadap anak yang berumur 12-18 tahun dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 106 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“Pidana dan tindakan hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.”

Dari Pasal 106 ayat (2) Konsep KUHP di atas, maka terhadap pelaku delik yang berumur di antara 12-18 tahun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Berkaitan dengan pidana minimum

khusus, maka terdapat pernyataan yang tegas mengenai pengecualian pidana penjara minimum khusus. Hal ini tercantum dalam Pasal 117 yang perumusannya adalah sebagai berikut :

“Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) tidak berlaku bagi anak.”

Dengan demikian, untuk pelaku delik di bawah umur, yaitu antara 12-18 tahun, Konsep mengatur pengecualian (peringanan) terhadap minimum pidananya, yaitu terhadap orang berumur 12-18 tahun yang melakukan delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus, maka batas minimum khusus itu ditiadakan, sehingga terhadap pelaku delik berumur 12-18 tahun tersebut berlaku minimum penjara (satu) hari sesuai dengan minimum umum pidana penjara dalam Konsep KUHP Indonesia.

b) KUHP Jepang

Dalam Pasal 41 KUHP Jepang dinyatakan :

“ Perbuatan seorang yang berumur di bawah 14 tahun tidak dipidana.”

Dengan demikian, KUHP Jepang tidak mengatur tentang peringanan ancaman pidana penjara minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur, karena anak di bawah umur tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

c) KUHP Korea

Seperti dalam KUHP Jepang, KUHP Korea juga tidak mengatur tentang pengecualian pidana penjara minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 yang menyatakan :

“Seseorang yang belum mencapai umur empat belas tahun tidak dapat dipidana karena suatu perbuatan pidana.”

Dengan demikian, KUHP Korea juga tidak mengatur tentang pengecualian pidana penjara minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur, karena anak di bawah umur tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan justru menjadi alasan penghapus pidana dalam KUHP Korea.¹⁶³

c) Argentina

KUHP Argentina tidak mencantumkan ketentuan yang jelas terhadap pelaku delik di bawah umur. Dalam Pasal 8 hanya ditentukan bahwa “Anak-anak dan wanita akan menjalani pidana di lembaga khusus”.

Dengan demikian, pengecualian berlakunya pidana minimum khusus pada Argentina *hanya terletak pada tempat menjalani hukuman*, yaitu di suatu lembaga khusus.

¹⁶³ Barda Nawawi Arief Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2003, hal 103.

2. Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam KUHP Nasional di Masa Depan

KUHP yang berlaku sekarang merupakan suatu produk peninggalan Pemerintahan Belanda, yang meskipun telah banyak dilakukan perubahan di dalamnya, masih terasa kurang dapat memenuhi kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam negara Republik Indonesia yang sedang melakukan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Adanya sistem pidana penjara minimum khusus ini merupakan suatu bagian dari sistem pemidanaan yang baru dan sama sekali belum dikenal dalam KUHP lama (WvS), maka dalam penerapannya tentu akan menimbulkan berbagai masalah yang sekaligus memberikan pengaruh terhadap keseluruhan sistem pemidanaan.

Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem pidana penjara minimum khusus tersebut dalam Konsep KUHP, maka perlu juga dicantumkannya ketentuan-ketentuan tertentu berkaitan dengan aturan mengenai penerapan pidana penjara minimum khusus ini. Ketentuan-ketentuan tersebut sebaiknya dicantumkan dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, sehingga penerapan pidana penjara minimum khusus dalam tiap-tiap pasal yang mencantumkan pidana penjara minimum khusus dalam Buku II yang mengatur tentang tindak pidana menjadi lebih mudah dan efektif.

Aturan terhadap penerapan pidana penjara minimum khusus seharusnya diatur dalam suatu pasal atau ketentuan yang tegas dan seyogyanya diletakkan dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, sehingga penerapan pidana penjara minimum khusus dapat berlaku terhadap semua delik yang diatur dengan pidana minimum khusus dalam Buku II tentang Kejahatan.

Dengan adanya penerapan dalam satu ketentuan yang tegas, maka aturan berlakunya pidana penjara minimum khusus ini akan lebih mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu ide dasar disusunnya Konsep Rancangan KUHP Indonesia tahun 2000, yaitu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶⁴

Apabila aturan berlakunya penerapan pidana penjara minimum khusus ini dicantumkan dalam beberapa ketentuan atau pasal yang tidak tegas, maka pemahaman terhadap berlakunya pidana minimum khusus ini akan menjadi sulit atau rumit, sehingga undang undang (KUHP) terkesan disusun secara tidak sistematis dan terarah.

¹⁶⁴ *Konsep KUHP Indonesia tahun 2003*, Penjelasan Umum, hal 1.

Hal tersebut disebabkan apabila pencantuman aturan penerapan pidana penjara minimum khusus dalam undang-undang (KUHP) tidak disebutkan secara tegas akan dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam dari masyarakat, baik dari aparat keadilan, maupun bagi masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu, mengingat sistem pidana penjara minimum khusus ini merupakan suatu hal yang baru dalam perundang-undangan di Indonesia dan sama sekali tidak dikenal dalam KUHP yang berlaku sekarang, maka seharusnya sistem pidana penjara minimum khusus ini diatur dalam ketentuan yang tegas dan jelas dalam Buku I KUHP nasional di masa yang akan datang.

Dalam tesis ini, selanjutnya akan diuraikan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan formulasi pidana minimum khusus dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia. Hal-hal tersebut adalah :

- a. Tindak pidana-tindak pidana diancam dengan pidana penjara minimum khusus.
- b. Pola lamanya pidana penjara minimum khusus.
- c. Aturan berlakunya pidana penjara minimum khusus.

Penjelasan lebih lanjut dari ketiga hal tersebut di atas, akan dipaparkan di bawah ini.

a. Tindak Pidana-Tindak Pidana Tertentu Yang Diancam Pidana Penjara Minimum Khusus

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang lalu telah dikemukakan mengenai delik-delik tertentu yang diancam dengan pidana minimum khusus pada Konsep KUHP Indonesia tahun 2000, dan pada KUHP beberapa negara asing, yaitu Jepang, Korea dan Argentina. Selanjutnya untuk mengetahui tindak pidana – tindak pidana yang diancam pidana minimum khusus sebagai hasil perbandingan, maka penulis akan melakukan perbandingan tindak pidana-tindak pidana yang diancam pidana minimum khusus dari masing-masing KUHP negara asing, kemudian hasilnya dibandingkan dengan Konsep KUHP Indonesia tahun 2000 sebagai buku induk perundang-undangan pidana di masa depan.

Dalam hal perbandingan antar KUHP negara asing, penulis akan menggunakan rumus : $P = F/N \times 100\%$ dengan catatan sebagai berikut :

P = prosentase jawaban

F = frekwensi jawaban

N = jumlah KUHP yang dibandingkan

Nama-nama negara yang dijadikan perbandingan lebih lanjut akan disingkat dengan perincian sebagai berikut :

- Jepang : JPN
- Korea : KOR
- Argentina : ARG

Penentuan kualifikasi tindak pidana didasarkan atas hasil penelitian terhadap delik-delik yang diatur dengan pidana minimum khusus dalam KUHP negara Jepang, Korea dan Argentina. Kemudian terhadap delik yang perumusannya sama, mirip atau sejajar di antara ketiga KUHP negara asing tersebut, maka delik tersebut cukup dicantumkan satu kali.

TABEL 23
Perbandingan Tindak Pidana
Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus
Antara KUHP Jepang, Korea dan Argentina

No	TINDAK PIDANA	KUHP			TOTAL	
		JPN	KOR	ARG	F	P=%
1	Pengkhianatan/pemberontakan	-	-	✓	1	33,33
2	Pemimpin/anggota pemberontakan	✓	✓	-	2	66,67
3	Persiapan/permufakatan jahat pemberontakan	✓	✓	✓	3	100
4	Masuk sbg tentara musuh waktu perang	✓	-	-	1	33,33
5	Persiapan/permufakatan jahat untuk Masuk sbg tentara musuh waktu perang	✓	-	-	1	33,33
6	Berkomplot utk perang terhadap negara asing	✓	-	-	1	33,33
7	Menyerahkan amunisi perang kpd negara musuh	-	✓	-	1	33,33
8	Bertindak sebagai mata-mata negara asing	-	✓	-	1	33,33
9	Mengganggu persahabatan dengan negara asing berakibat perang	-	-	✓	1	33,33
10	Juru runding negara yang menyimpang dari instruksi	-	-	✓	1	33,33
11	Menguntungkan musuh negara secara umum	-	✓	-	1	33,33
12	Persiapan/permufakatan jahat	-	✓	-	1	33,33
13	Tidak memenuhi kontrak pengangkutan perang pada waktu perang	-	✓	-	1	33,33
14	Seorang diri berperang melawan negara asing	-	✓	-	1	33,33
15	Mempergunakan kekerasan, merusak dalam kekacauan	-	✓	-	1	33,33
16	Penggunaan bahan peledak yang mengganggu keamanan publik	-	✓	-	1	33,33
17	Permufakatan jahat Penggunaan bahan peledak yang mengganggu keamanan publik	-	✓	-	1	33,33
18	Menghancurkan fasilitas jabatan umum	-	✓	-	1	33,33
19	Merusak fasilitas publik	-	✓	-	1	33,33
20	Merintangi kewajiban publik berakibat kematian	-	✓	-	1	33,33
21	Melarikan diri dgn berkomplot dan merusak tempat tahanan	✓	-	-	1	33,33
22	Membebaskan tahanan dgn melawan hukum	✓	-	-	1	33,33
23	Membantu melarikan diri dgn kekerasan	✓	-	-	1	33,33
24	Petugas penjara yg membiarkan tahanan melarikan diri	✓	-	-	1	33,33
25	Pemimpin kerusuhan	✓	-	-	1	33,33
26	Pemimpin menggerakkan orang lain untuk melakukan kerusuhan	✓	-	-	1	33,33

27	Pembakaran bangunan yang dihuni	✓	✓	-	2	66,67
28	Pembakaran bangunan yang tdk dihuni	✓	-	-	1	33,33
29	Pembakaran terhadap bangunan publik	-	✓	✓	2	66,67
30	Pembakaran terhadap selain bangunan	✓	✓	-	2	66,67
31	Pembakaran yang merembet pada bangunan lain	✓	✓	-	2	66,67
32	Merintangi usaha memadamkan kebakaran	✓	-	-	1	33,33
33	Menghancurkan pembangkit gas, listrik, uap	-	✓	-	1	33,33
34	Menghancurkan pembangkit gas, listrik, uap yang menyebabkan kematian/luka berat	-	✓	-	1	33,33
35	Pembakaran/menyebabkan ledakan/banjir berakibat bahaya bagi harta benda	-	-	✓	1	33,33
36	Menimbulkan kebakaran/menyebabkan kehancuran tempat/produk pertanian	-	-	✓	1	33,33
37	Pembakaran/menyebabkan ledakan/banjir berakibat bahaya bagi nyawa seseorang	-	-	✓	1	33,33
38	Pembakaran/menyebabkan ledakan/banjir berakibat kematian	-	-	✓	1	33,33
39	Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada gedung, kereta api, tambang/tempat kediaman	✓	✓	-	2	66,67
40	Menyebabkan banjir terhadap selain di atas	✓	✓	-	2	66,67
41	Merintangi usaha penanggulangan banjir	✓	-	-	1	33,33
42	Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada obyek selain gedung, kereta api dan tambang	-	✓	-	1	33,33
43	Merusak kereta listrik/bangunan listrik	✓	✓	-	2	66,67
44	Membahayakan lalu lintas KA	✓	-	-	1	33,33
45	Perintangan lalu lintas berakibat kematian	-	✓	✓	2	66,67
46	Mengganggu jalan kereta api shg melukai orang lain	-	-	✓	1	33,33
47	Mengganggu jalan kereta api mengakibatkan kematian orang lain	-	-	✓	1	33,33
48	Mengganggu komunikasi kereta api sehingga melukai orang lain/berakibat kematian orang lain	-	-	✓	1	33,33
49	Kejahatan terhadap transportasi laut yang mengakibatkan luka/kematian	-	-	✓	1	33,33
50	Memasukkan/membuat/menjual candu	✓	-	-	1	33,33
51	Mengimpor/menmbuat/menjual perlengkapan candu	✓	-	-	1	33,33
52	Pejabat bea cukai yang mengijinkan masuknya candu dan perlengkapannya	✓	✓	-	2	66,67
53	Menyediakan tempat untuk mengisap candu	✓	-	-	1	33,33
54	Pencemaran air minum	-	✓	-	1	33,33
55	Mencemari sistem penyediaan air minum	✓	✓	-	2	66,67
56	Mencemari sistem penyediaan air minum Mengakibatkan kematian	✓	✓	✓	3	100
57	Merusak sistem penyediaan air minum	✓	-	-	1	33,33
58	Mengedarkan barang berbahaya bagi kesehatan	-	-	✓	1	33,33

	dengan menyembunyikan sifat merusak/bila brakibat kematian					
59	Menularkan penyakit berbahaya	-	-	✓	1	33,33
60	Pemalsuan uang	✓	✓	✓	3	100
61	Pemalsuan uang asing	✓	✓	-	2	66,67
62	Mempersiapkan pembuatan uang palsu	✓	-	-	1	33,33
63	Pemotongan/pengubahan uang	-	-	✓	1	33,33
64	Pejabat umum yang mengizinkan beredarnya uang palsu	-	-	✓	1	33,33
65	Pemalsuan dokumen kekaisaran	✓	-	-	1	33,33
66	Pemalsuan dokumen resmi	✓	✓	-	2	66,67
67	Pembuatan dokumen resmi dengan bertindak seolah-olah pejabat umum	-	✓	-	1	33,33
68	Pemalsuan dokumen pribadi	✓	-	✓	2	66,67
69	Penyisipan keterangan palsu dalam dokumen	-	-	✓	1	33,33
70	Pemalsuan, materai, perangko, merk	-	-	✓	1	33,33
71	Pengedaran surat jaminan	✓	-	-	1	33,33
72	Pemalsuan/Pemakaian salah cap kekaisaran	✓	-	-	1	33,33
73	Pemalsuan/pemakaian salah cap resmi	✓	-	-	1	33,33
75	Sumpah palsu/kesaksian palsu	✓	-	✓	2	66,67
76	Perbuatan cabul dgn paksaan	✓	-	-	1	33,33
77	Pencabulan terhadap anak di bawah umur	✓	-	-	1	33,33
78	Perkosaan	✓	✓	✓	3	100
79	Pencabulan/perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya	✓	✓	✓	3	100
80	Perkosaan berakibat kematian/luka berat	✓	✓	-	2	66,67
81	Perkosaan trhdpr prempuan suci berumur 12-15 th berakibat luka serius/dilakukan oleh orang tua,saudara,pendeta	-	-	✓	1	33,33
82	Perkosaan thdp prempuan suci berumur 12-15 th	-	-	✓	1	33,33
83	Perkosaan dengan penyesatan untuk mengambil keuntungan	-	-	✓	1	33,33
84	Perkosaan terhadap korban di bawah 20 th/korban tidak berdaya/dgn paksaan atau perkosaan trhdpr prempuan suci berumur 12-15 th berakibat kematian	-	-	✓	1	33,33
85	Mucikari yang menalahgunakan remaja berumur 12-20 th tanpa paksaan	-	-	✓	1	33,33
86	Mucikari terhadap orang dewasa dengan paksaan	-	-	✓	1	33,33
87	Bigami	✓	-	-	1	33,33
88	Membuka tempat perjudian	✓	-	-	1	33,33
89	Penggalian kuburan/penghancuran mayat	✓	-	-	1	33,33
90	Penyalahgunaan wewenang aparat peradilan	✓	-	-	1	33,33
91	Hakim yang menerima suap kemudian melanggar kewajiban	✓	-	-	1	33,33

92	Hakim/arbitrator yang memberikan keputusan bertentangan dengan ketentuan mengenai penentuan bersalah perkara pidana	-	-	✓	1	33,33
93	Pejabat umum yang menyelewengkan harta benda yang di bawah pengelolaannya	-	-	✓	1	33,33
94	Pembunuhan	✓	✓	✓	3	100
95	Pembunuhan dalam keadaan emosi / dengan melukai badan	-	-	✓	1	33,33
96	Membunuh orang lain atas permintaan orang lain tersebut	-	✓	-	1	33,33
97	Penganiayaan berakibat kematian	✓	-	-	1	33,33
98	Penganiayaan terhadap orang tua/mertua vertikal ke atas	-	✓	-	1	33,33
99	Penganiayaan berat	-	✓	✓	2	66,67
100	Penganiayaan berakibat korban cacat	-	✓	✓	2	66,67
101	Penganiayaan berat terhadap orang tua/mertua vertikal ke atas cacat	-	✓	-	1	33,33
102	Kekerasan berakibat mati/luka berat	-	✓	-	1	33,33
103	Abortus dgn persetujuan berakibat luka/kematian korban	✓	-	✓	2	66,67
104	Abortus oleh seorang petugas kesehatan dengan persetujuan ibu bayi	✓	-	-	1	33,33
105	Abotus tanpa persetujuan	✓	-	✓	2	66,67
106	Abortus tanpa persetujuan berakibat luka/kematian korban	✓	-	-	1	33,33
107	Meninggalkan orang lain yang merupakan tanggung jawabnya	✓	-	✓	2	66,67
108	Meninggalkan anak di bawah umur/orang cacat yang menjadi tanggung jawabnya berakibat kematian	-	-	✓	1	33,33
109	Meninggalkan orang tua/mertua	✓	-	-	1	33,33
110	Menahan dan mengurung orang lain	✓	-	✓	2	66,67
111	Menahan dan mengurung orang tua/mertua	✓	✓	-	2	66,67
112	Penyalahgunaan oleh pejabat umum/penjara dalam hal menahan seseorang	-	-	✓	1	33,33
113	Penculikan terhadap anak di bawah umur	✓	-	-	1	33,33
114	Penculikan untuk mendapat keuntungan	✓	✓	-	2	66,67
115	Penculikan untuk mendapat keuntungan sebagai kebiasaan	-	✓	-	1	33,33
116	Penculikan untuk mendapat tebusan	✓	-	-	1	33,33
117	Penculikan untuk membawa korban ke luar negeri	✓	✓	-	2	66,67
118	Bantuan terhadap penculikan anak/ mendapat keuntungan	✓	-	-	1	33,33
119	Bantuan thd penculikan utk mendapat tebusan	✓	-	-	1	33,33
120	Menerima, melarikan, menjual orang yang diculik	✓	✓	-	2	66,67
121	Pengangkut penculikan sebagai kebiasaan	-	✓	-	1	33,33

122	Menerima, melarikan, menjual orang yang diculik untuk mendapat tebusan	✓	-	-	1	33,33
123	Pencurian dengan pemberatan	-	✓	-	1	33,33
124	Curat secara bersekutu dan menggunakan senjata	-	✓	-	1	33,33
125	Perampokan	✓	✓	-	2	66,67
126	Perampokan berakibat kematian	-	-	✓	1	33,33
127	Perampokan berakibat luka berat	✓	✓	✓	3	100
128	Perampokan dengan kualifikasi/pemberatan	-	✓	✓	2	66,67
129	Perampokan dengan menculik sebagai sandera	-	✓	-	1	33,33
130	Perampokan dengan menculik sebagai sandera	-	✓	-	1	33,33
131	Perompakan	-	✓	✓	2	66,67
132	Perompakan berakibat luka-luka	-	✓	-	1	33,33
133	Perompakan berakibat kematian orang yang berada di atas kapal yang diseang	-	-	✓	1	33,33
134	Perompakan sebagai kebiasaan	-	✓	-	1	33,33
135	Penadahan sebagai kebiasaan	-	✓	-	1	33,33
136	Perusakan dan penghancuran harta benda, dokumen atau bangunan yang membahayakan jiwa	-	✓	-	1	33,33
137	Menjadi anggota kelompok kejahatan	-	-	✓	1	33,33
138	Penipuan	✓	-	-	1	33,33
139	Perusakan dokumen publik	✓	-	-	1	33,33

Data diolah dari Tabel 12, Tabel 13, dan Tabel 14 tentang tindak pidana-tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus pada KUHP Jepang, Korea dan Argentina

Keterangan Tabel :

- ✓ = Diatur dengan pidana minimum khusus
- = Tidak diatur dengan pidana minimum khusus

Dari Tabel Perbandingan Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus Antara KUHP Jepang, Korea, Argentina di atas, maka terdapat adanya 35 tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus pada dua atau tiga KUHP Negara asing (66,67 - 100%). Tindak pidana - tindak pidana tersebut adalah :

1. Pemimpin/anggota pemberontakan
2. Persiapan/permufakatan jahat pemberontakan
3. Pembakaran terhadap bangunan publik
4. Pembakaran terhadap selain bangunan
5. Pembakaran yang merembet pada bangunan lain
6. Menyebabkan banjir pada gedung, kereta api, tambang/tempat kediaman
7. Menyebabkan banjir terhadap selain di atas
8. Merusak kereta listrik/bangunan listrik
9. Perintangan lalu lintas berakibat kematian
10. Pejabat bea cukai yang mengijinkan masuknya candu dan perlengkapannya
11. Mencemari sistem penyediaan air minum
12. Mencemari sistem penyediaan air minum mengakibatkan kematian
13. Pemalsuan uang
14. Pemalsuan uang asing

15. Pemalsuan dokumen resmi
16. Pemalsuan dokumen pribadi
17. Sumpah palsu/kesaksian palsu
18. Perkosaan
19. Pencabulan/perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya
20. Perkosaan berakibat kematian/luka berat
21. Pembunuhan
22. Penganiayaan berat
23. Penganiayaan berakibat korban cacat
24. Abortus dgn persetujuan berakibat luka/kematian korban
25. Abotus tanpa persetujuan
26. Meninggalkan orang lain yang merupakan tanggung jawabnya
27. Menahan dan mengurung orang lain
28. Menahan dan mengurung orang tua/mertua
29. Penculikan untuk mendapat keuntungan
30. Penculikan untuk membawa korban ke luar negeri
31. Menerima, melarikan, menjual orang yang diculik
32. Perampokan
33. Perampokan berakibat luka berat
34. Perampokan dengan kualifikasi/pemberatan
35. Perompakan

Disebabkan di negara kita sudah terdapat Konsep KUHP baru yang di dalamnya juga tercantum tindak pidana-tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus, maka dalam penelitian juga akan dilakukan perbandingan antara 35 tindak pidana tersebut di atas dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus dalam Konsep KUHP. Hal ini dapat dijadikan masukan untuk mewujudkan KUHP baru di Indonesia.

Untuk mengetahui keberadaan 35 tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus sebagai hasil perbandingan KUHP Negara asing tersebut dalam perumusan Konsep KUHP Indonesia, maka akan disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 24
Keberadaan Tindak Pidana
Yang Diancam dengan Pidana Penjara Minimum Khusus
Yang Merupakan Hasil Perbandingan
Antara KUHP Jepang, Korea, Dan Argentina
Dalam Konsep KUHP Indonesia Tahun 2000

No	TINDAK PIDANA	KEBERADAAN		
		A	B	C
1	Pemimpin/anggota pemberontakan	✓	-	-
2	Persiapan/permufakatan jahat pemberontakan	✓	-	-
3	Pembakaran terhadap bangunan publik	-	✓	-
4	Pembakaran terhadap selain bangunan	-	✓	-
5	Pembakaran yang merembet pada bangunan lain	-	✓	-
6	Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada gedung, kereta api, tambang/tempat kediaman	-	✓	-
7	Menyebabkan banjir shg terjadi penggenangan terhadap obyek selain gedung, kereta, api, tambang dan tempat kediaman	-	✓	-
8	Merusak kereta listrik/bangunan listrik	-	✓	-
9	Perintangan lalu lintas berakibat kematian	-	✓	-
10	Pejabat bea cukai yang mengizinkan masuknya candu dan perlengkapannya	-	-	✓
11	Mencemari sistem penyediaan air minum	-	✓	-
12	Mencemari sistem penyediaan air minum Mengakibatkan kematian	-	✓	-
13	Pemalsuan uang	-	✓	-
14	Pemalsuan uang asing	-	✓	-
15	Pemalsuan dokumen resmi	-	✓	-
16	Pemalsuan dokumen pribadi	-	✓	-
17	Sumpah palsu/kesaksian palsu	-	✓	-
18	Perkosaan	✓	-	-
19	Pencabulan/perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya	✓	-	-
20	Perkosaan berakibat kematian/luka berat	✓	-	-
21	Pembunuhan	✓	-	✓
22	Penganiayaan berat	✓	-	-
23	Penganiayaan berakibat korban cacat tetap	✓	-	-
24	Abortus dgn persetujuan berakibat luka/kematian	-	✓	-
25	Abotus tanpa persetujuan	✓	-	-

26	Meninggalkan orang lain yang merupakan tanggung jawabnya	-	✓	-
27	Menahan dan mengurung orang lain	✓	-	-
28	Menahan dan mengurung orang tua/mertua garis lurus vertikal ke atas.	-	-	✓
29	Penculikan untuk mendapat keuntungan	-	✓	-
30	Penculikan untuk membawa korban ke luar negeri untuk diperdagangkan	-	✓	-
31	Menerima, melarikan, menjual orang yg diculik	✓	-	-
32	Perampokan	✓	-	-
33	Perampokan berakibat luka berat	✓	-	-
34	Perampokan dengan kualifikasi/pemberatan	✓	-	-
35	Perompakan	-	✓	-

Data diolah dari TABEL 11 : Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Konsep KUHP Indonesia 2000 dan TABEL 23 : Perbandingan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Minimum Khusus Pada KUHP Jepang, Korea, Argentina

Keterangan tabel

- A = Sudah diatur dalam Konsep dengan pidana minimum khusus
- B = Sudah diatur dalam Konsep tetapi belum dicantumkan pidana minimum khusus
- C = Belum diatur dalam Konsep

Dari Tabel 24 di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 13 tindak pidana yang diatur dengan pidana minimum khusus dalam Konsep maupun dalam 2 atau 3 KUHP asing. Dengan demikian, sudah tidak menjadi masalah, apabila dalam KUHP Nasional di masa depan, 13 tindak pidana ini perlu untuk diatur dengan pidana minimum khusus, karena dalam Konsep KUHP sendiri, tindak pidana-tindak pidana ini memang sudah diatur dengan pidana minimum khusus. Tindak pidana-tindak pidana tersebut ialah :

1. Pemimpin/anggota pemberontakan
2. Persiapan/permufakatan jahat pemberontakan
3. Perkosaan
4. Pencabulan/perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya
5. Perkosaan berakibat kematian/luka berat
6. Pembunuhan
7. Penganiayaan berat
8. Abotus tanpa persetujuan
9. Menahan dan mengurung orang lain
10. Menerima, melarikan, menjual orang yang diculik
11. Perampokan
12. Perampokan berakibat luka berat
13. Perampokan dengan kualifikasi/pemberatan

Selanjutnya, tindak pidana yang belum diatur dengan minimum khusus dalam Konsep ialah :

1. Pejabat bea cukai yang mengizinkan masuknya candu dan perlengkapannya
- 2.. Menahan dan mengurung orang tua/mertua garis lurus vertikal ke atas.

Dalam hal tindak pidana "Pejabat bea cukai yang mengizinkan masuknya candu dan perlengkapannya", hal ini tidak perlu dicantumkan dalam Konsep, karena sudah diatur secara khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP yaitu dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Kemudian, tindak pidana lain yang belum dicantumkan sekaligus diberikan pidana penjara minimum khusus dalam Konsep adalah "Menahan dan mengurung orang tua/mertua garis lurus vertikal ke atas." Delik ini tercantum dalam KUHP Jepang dan Korea. Kedua negara ini terkenal dengan penghormatan yang kuat terhadap adat dan istiadatnya yang berarti penghormatan yang kuat terhadap orang tua atau nenek moyangnya. Hal ini yang menjadi kemungkinan menjadi dasar dicantumkannya pidana penjara minimum khusus pada delik tersebut.

Penulis berpendapat terhadap delik “Menahan dan mengurung orang tua/mertua garis lurus vertikal ke atas”, tidak perlu dicantumkan dalam Konsep karena untuk dicantumkan sebagai delik yang diancam dengan pidana minimum khusus dalam Konsep KUHP Indonesia, maka delik tersebut harus dianggap dapat menimbulkan keresahan dan membahayakan masyarakat.

Delik “Menahan dan mengurung orang tua/mertua garis lurus vertikal ke atas” tersebut tampaknya hanya akan merugikan keluarga terdakwa dan bukan masyarakat secara keseluruhan, sehingga bukan termasuk delik yang dianggap dapat meresahkan masyarakat.

Dalam hal tindak pidana yang diberikan pidana minimum khusus pada 2 atau 3 KUHP negara asing yang sudah diatur dalam Konsep tetapi belum diberikan pidana penjara minimum khusus ada 19 macam. Tindak pidana – tindak pidana tersebut tidak sama persis perumusan deliknya dalam Konsep, akan tetapi pada intinya sama atau tercakup dalam Konsep.

Adapun tindak pidana-tindak pidana tersebut adalah :

1. Pembakaran terhadap bangunan publik
2. Pembakaran terhadap selain bangunan
3. Pembakaran yang merembet pada bangunan lain
4. Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada gedung, kereta api, tambang/tempat kediaman

5. Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan terhadap obyek selain gedung, kereta, api, tambang dan tempat kediaman
6. Merusak kereta listrik/bangunan listrik
7. Perintangan lalu lintas berakibat kematian
8. Mencemari sistem penyediaan air minum
9. Mencemari sistem penyediaan air minum mengakibatkan kematian
- 10.. Pemalsuan uang
11. Pemalsuan uang asing
12. Pemalsuan dokumen resmi
13. Pemalsuan dokumen pribadi
14. Sumpah palsu/kesaksian palsu
15. Abortus dengan persetujuan berakibat luka/kematian korban
16. Meninggalkan orang lain yang merupakan tanggung jawabnya
17. Penculikan untuk mendapat keuntungan
18. Penculikan untuk membawa korban ke luar negeri untuk diperdagangkan
19. Perompakan

Menurut penulis, di antara 19 tindak pidana yang belum diberi pidana minimum khusus dalam Konsep tersebut, seyogyanya sudah mulai dipikirkan untuk dikenai dengan pidana minimum khusus dengan memperhatikan pedoman dapat dikenainya suatu tindak pidana dengan pidana penjara minimum khusus.

Barda Nawawi Arief¹⁶⁵ menyatakan bahwa dalam menetapkan minimum khusus, perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain : menimbulkan bahaya kerusakan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati). Pada umumnya delik-delik yang “sangat serius” sajalah yang diberi ancaman minimum khusus.

Apabila melihat pembagian kategori delik pada Rancangan Konsep, maka yang dimaksud dengan delik yang “sangat serius” tersebut adalah delik yang diancam dengan maksimum paling rendah 7 tahun, dan minimum paling rendah 2 tahun.¹⁶⁶ Apabila batas maksimum tersebut yang dijadikan patokan untuk pemberian minimum khusus, maka delik yang “sangat serius” tersebut adalah delik yang mempunyai maksimum paling rendah 7 tahun.

Dengan demikian, pedoman untuk menentukan suatu tindak pidana dapat diatur dengan pidana minimum khusus ialah :

- 1) Tindak pidana tersebut diancam dengan maksimum paling rendah 7 tahun.
- 2) Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolsqualifizierte delikte*) seperti menimbulkan bahaya bagi kerusakan umum, dan bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati.

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 160.

¹⁶⁶ Lihat dalam Barda Nawawi Arief Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal 159 mengenai pola lamanya minimum khusus menurut Konsep.

Dengan melihat kriteria penentuan mengenai batas maksimum terendah selama 7 tahun, maka di bawah ini akan disajikan tabel lamanya maksimum pidana penjara terhadap 19 tindak pidana tersebut beserta pasal pengaturannya dalam Konsep KUHP 2000

TABEL 25
Lamanya Maksimum Pidana Penjara
dari 19 Tindak Pidana dalam Konsep KUHP 2000
yang Perlu Diatur dengan Pidana Penjara Minimum Khusus

No.	Tindak Pidana	Pasal Dlm Konsep	Maksimum Penjara
1	Pembakaran terhadap bangunan publik	298	9 th
2	Pembakaran terhadap selain bangunan	298	9 th
3	Pembakaran yang merembet pada bangunan lain	298	9 th
4	Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada gedung, kereta api, tambang/tempat kediaman	298	9 th
5	Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan terhadap obyek selain gedung, kereta, api, tambang dan tempat kediaman	298	9 th
6	Merusak kereta listrik/bangunan listrik	311	7 th / denda
7	Perintangan lalu lintas berakibat kematian	313 huruf b	15 th
8	Mencemari sistem penyediaan air minum	327 ayat (1)	12 th
9	Mencemari sistem penyediaan air minum berakibat kematian	327 ayat (2)	15 th
10	Pemalsuan uang	377 huruf a	15 th
11	Pemalsuan uang asing	377 huruf b	15 th
12	Pemalsuan dokumen resmi	395	6 th
13	Pemalsuan dokumen pribadi	395	6 th
14	Sumpah palsu/kesaksian palsu	375	7 th / denda
15	Abortus dengan persetujuan berakibat luka/kematian	481 ayat (2)	10 th
16	Meninggalkan orang lain yang merupakan tanggung jawabnya	442 ayat (1)	3 th / denda
17	Penculikan untuk mendapat keuntungan	460	12 th
18	Penculikan untuk diperdagangkan	460	12 th
19	Perompakan	582	12 th

Data diolah dari Konsep KUHP 2000 dan Tabel 24 : Keberadaan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Minimum Khusus Sebagai Hasil dari Perbandingan KUHP Jepang, Korea, dan Argentina dalam Konsep KUHP Indonesia Tahun 2000

Dari tabel di atas, maka tindak pidana dalam Konsep tersebut yang mempunyai ancaman maksimum pidana penjara 7 tahun (tanpa dialternatifkan dengan pidana denda) adalah :

1. Pembakaran terhadap bangunan publik
2. Pembakaran terhadap selain bangunan
3. Pembakaran yang merembet pada bangunan lain
4. Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada gedung, kereta api, tambang/tempat kediaman
5. Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan terhadap obyek selain gedung, kereta, api, tambang dan tempat kediaman
6. Perintangan lalu lintas berakibat kematian
7. Mencemari sistem penyediaan air minum
8. Mencemari sistem penyediaan air minum berakibat kematian
9. Pemalsuan uang
10. Pemalsuan uang asing
11. Abortus dengan persetujuan berakibat luka/kematian
12. Penculikan untuk mendapat keuntungan
13. Penculikan untuk membawa korban ke luar negeri untuk diperdagangkan
14. Perompakan

Kemudian apabila memperhatikan kriteria selanjutnya bahwa suatu tindak pidana yang dikenai pidana minimum khusus adalah tindak pidana yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*), maka terhadap 14 tindak pidana dalam Konsep yang diancam dengan maksimum pidana paling rendah 7 tahun tersebut, yang termasuk dalam tindak pidana yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya adalah :

1. Pembakaran terhadap bangunan publik
2. Pembakaran terhadap selain bangunan
3. Pembakaran yang merembet pada bangunan lain
4. Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada gedung, kereta api, tambang/tempat kediaman
5. Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan terhadap obyek selain gedung, kereta, api, tambang dan tempat kediaman
6. Perintangan lalu lintas berakibat kematian
7. Mencemari sistem penyediaan air minum
8. Mencemari sistem penyediaan air minum berakibat kematian
9. Pemalsuan uang
10. Pemalsuan uang asing
11. Abortus dengan persetujuan berakibat luka/kematian

Menurut penulis, 11 tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diperberat oleh akibatnya. Hal ini disebabkan :

- Tindak pidana pembakaran terhadap bangunan publik, pembakaran terhadap selain bangunan, pembakaran yang merembet pada bangunan lain, menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada gedung, kereta api, tambang/tempat kediaman dan menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan terhadap obyek selain gedung, kereta, api, tambang dan tempat kediaman tercakup dalam perumusan Pasal 298 Konsep. Tindak pidana-tindak pidana ini dan tindak pidana mencemari sistem penyediaan air minum di samping dapat menimbulkan bahaya bagi kerusakan umum, juga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, lingkungan bahkan nyawa.
- Pada tindak pidana pemalsuan uang dan pemalsuan uang asing, maka tindak pidana ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini disebabkan uang merupakan alat pembayaran yang menjadi elemen pokok dari dinamika masyarakat sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila terjadi pemalsuan uang, maka dinamika masyarakat tersebut dapat terganggu karena terjadi kecemasan akan keaslian uang yang beredar, sehingga beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi untuk pemenuhan kebutuhan menjadi terhambat.

- Kemudian terhadap tindak pidana perintang lalu lintas berakibat kematian, mencemari sistem penyediaan air minum berakibat kematian, abortus dengan persetujuan berakibat luka/kematian, dalam hal ini jelas akibatnya bahwa tindak pidana tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa.

Dengan demikian, 11 macam tindak pidana tersebut dapat diatur dengan pidana penjara minimum khusus, karena di samping sudah mempunyai ancaman maksimum pidana penjara di atas 7 tahun, tindak pidana-tindak pidana tersebut dapat diperberat oleh akibatnya. Oleh karena itu, pada KUHP Nasional di masa yang akan datang, 11 macam tindak pidana tersebut seyogyanya mulai diperhatikan untuk diatur dengan pidana penjara minimum khusus.

b. Formulasi Pola Lamanya Minimum Khusus Terhadap Pidana Penjara

Dalam uraian di atas telah dipaparkan mengenai lamanya pidana minimum khusus berikut pola lamanya minimum khusus pada Konsep KUHP Indonesia dan KUHP Negara Asing. Dalam tabel di bawah ini, akan disajikan perbandingan pola minimum khusus pada Konsep KUHP dan KUHP Negara asing.

TABEL 26
Perbandingan Pola Pidana Penjara Minimum Khusus
pada Konsep KUHP Indonesia dan KUHP Jepang,
Korea dan Argentina

No	KUHP	Pola Minimum Khusus
1	Konsep KUHP Indonesia	1 th - 5 th
2	Jepang	3 bln - 10 th
3	Korea	1 th - 10 th
4	Argentina	1 bln - 15 th

Data diolah dari Tabel 17, Tabel 19, Tabel 21 dan Tabel 23 tentang Pola Lamanya Pidana Minimum Khusus pada Konsep KUHP Indonesia, KUHP Jepang, Korea dan Argentina

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rentang minimum khusus yang paling rendah terdapat dalam pola minimum khusus Konsep KUHP Indonesia, sedangkan rentang minimum khusus yang tertinggi adalah pada KUHP Argentina.

Menurut penulis rentang minimum khusus dalam Konsep adalah yang paling rasional. Hal ini disebabkan :

Batas terendah minimum khusus untuk pidana penjara dalam Konsep sudah sesuai apabila dihubungkan dengan kecenderungan internasional yang menghendaki dibatasinya kemungkinan penjatuhan pidana penjara pendek karena pidana penjara pendek akan membawa efek-efek negatif dan kurang menunjang sistem pembinaan masyarakat serta dapat mengganggu sistem *Standard Minimum Rules (SMR)*.¹⁶⁷

Batas tertinggi minimum khusus untuk pidana penjara dalam Konsep (1 tahun) merupakan yang paling rendah apabila dibandingkan dengan batas tertinggi minimum khusus pada KUHP asing (Jepang : 10 tahun, Korea : 10 tahun, Argentina : 1 tahun). Menurut penulis batas tertinggi minimum khusus pada KUHP asing tersebut terlalu berat karena pidana penjara merupakan salah satu pidana yang dipandang cukup berat dan riskan. Apalagi dengan melihat bahwa ada kecenderungan internasional untuk menempuh kebijakan yang selektif dan limitatif dalam menggunakan pidana penjara.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Lihat dalam Barda Nawawi Arief Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal 124-125 mengenai pokok-pokok pemikiran pola minimum khusus paling rendah 1 (satu) tahun menurut Konsep.

¹⁶⁸ Lihat kembali dalam Barda Nawawi Arief Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal 124 mengenai pokok-pokok pemikiran pola minimum khusus paling rendah 1 (satu) tahun menurut Konsep

Apabila melihat variasi lamanya¹⁶⁹ pidana minimum khusus dalam Konsep dan KUHP negara asing, maka dapat dilihat adanya variasi lamanya pidana minimum khusus yang berbeda. Dalam Konsep KUHP Indonesia hanya ada 5 variasi (4 variasi apabila sesuai dengan rancangan), KUHP Jepang terdapat 8 variasi, KUHP Korea 6 variasi, dan KUHP Argentina terdapat 11 variasi. Variasi yang banyak tentunya menimbulkan suatu pola yang rumit dan sulit untuk dimengerti oleh penerap undang undang. Hal tersebut menjadi bertambah sulit dan rancu, apabila variasi tersebut tidak disertai dengan pola yang seragam.

Kemudian berdasarkan perbandingan antara Konsep KUHP Indonesia dan KUHP negara asing, maka pola lamanya minimum khusus pidana penjara dalam Konsep adalah pola yang paling seragam dan paling sedikit terdapat kejanggalan.

Dengan demikian, pola lamanya pidana penjara minimum khusus yang dianut dalam Konsep dapat dijadikan sebagai acuan pola minimum khusus untuk pidana penjara dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang, karena :

- a) Hanya ada sedikit variasi lamanya minimum khusus.
- b) Terletak dalam rentang yang rasional untuk pidana penjara.
- c) Paling sedikit terdapat kejanggalan.

¹⁶⁹ Variasi lamanya minimum pidana ini dapat dilihat pada Tabel 17, Tabel 19, Tabel 21 dan Tabel 23 tentang Pola Lamanya Pidana Minimum Khusus pada Konsep KUHP Indonesia, KUHP Jepang, Korea dan Argentina

Akan tetapi pola lamanya pidana minimum khusus dalam Konsep KUHP 2000 tersebut seharusnya mengacu pada pola yang dirancang untuk Konsep KUHP Nasional. Adapun pola lamanya pidana minimum khusus yang dirancang untuk Konsep KUHP Nasional adalah sebagai berikut :

TABEL 27
Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum Khusus
Yang Dirancang untuk Konsep KUHP Indonesia

No.	Pidana Penjara	
	Maksimum	Minimum
1	Seumur Hidup / Mati	5 th
2	12 th - 15 th	3 th
3	7 th - 10 th	2 th
4	4 th - 7 th	1 th

Sumber Data : Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 159

Apabila melihat pola lamanya pidana minimum khusus dalam Konsep KUHP 2002 dan rancangan pola lamanya pidana minimum khusus untuk Konsep KUHP, maka ditemukan adanya perbedaan dalam pola lamanya pidana minimum khusus dalam Konsep KUHP 2002. Perbedaan tersebut adalah :

- Pada Konsep KUHP 2000, terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus 5 tahun, maka maksimum pidananya adalah mati, seumur hidup, atau pidana penjara 15

tahun sampai 20 tahun. Padahal dalam Pola Rancangan Konsep, terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus 5 tahun, maka maksimum pidananya hanya pidana mati dan seumur hidup, dan tidak ada pidana penjara untuk waktu tertentu.

- Pada Konsep KUHP 2000, terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus 4 tahun, maka maksimum pidananya adalah penjara 15 tahun. Sedangkan dalam Rancangan Konsep tidak diatur maksimum pidana untuk minimum khusus selama 4 tahun.
- Pada Konsep KUHP 2000, terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus 3 tahun, maka maksimum pidananya adalah penjara 12 tahun sampai 20 tahun. Sedangkan pada Rancangan Konsep, terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus 3 tahun, maka maksimum pidananya adalah penjara 12 tahun sampai 15 tahun.
- Pada Konsep KUHP 2000, terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus 1 tahun, maka maksimum pidananya adalah penjara 5 tahun sampai 7 tahun. Sedangkan pada Rancangan Konsep terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus 1 tahun, maka maksimum pidananya adalah penjara 4 tahun sampai 7 tahun.

Dalam hal perbedaan tentang adanya maksimum pidana 20 tahun untuk minimum pidana 5 tahun pada Konsep 2000, dimana maksimum pidana 20 tahun ini tidak terdapat dalam Pola Rancangan Konsep, penulis berpendapat bahwa hal ini dapat dilakukan karena ada kemungkinan merupakan perkembangan dari pola lamanya pidana minimum khusus dari perancang Konsep KUHP untuk KUHP Nasional di masa depan. Hal ini juga terjadi pada perbedaan tentang adanya maksimum pidana 5-7 tahun untuk minimum pidana 1 tahun pada Konsep 2000, sedangkan pada Rancangan Konsep maksimum pidana 4-7 tahun untuk minimum pidana 1 tahun. Dalam hal terakhir ini terjadi kenaikan batas terendah maksimum pidana dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Di samping itu, kedua perbedaan di atas menurut penulis tidak akan menimbulkan kerancuan keseragaman pola lamanya pidana minimum khusus dalam Konsep KUHP Nasional, karena pada delik-delik yang diancam dengan pidana minimum 1 tahun dan 5 tahun sudah mempunyai batas maksimum pidana sendiri, dengan catatan diadakan perubahan terhadap delik yang mempunyai maksimum pidana 15 tahun untuk minimum pidana 5 tahun.

Adapun terhadap perbedaan yang lain antara pola lamanya pidana minimum khusus dalam Konsep KUHP 2000 dengan Pola Rancangan Konsep, menurut penulis, perbedaan tersebut menimbulkan kejanggalan dalam pola lamanya pidana minimum khusus pada Konsep 2000. Kejanggalan tersebut antara lain terletak pada :

- Adanya delik-delik yang diancam dengan pidana minimum khusus 4 tahun dan maksimum 15 tahun. Hal ini tentunya menimbulkan kerancuan dengan delik-delik yang diancam dengan pidana minimum khusus 5 tahun dan maksimum 15 tahun. Dengan demikian, terhadap delik dengan maksimum pidana yang sama, berlaku minimum pidana yang berbeda.
- Adanya delik yang diancam dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 20 tahun, justru diancam dengan maksimum pidana yang sama atau bahkan jauh lebih berat dari delik yang diancam dengan minimum pidana 4 tahun dan maksimum 15 tahun. Dengan demikian, terdapat delik yang diancam dengan pidana minimum lebih rendah, justru diancam dengan maksimum pidana yang sama atau bahkan jauh lebih berat dari delik yang diancam dengan minimum pidana yang lebih ringan atau lebih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat 4 delik dalam Konsep 2000 yang mencantumkan maksimum pidana 15 tahun untuk minimum pidana 4 tahun. Keempat delik tersebut diatur dalam Pasal 430 ayat (2), Pasal 631, Pasal 632 dan Pasal 633.

Kemudian dalam hal delik yang diatur dengan maksimum pidana 15 tahun dan minimum pidana 5 tahun, terdapat 4 macam delik dalam Konsep KUHP 2000, yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1), Pasal 426 ayat (3), Pasal 470 ayat (3) dan Pasal 480 ayat (3).

Sedangkan terhadap delik dengan maksimum pidana selama 20 tahun dan minimum pidana selama 3 tahun, penulis menemukan 2 macam delik dalam Konsep KUHP 2000 yang diatur dalam Pasal 231 ayat (2) dan Pasal 553.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pola pemidanaan yang seragam, terhadap lamanya minimum khusus pidana penjara dalam Konsep KUHP Indonesia tersebut, harus diadakan perubahan terhadap ancaman pidana pada pasal-pasal yang menimbulkan kejanggalan pada pola lamanya pidana penjara minimum khusus dalam Konsep KUHP tersebut.

Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Terhadap delik yang mencantumkan maksimum pidana 15 tahun untuk minimum pidana 5 tahun tersebut, maka minimum pidananya diturunkan menjadi 4 tahun. Hal ini disebabkan keempat delik tersebut merupakan pemberatan dari delik tertentu yang diancam dengan maksimum pidana 12 tahun untuk minimum pidana 3 tahun.

Menurut penulis, pemberatan minimum khusus selama 2 tahun terhadap pemberatan maksimum pidana selama 3 tahun adalah terlalu tinggi atau berat dan kurang sesuai dengan rasio lamanya perbandingan antara maksimum dan minimum pidana. Seharusnya terhadap peningkatan maksimum pidana selama 3 tahun, maka cukup dilakukan pemberatan selama 1 tahun terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana 12 tahun untuk minimum pidana 3 tahun. Dengan demikian, terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana 15 tahun, maka minimum pidananya adalah 4 tahun.

- 2) Terhadap 2 delik dengan maksimum pidana selama 20 tahun dan minimum pidana selama 3 tahun, maka seharusnya ancaman pidana minimumnya ditingkatkan menjadi 5 tahun. Hal ini disebabkan delik tersebut diatur pada Bab tentang Tindak Pidana dalam Buku II Konsep yang hampir semua deliknya diatur dengan maksimum pidana 20 tahun, yaitu :

- Pasal 231 ayat (2) tercantum dalam Bab I (Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Bernegara) Buku II Konsep yang sebagian besar deliknya diancam dengan maksimum pidana paling rendah 20 tahun.
- Pasal 553 tercantum dalam Bab XXIX (Tindak Pidana Jabatan) Buku II Konsep yang semua deliknya diancam dengan maksimum pidana 20 tahun.

Apabila perubahan sebagaimana hal di atas dilakukan, maka akan tercipta pola lamanya minimum pidana penjara dalam Konsep KUHP yang seragam, sehingga tercipta suatu formulasi pola lamanya minimum khusus dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang. Adapun formulasi pola lamanya minimum khusus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 28
Formulasi Pola Lamanya Minimum Khusus
Terhadap Pidana Penjara

No.	Pidana Penjara	
	Maksimum	Minimum
1	20 th / Seumur Hidup/ Mati	5 th
2	15 th	4 th
3	12 th - 15 th	3 th
4	7 th – 10 th	2 th
5	5 th - 7 th	1 th

Data diolah dari Tabel 15, Tabel 16 dan Tabel 27

Dengan demikian, dari tabel di atas, dapat ditentukan formulasi pola lamanya minimum khusus untuk pidana penjara dalam Konsep KUHP, yaitu :

- 1) *terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 5 tahun ;*
- 2) *terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 15 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 4 tahun ;*
- 3) *terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 12 sampai 15 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 3 ;*
- 4) *terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 7 sampai 10 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 2 tahun ;*
- 5) *terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 5 sampai 7 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 1 tahun.*

c. Formulasi Aturan Penerapan Pidana Penjara Minimum Khusus

1) Aturan Peringatan Pidana Penjara Minimum Khusus

Berdasarkan hasil perbandingan antara Konsep KUHP Indonesia dan KUHP negara asing tersebut di atas, maka dapat disimpulkan *hanya Konsep KUHP Indonesia yang mencatumkan aturan peringatan pidana penjara minimum khusus secara tegas*. Hal ini disebabkan pada KUHP Jepang, Korea pencantuman pengaturan terhadap peringatan pidana minimum khusus tidak secara tegas diatur, tetapi hanya timbul penafsiran bahwa ada kemungkinan dilakukan peringatan terhadap pidana minimum khusus. Sedangkan pada KUHP Argentina, aturan peringatan tersebut terkesan tidak jelas dan cenderung hanya dapat diterapkan pada maksimum pidananya.

Pada Konsep telah diatur tentang faktor-faktor yang memperingan pidana sekaligus peringatan pidana yang juga berlaku terhadap pidana minimum khusus. Faktor-faktor yang memperingan pidana tersebut tercantum dalam Pasal 124 dan besarnya peringatan sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman minimum tercantum dalam Pasal 125 ayat (3)

Dengan demikian, aturan peringanan terhadap pidana penjara minimum khusus dalam Konsep KUHP Nasional 2000 dapat dijadikan sebagai acuan mengenai ketentuan peringanan pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang.

Formulasi yang tegas dan jelas terhadap peringanan pidana penjara minimum khusus, dapat diwujudkan dengan redaksional sebagai berikut :

- *Peringanan atau pengurangan pidana berlaku terhadap maksimum pidana.*
- *Terhadap tindak pidana - tindak pidana tertentu yang diancam dengan minimum pidana, maka peringanan atau pengurangan ini juga berlaku terhadap minimum pidana dengan ketentuan peringanan atau pengurangan yang sama terhadap maksimum pidananya.*

2) Aturan Pemberatan Pidana Penjara Minimum Khusus

Apabila melihat perbandingan aturan pemberatan pidana minimum khusus pada Konsep dan KUHP negara asing, maka *dalam Konsep maupun dalam ketiga KUHP negara asing tidak terdapat aturan pemberatan terhadap pidana penjara minimum khusus.*

Menurut penulis, tidak dicantumkannya aturan pemberatan dalam Konsep tersebut disebabkan salah satu ide dari diadakannya minimum khusus tersebut adalah untuk pemberatan terhadap delik-delik tertentu. Dengan demikian, Konsep tidak mencantumkan aturan pemberatan terhadap pidana minimum khusus karena sebenarnya "sudah ada pemberatan" dengan adanya minimum khusus terhadap delik-delik tertentu tersebut. Hal ini disebabkan pencantuman pidana minimum khusus sudah dianggap merupakan suatu pemberatan dari minimum umum pidana.

Apabila Konsep mengatur pemberatan terhadap pidana minimum khusus, maka terkesan akan ada dua kali pemberatan terhadap delik-delik tertentu yang diperberat karena terdapat faktor-faktor pemberat pidana.

Di samping itu, apabila melihat delik-delik tertentu yang diancam pidana minimum khusus pada Konsep, maka apabila terdapat suatu delik (pokok) yang disertai dengan pemberatan

(menimbulkan luka atau kematian) maka di samping bertambah ancaman maksimumnya, maka ancaman pidana minimumnya juga mengalami penambahan.

Akan tetapi dalam pemberatan pidana penjara minimum khusus ini tercantum pada salah satu ketentuan *concursum* dalam Konsep yaitu dalam Pasal 132 ayat (3) Konsep, yang dalam hal perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana minimum, maka terdapat pemberatan pada pidana minimum khususnya yaitu sebesar adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Dengan adanya pengecualian pemberatan pidana penjara minimum khusus terhadap *concursum* tersebut, maka menurut penulis apabila dalam faktor yang lain tidak diatur pemberatan terhadap pidana minimum khusus, maka seharusnya hal tersebut diatur dalam suatu ketentuan yang tegas. Hal ini untuk menghindari penafsiran bahwa pemberatan terhadap maksimum pidana juga dapat berlaku pada minimum pidana (dengan melihat pemberatan pidana minimum pada *concursum* tersebut)

Menurut penulis, pada KUHP nasional di masa yang akan datang diperlukan suatu pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pemberatan pidana minimum khusus. Hal ini untuk dapat lebih mudah menerapkan pidana minimum khusus apabila ditemui faktor-faktor yang memperberat dalam hal dilakukannya suatu tindak pidana, sehingga dapat dihindari disparitas penjatuhan lamanya pidana terhadap beberapa delik yang dianggap sama bobot atau kualitasnya. Pengaturan mengenai pemberatan pidana minimum khusus tidak diatur secara tegas dan jelas, baik dalam Konsep maupun dalam tiga KUHP asing. Dengan demikian, diperlukan formulasi pengaturan mengenai pemberatan pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional di masa depan.

Apabila melihat ketentuan dalam Konsep yang tercantum dalam Pasal 127 dinyatakan bahwa pemberatan pidana berupa penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana dan dengan berdasar uraian di atas, maka perlu dicantumkan secara tegas juga bahwa pemberatan pidana tersebut tidak berlaku terhadap minimum pidananya.

Dengan demikian dalam perumusan dalam Pasal 127 Konsep tersebut perlu ditambah dengan ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa pemberatan pidana tidak berlaku

terhadap minimum pidananya. Penambahan tersebut dapat dirumuskan dengan redaksional sebagai berikut :

“Pemberatan pidana berlaku terhadap maksimum pidana dan terhadap tindak-tindak pidana tertentu yang diancam dengan minimum pidana, maka pemberatan ini tidak berlaku terhadap minimum pidana yang dicantumkan untuk tindak pidana-tindak pidana tersebut.”

3) Pengecualian Berlakunya Pidana Minimum Khusus Terhadap Pelaku Delik Di Bawah Umur

Berdasarkan perbandingan dengan KUHP negara asing mengenai pengecualian terhadap pelaku delik di bawah umur, maka pengaturan dalam Konsep adalah yang paling jelas dan tegas dibandingkan dengan KUHP Jepang, Korea dan Argentina.

Pada Konsep masalah ini tercantum dalam Pasal 117 yang perumusannya adalah sebagai berikut :

“Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) tidak berlaku bagi anak.”

Dengan demikian, untuk pelaku delik di bawah umur, Konsep mengatur pengecualian (peringanan) terhadap minimum pidana penjaranya, yaitu terhadap orang berumur 12-18 tahun yang melakukan delik yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus, maka batas minimum khusus itu ditiadakan.

Di samping itu, masalah pengecualian terhadap pelaku delik di bawah umur juga telah dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pada Pasal 19 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut dinyatakan :

Pasal 19

"Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun."

Sedangkan pada Pasal 24 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut Anti Teoris dinyatakan :

"Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun."¹⁷⁰

Dari kedua pasal tersebut di atas, maka dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dinyatakan secara tegas bahwa pidana minimum khusus tidak berlaku terhadap pelaku delik yang berusia di bawah 18 tahun.

¹⁷⁰ Beberapa pasal yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut adalah tindak pidana terorisme sendiri dan beberapa pasal yang tercantum dalam Pasal 24 adalah dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme

Dengan demikian, sudah terdapat keseragaman antara Konsep KUHP Nasional dengan salah satu perundang-undangan di luar KUHP mengenai masalah pengecualian pidana minimum khusus terhadap pelaku delik di bawah umur. Oleh karena itu, formulasi dalam Konsep mengenai pengecualian pidana penjara minimum khusus terhadap pelaku delik di bawah umur sudah dapat dijadikan acuan dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang.

Adapun formulasi pengecualian pidana penjara minimum khusus terhadap pelaku delik di bawah umur, dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apabila tindak pidana yang diancam pidana penjara dengan minimum khusus dilakukan oleh seorang anak di bawah umur, maka minimum khusus pidana penjara tersebut dianggap tidak berlaku.”

Pada akhirnya, dapat dinyatakan dengan adanya aturan pemidanaan yang jelas dan tegas terhadap penerapan pidana penjara minimum khusus baik mengenai peringanan, pemberatan dan pengecualian terhadap pelaku delik di bawah umur dalam Konsep akan dapat mewujudkan KUHP nasional di masa yang akan datang sebagai suatu KUHP yang sistematis dan terarah dalam melaksanakan sistem pidana penjara minimum khusus.

Hal tersebut tentunya akan dapat menunjang pembaharuan hukum pidana secara total sebagai tekad dari bangsa Indonesia untuk mempunyai Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berasal dari kepribadian bangsa dan merupakan hasil karya anak bangsa yang patut untuk disejajarkan dengan hasil karya dari bangsa lain dalam hukum pidana.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Tesis ini menyajikan dua permasalahan, yaitu kebijakan pidana minimum khusus dalam perundang-undangan di Indonesia yang ada selama ini dan kebijakan formulasi pidana minimum khusus dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kedua pokok permasalahan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan mencantumkan pidana minimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP pada umumnya tidak didasarkan pada pengaturan mengenai pola lamanya pidana minimum khusus yang seragam serta tidak disertai dengan aturan penerapan berlakunya pidana minimum khusus. Hal ini menimbulkan masalah karena dalam merumuskan ancaman pidana, KUHP menganut sistem maksimum, dan tidak terdapat aturan atau sistem pembedaan yang menerapkan sistem minimum khusus. Walaupun demikian, terdapat beberapa undang-undang yang mencantumkan pola lamanya pidana penjara yang seragam, yaitu UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, kebijakan formulasi tentang pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang seyogyanya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Dasar penentuan tindak pidana-tindak pidana yang diatur dengan pidana penjara minimum khusus adalah :

- 1) Tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori delik yang "sangat serius", yaitu delik diancam dengan maksimum pidana penjara paling rendah 7 tahun.
- 2) Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgqualifizierte delikte*) seperti menimbulkan bahaya bagi kerusakan umum, dan bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati.

Tindak pidana - tindak pidana yang dapat diatur dengan pidana penjara minimum khusus, selain yang telah diatur dalam Konsep KUHP tahun 2000 adalah :

1. Pembakaran terhadap bangunan publik
2. Pembakaran terhadap selain bangunan
3. Pembakaran yang merembet pada bangunan lain
4. Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan pada gedung, kereta api, tambang/tempat kediaman
5. Menyebabkan banjir sehingga terjadi penggenangan terhadap obyek selain gedung, kereta, api, tambang dan tempat kediaman

6. Perintangan lalu lintas berakibat kematian
 7. Mencemari sistem penyediaan air minum
 8. Mencemari sistem penyediaan air minum berakibat kematian
 9. Pemalsuan uang
 10. Pemalsuan uang asing
 11. Abortus dengan persetujuan berakibat luka/kematian
- b. Pola lamanya pidana minimum khusus seharusnya disusun dalam suatu pola yang seragam dengan memperhatikan perimbangan antara maksimum dan minimum pidananya. Formulasi pola lamanya pidana penjara minimum khusus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
- 1) terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 5 tahun ;
 - 2) terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 15 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 4 tahun ;
 - 3) terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 12 sampai 15 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 3 ;
 - 4) terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 7 sampai 10 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 2 tahun ;

5) terhadap delik yang diancam dengan maksimum pidana penjara 5 sampai 7 tahun, maka minimum khusus pidana penjaranya adalah 1 tahun.

c. Aturan penerapan pidana minimum khusus, yang antara lain berupa peringanan dan pemberatan pidana serta pengecualian berlakunya pidana minimum khusus terhadap pelaku delik di bawah umur seyogyanya diatur dalam suatu ketentuan yang jelas dan tegas sehingga dapat mempermudah penafsiran dan penerapan berlakunya pidana minimum khusus.

B. Saran

1. Pencantuman aturan penerapan pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang supaya secepatnya dilakukan, karena sudah cukup banyak perundang-undangan di luar KUHP yang mencantumkan pengaturan pidana minimum khusus tanpa disertai dengan aturan penerapannya. Di samping itu, dengan timbulnya kejahatan-kejahatan baru yang dapat dianggap sebagai kejahatan yang membahayakan masyarakat, maka ancaman pidana minimum khusus sangat dimungkinkan untuk dikenakan kepada kejahatan-kejahatan tersebut, sehingga hal tersebut memerlukan aturan dalam penerapannya.
2. Mengingat bahwa pidana minimum khusus ini merupakan suatu hal yang baru dalam sistem pidana di Indonesia, maka sebaiknya pengaturan pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang seyogyanya diletakkan dalam suatu pengaturan

yang khusus atau apabila diatur dalam beberapa pasal, maka sebaiknya letak penyebaran pasal-pasal tersebut dalam Buku I (Aturan Umum) tidak terlalu jauh, sehingga akan dapat lebih mempermudah pemahaman dan penerapan pidana minimum khusus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, ***Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia***, Alumni, Bandung, 1976,
- Abidin, A.Z., ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Abidin, A.Z., Andi Hamzah, ***Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik***, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002
- Aftergood, Steven, ***Secrecy And Accountability in U.S. Intelligence***, Center of International Policy Seminar on Intelligence Reform, 1996.
- Alkostar, Artidjo dan M. Sholeh Amin, ***Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional***, Rajawali, Jakarta, Tahun 1986.
- Ancel, Marc, ***Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem***, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.
- Andenaes, J., ***The General Part of the Criminal Law of Norway***, 1965.
- Arief, Barda Nawawi, ***Perlindungan HAM dan Tindak Kekerasan Dalam Penegakan Hukum Pidana***, Bahan Diskusi Panel RUU Kepolisian, 15 Juli 1997, Fakultas Hukum Undip.
- , ***Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara***, Ananta, Semarang, 1993.
- , ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , ***Perbandingan Hukum Pidana***, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- , ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, UNDIP, Semarang, 2000.

- , ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , ***Perbandingan Hukum Pidana***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , ***Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana***, Raja GrafindoPersada, 2003
- , ***Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana***, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Asshidiqie, Jimly, ***Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia***, Angkasa, Bandung, 1997.
- Atmasasmita, Romli, ***Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi***, Mandarmaju, Bandung, 1993.
- , ***Sistem Peradilan Pidana (Criminal Jusctice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme***, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, ***Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional***, Departemen Kehakiman RI, 1995/1996.
- , ***Konsep Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2000***, Jakarta, 2002.
- Cross, Rupert, ***Punishment, Prison and The Public, The Aispices of The Hamlin Trust***, London, 1971.
- Document, ***Fifth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders***, Report on Agende Item 9, Jenewa-Austria, 1-12 September 1975.
- Friedmen, Lawrence M., ***The Legal System A Social Perspective***, Russell Sage Foundation New York, 1975.

Gautama, Sudargo, ***Pembaharuan Hukum di Indonesia***, Alumni, Bandung, 1973.

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, ***Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Hamzah, Andi, ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia, 1986.

-----, ***KUHP Jepang***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

-----, ***KUHP Republik Korea***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

-----, ***KUHP Argentina***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

-----, ***Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

-----, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Garner, A., Bryan (ed), ***Black's Law Dictionary***, Sevent Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999.

Hamzah, Andi, Surahman, ***Kejahatan Narkotika dan Psikotropika***, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Hartono, Sunaryati, ***Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20***, Alumni, Bandung, 1994.

Hoefnagels, G.P., ***The Other Side of Criminology***, Deventer-Kluwer, Holland, 1978.

Hullsman, L.H.C., ***The Dutch Criminal Justice System From A Comparative***, in the D.C. Fokkema (Ed.) *Introduction To Dutch Law For Foreign Lawyers* (Kluwer Deventer, The Netherlands 1978).

Koentjaraningrat, ***Metode-Metode Penelitian Masyarakat***, Gramedia, Jakarta, 1991.

Kartodirjo, Sartono, ***Metode Penyusunan Bahan Dokumen, dalam : Metode Penelitian Masyarakat***, Koentjoroningrat, LIPI, Jakarta, 1973.

Kusumah, Mulyana W, ***Kejahatan dan Penyimpangan***, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1988.

Lamintang, PAF, ***Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan***, Mandarmaju, Bandung, 1980.

Lopa, Baharudin, ***Etika Pembangunan Hukum Nasional Dalam Identitas Hukum Nasional***, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997.

Loqman, Loebby, ***Delik Politik di Indonesia***, In-Hill-Co, Jakarta, 1993.

-----, ***Pidana dan Pemidanaan***, Datacom, Jakarta, 2002.

Mahendra, Oka, ***Memberdayakan Program Legislasi Nasional Sebagai Dokumen Pengintegrasikan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan***, Majalah Hukum Nasional No. 1, 1999, BPHN, Departemen Kehakiman RI.

Mertokusumo, Sudikno, ***Mengenal Hukum, Suatu Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Moelyatno, ***Atas Dasar atau Asas-Asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun?***, Prasaran pada Kongres Persahi II Surabaya, 15 – 19 Juli 1964.

-----, ***Membangun Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

-----, ***KUHP***, Bina Aksara, Yogyakarta, 1985.

Muhadjir, Noeng, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Rake Sarasin. Yogyakarta, Edisi III, Cetakan VII, 1996

Muladi, ***Lembaga Pidana Bersyarat***, Alumni, Bandung, 1985.

-----, ***Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang***, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, tanggal 24 Februari 1990.

-----, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 1995.

-----, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1998.

Mulder, A., **Strafrechtspolitik, Delikt en Delikwet**, Mei 1980.

Natabaya, H.A.S., **Upaya Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi**, Makalah Disampaikan Pada Forum Dialog Terbuka, Jakarta, 5 Mei 1999.

Packer, Herbert L., **The Limit of The Criminal Sanction**, Stanford University Press, California, 1968.

Prakoso, Djoko, dan Nurwachid, **Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lani, Amir Muhsin, **Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro, Wirdjono, **AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia**, PT Eresco, Bandung, 1976.

Poernomo, Bambang, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Liberti, Yogyakarta, 1988.

Radie, Teuku Muhammad, **Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Dalam Identitas Hukum Nasional**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997.

Rahardjo, Satjipto, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1983.

-----, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986.

Ranuhandoko, I.P.M, ***Terminologi Hukum Inggris-Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 1996.

Reksodiputro, Mardjono, ***Sistem Peradilan Pidana Indonesia***, Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Tetap dalm Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.

-----, ***Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana***, Univesitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Remmelink, Jan, ***Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Sakidjo, Aruan, ***Kuliah Pengantar Metodologi Ilmu Hukum***, FH UMY, Yogyakarta, 1993.

Saleh, Roeslan, ***Mencari Asas-asas Umum yang sesuai Untuk Hukuman Pidana Nasional***, Kumpulan bahan upgrading hukum pidana, jilid 2, Tahun 1971.

-----, ***Stelsel Pidana Indonesia***, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

-----, ***Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

-----, ***Mencari Kriteria Menentukan Dipidananya Suatu Perbuatan***, Makalah Disajikan Pada Seminar Nasional tentang *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, 15 Juli 1993.

-----, ***Perkembangan-Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana***, Diktat, tanpa tahun.

Seno Adji, Oemar, ***Hukum Pidana dan Pengembangan***, Erlangga, Jakarta tahun 1980.

Sigler, Jay A., ***Understanding Criminal Law***, 1981.

Soehardjo SS, *Politik Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji,, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984 .

-----, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

-----, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Masalah-Masalah Hukum, UNDIP Nomor 9, Semarang, 1991.

-----, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, 2001.

-----, *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, 2001.

Soerjowito, Petrus, *Kebijakan Legislatif Sebagai Kebijakan Strategi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Pranata, Universitas Soegijopranoto, Semarang, Edisi Agustus/November 1993

Soesilo, R., *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.

Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro, Semarang 21 Desember, 1974.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1981.

- , ***Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)***, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1981.
- , ***Hukum Pidana I***, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987/1988.
- , ***Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat***, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Van Hammel, G.A., ***Inleiding tot de Studie van Het Ned Strafrecht***, Harlem : De Erven F. Bohn, 1929.
- Vos, H.B., ***Leverboek van Nederlands Strafrecht***, Haarlem; H.D. Tjeenk, Willink, 1950.
- Wahab, Abdul, Solichin, ***Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara***, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Wibisono, Koento, ***Etika Pembangunan Hukum Nasional Dalam Identitas Hukum Nasional***, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997.

Perundang-undangan

Pancasila

Undang Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang Undang.

Document, Fifth United Nation Congress on *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Report on Agende Item 9, Jenewa-Austria, 1-12 September 1975.